

Renjis

JURNAL ILMIAH BUDAYA DAN SEJARAH MELAYU

JURNAL RENJIS, VOL. 5 No. 1 Juli 2019

ISSN : 2460-9501

- 1-15 : PEMIKIRAN AWAL UPAYA PELINDUNGAN OBJEK-OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN KAWASAN SITUS BUKIT KERANG KAWAL DARAT (BKRD) MELALUI PENGEMBANGAN *E-CONSULTATION*
Defri Elias Simatupang
- 16-30 : HUBUNGAN KUANTAN DENGAN KERAJAAN INDRAGIRI DAN MINANGKABAU PADA MASA KOLONIAL BELANDA (1905-1942)
Indriani
- 31-45 : HARMONISASI ANTAR ETNIK DI KABUPATEN BATANG HARI, JAMBI ABAD IX-XX
Dedi Arman
- 46-63 : PEWARISAN UPACARA *KUHI SEKO* MASYARAKAT KERINCI – JAMBI
Sean Popo Hardi
- 64-77 : DARI SYAIR KE RANAH TEATER
(Korelasi Syair Melayu dalam Pertunjukan Teater Bangsawan)
Nanda Darius



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA KEPULAUAN RIAU



9 772460 950003

Jurnal
Renjis

Vol. 5

No. 1

Hlm 1 - 79

Tanjungpinang,
Juli 2019

ISSN :
2460-9501

Volume 5 No 1 Juli 2019

ISSN : 2460-9501

Renjis

JURNAL ILMIAH BUDAYA DAN SEJARAH MELAYU

Jurnal Ilmiah Renjis adalah media penerbitan hasil penelitian dan pemikiran mengenai kebudayaan dan sejarah masyarakat Melayu. Penulis naskah dalam jurnal ini berasal dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau dan dari lembaga lain yang melakukan kajian terhadap etnis Melayu. Renjis terbit dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember.

Dewan Redaksi:

Penanggungjawab	: Drs. Toto Sucipto
Pemimpin Redaksi	: Febby Febriyandi. YS, M.A
Editor	: Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A : Sita Rohana, S.Sos, M.Hum
Mitra Bestari / Editor Tamu	: Dr. Zainal Arifin, M.Hum : Dr. Wannofri Syamri, M.Hum : Dr. Linda Sunarti, M.Hum
Redaksi Pelaksana	: Sasangka Adi Nugraha, S.S : Ardiansyah, S.Kom
Sekretariat	: Sasangka Adi Nugraha, S.S

Alamat Redaksi

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau
Jl. Pramuka No 7, Tanjungpinang 29124
Tlp / Fax: (0771) 22357
Email : jurnalrenjis@gmail.com
Website : <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri>

Penerbit :

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kepulauan Riau

PEMIKIRAN AWAL UPAYA PELINDUNGAN OBJEK-OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN KAWASAN SITUS BUKIT KERANG KAWAL DARAT (BKGD) MELALUI PENGEMBANGAN <i>E-CONSULTATION</i>.....	1
<i>Defri Elias Simatupang</i>	
HUBUNGAN KUANTAN DENGAN KERAJAAN INDRAGIRI DAN MINANGKABAU PADA MASA KOLONIAL BELANDA (1905 -1942).....	16
<i>Indriani</i>	
HARMONISASI ANTAR ETNIK DI KABUPATEN BATANG HARI, JAMBI ABAD IX-XX.....	31
<i>Dedi Arman</i>	
PEWARISAN UPACARA <i>KUHI SEKO</i> MASYARAKAT KERINCI – JAMBI	46
<i>Sean Popo Hardi</i>	
DARI SYAIR KE RANAH TEATER (Korelasi Syair Melayu dalam Pertunjukan Teater Bangsawan)	64
<i>Nanda Darius</i>	
BIODATA PENULIS	78

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, jurnal Renjis vol 5 no 1 Juli 2019 dapat diterbitkan. Terbatasnya tulisan dengan tema yang spesifik pada budaya dan sejarah Melayu masih menjadi satu persoalan yang dihadapi redaksi. Namun demikian redaksi Renjis terus berkomitmen menjaga kelancaran penerbitan Renjis demi meriahnya diskusi ilmiah dalam ranah kajian budaya dan sejarah Melayu. Karena itu redaksi mengajak para pembaca terutama para penulis muda untuk berpartisipasi mengirimkan naskah ilmiah hasil pemikiran maupun penelitian yang telah dilakukan.

Pada volume 5 no 1 ini diterbitkan lima naskah dengan fokus yang beragam. Defri Elias S, menulis tentang: “Pemikiran Awal Upaya Pelindungan Objek-Objek Pemajuan Kebudayaan Kawasan Situs Bukit Kerang Kawal Darat (BKKD) Melalui Pengembangan *E-Consultation*. Dalam naskah ini Defri menawarkan model dan konsep pelindungan situs bersejarah Bukit Kerang Kawal Darat, yang menarik untuk disimak dan diperbincangkan. Naskah kedua berjudul “Hubungan Kuantan dengan Kerajaan Indragiri dan Minangkabau Pada Masa Kolonial Belanda (1905-1942)”, di tulis oleh Indriani. Dalam tulisannya Indriani mengungkap bagaimana pengaruh Minangkabau dan Indragiri terhadap Kuantan. Naskah ketiga berjudul “Harmonisasi Antar Etnik di Kabupaten Batang Hari, Jambi Abad IX-XX”, ditulis oleh Dedi Arman. Peneliti sejarah pada BPNB Kepulauan Riau ini menyimpulkan bahwa keharmonisan antar etnis di Batang Hari terwujud karena keberadaan Adat Melayu Jambi sebagai perekat masyarakat Batang Hari yang heterogen. Naskah keempat berjudul “Pewarisan Upacara *Kuhi Seko* Masyarakat Kerinci-Jambi” yang ditulis oleh Sean Popo Hardi. Dalam tulisan ini Sean menjelaskan prosesi, fungsi dan pewarisan upacara bersih desa serta benda pusaka dalam masyarakat Kerinci. Ia menyebut struktur upacara *kuhi seko* terdiri dari pembuka, isi dan penutup, dimana setiap unsur dalam upacara memiliki proses pewarisan yang berbeda. Naskah terakhir berjudul “Dari Syair ke Ranah Teater (Korelasi Syair Melayu dalam Pertunjukan Teater Bangsawan)”, ditulis oleh Nanda Darius. Melalui tulisan ini Nanda menjelaskan bagaimana syair Melayu mengalami pengalihan wahana dari bahasa tulis menjadi pertunjukan peran. Nanda menyimpulkan bahwa syair dan teater Melayu memiliki hubungan yang saling menguntungkan secara konsep dan kemasan. Lima tulisan dalam terbitan ini tentunya perlu didialogkan dan dikritisi agar data, argument dan

pemikiran yang telah dituangkan menjadi makin tajam dan berguna baik secara praktis maupun teoritis.

Akhir kata, redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang bersedia mengirimkan naskahnya ke meja redaksi sehingga Renjis dapat terus eksis. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari / Editor Tamu yang berkenan memeriksa dan memberikan masukan bagi perbaikan tulisan. Semoga terbitan ini memberi manfaat bagi kita semua. Selamat membaca.

Hormat Kami,

Dewan Redaksi

**PEMIKIRAN AWAL UPAYA PELINDUNGAN OBJEK-OBJEK
PEMAJUAN KEBUDAYAAN KAWASAN SITUS BUKIT
KERANG KAWAL DARAT (BKKD)
MELALUI PENGEMBANGAN E-CONSULTATION**

*INITIAL THOUGHT ON THE PROTECTION OF CULTURAL
ADVANCEMENT OBJECTS IN BUKIT KERANG KAWAL DARAT
(BKKD) SITE AREA USING E-CONSULTATION DEVELOPMENT.*

Defri Elias Simatupang

Balai Arkeologi Sumatera Utara

Jl. Seroja Raya, Medan 20134 telp. (061) 8224365

defri.simatupang@kemdikbud.go.id

ABSTRACT

This research studies the protection of cultural advancement objects in Situs Bukit Kerang Kawal Darat (BKKD) site area using the development of public electronic consultation (E-Consultation). The aim of this research is to understand the synergy between UU Nomor 5 Tahun 2017, which regulates the cultural advancement and UU No. 11 Tahun 2010, which regulates cultural heritages, through case study on BKKD site. This research used descriptive analysis to get deeper understanding, by giving detailed description relating to identification of cultural advancement objects on BKKD site. The data was inserted to the framework of protection process as part of cultural advancement effort; done by inventorying, safekeeping, maintenance, saving, and publication. Publication is important to get feedback from public through electronic mean (E-Consultation), so that the feedback will be easily accessed by all stakeholder. The result of this research offers a protection model of cultural advancement objects in BKKD site area. It can be concluded that cultural advancement object's protection in BKKD site area through development of E-Consultation feasible with few adjustments.

Keywords: protection, cultural advancement objects, e-consultation.

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan sebuah pemikiran untuk mengkaji tentang perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs Bukit Kerang Kawal Darat (BKKD) melalui pengembangan konsultasi publik elektronik (*E-Consultation*). Tujuan kajian ini adalah untuk memahami sinergi antara UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dengan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya melalui studi kasus pada Situs BKKD. Untuk mendapatkan pemahaman yang dalam, dilakukan analisis deskriptif dengan memberikan gambaran lengkap terkait identifikasi objek-objek pemajuan kebudayaan kawasan Situs BKKD. Data-data dimasukkan kedalam kerangka tahapan perlindungan sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan, dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Selanjutnya coba dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan / partisipasi publik secara elektronik (*E-Consultation*). *E-Consultation* sangat dibutuhkan agar nantinya mendapatkan masukan dan diterima oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hasil kajian menawarkan sebuah model penawaran konsep perlindungan objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD melalui pengembangan *E-Consultation*, dapat terwujud dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan.

Kata kunci: perlindungan, objek pemajuan kebudayaan, e-consultation

A. PENDAHULUAN

Berawal dari disahkannya undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pada tanggal 27 April 2017. Penulis sebagai seorang peneliti arkeologi (arkeolog) tertarik melihat kemanfaatan undang-undang ini terkait perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Cagar Budaya Situs Bukit Kerang Kawal Darat (selanjutnya disingkat Situs BKKD). Menarik mengkaji UU ini karena lebih luas cakupannya dibandingkan UU RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. UU Pemajuan Kebudayaan, merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui : perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Negara tampaknya menyadari kalau kebudayaan perlu mendapatkan perlindungan sebagai investasi membangun masa depan di tengah peradaban dunia. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan. yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (pasal 1 ayat 4 UU Pemajuan Kebudayaan).

Bicara publikasi dalam UU Pemajuan Kebudayaan, terindikasi masih kurang bersinergi bila dikaitkan dengan UU Cagar Budaya. Pemerintah idealnya membuat rencana strategis terkait pemajuan sumber daya budaya, termasuk para arkeolog peneliti (aparatur negara) yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode ilmiah yang terkesan menjurus bahwa mereka saja yang paling berhak mengembangkan sumberdaya budaya (Handoko, 2008 : 33). Perlu kerjasama dengan siapa saja yang memiliki kepentingan (stakeholder), agar publikasi dijalankan dengan benar, sistematis, terukur, dan legal Jangan sampai pelindungan di Kawasan Situs BKKD terpublikasi secara tidak benar. Menurut Atsar, pelindungan harus dilakukan dengan menginventarisasi objek pemajuan

kebudayaan termasuk pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi dan pengembangan (Atsar, 2017 : 297-298). Pemahaman lemah dari publik tidak seharusnya direspon arkeolog secara gelap mata, tanpa mengetahui publik yang mana yang diajak berkomunikasi. Karena hanya akan menghasilkan ‘kebosanan’ interpretasi yang tidak tepat sasaran (Merriman, 2004 : 8).

Ketidaktepatan sasaran publikasi harus dihindari demi suksesnya tahapan-tahapan pelindungan kebudayaan pada kawasan Situs BKKD. Karena kegiatan penelitian institusi pemerintah dibiayai publik melalui pajak yang dibayarkan kepada negara. Publik berhak mendapatkan informasi apa yang dikerjakan, dan manfaat terhadap hasil penelitian tersebut. Misalkan salah satu tahapan pelindungan dilakukan dengan pemanfaatan internet akan lebih memiliki respon publik secara cepat. Publik bermain internet karena tujuan umum seperti : mencari berita / data dari berbagai situs internet, dan partisipasi berkomunikasi dengan orang lain. *E-Consultation* sebagai sebuah kegiatan partisipasi publik pada media internet sangat dibutuhkan institusi pemerintah agar nantinya mendapatkan masukan informasi dan diterima oleh semua stakeholder.

Kegiatan publikasi baik dari segi keterbukaan informasi maupun ketersediaan sarana pempublikasian, masih menjadi polemik bagi institusi pemerintah umumnya dan di bidang kebudayaan khususnya. Hal ini dilihat dari data tahun 2015, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyebutkan bahwa kementerian dengan nilai keterbukaan informasi tertinggi adalah Kementerian Keuangan. Selanjutnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Sekretariat

Negara (Akuntono, 2015). Artinya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai induk dari Balai Arkeologi Sumatera Utara berada diluar sepuluh besar. Padahal keterbukaan informasi merupakan bagian dari cara perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan. Informasi seputar kebudayaan hendaknya semaksimal mungkin dipublikasikan, bahkan dengan media yang semakin kompleks seperti melalui pengembangan *E-Consultation*.

E-Consultation merupakan upaya pemerintah pelibatan publik membahas terkait permasalahan publik menyangkut kepentingan bersama, dilakukan menggunakan media elektronik sebagai tempat berdiskusi. Media elektronik yang dipakai seperti : rekaman video, audio, presentasi multimedia, dan konten dalam jaringan (*online* di internet). *E-Consultation* menjadi sebuah agenda kerja penting bagi pemerintah, karena publik berhak tahu apa yang dikerjakan, seperti dalam tulisan ini mencari solusi permasalahan terkait kebijakan pengelolaan Situs BKKD (salah satu situs objek penelitian di wilayah kerja Balai Arkeologi Sumatera Utara). Tugas dan fungsi Balai Arkeologi Sumatera Utara sebagai unit pelayanan teknis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, selain mempublikasikan hasil penelitian Situs BKKD, juga untuk mendayagunakan nilai penting hasil penelitian. Maka pengembangan *E-Consultation* menjadi sebuah tantangan / pemikiran dalam upaya meningkatkan nilai hasil penelitian.

Damanik mengatakan hingga saat ini, kajian pengembangan kerangka implementasi *E-Consultation* masih relatif jarang. Model-model implementasi yang dikembangkan hanya terbatas pada penerapan konsep komunikasi satu arah (*E-Participation*) secara umum (Damanik, 2016 : 82). Institusi pemerintah di bidang kebudayaan diharapkan mampu membuka diri menerima masukan publik agar penelitian dalam upaya mengenali genius kebudayaan Indonesia di sepanjang

perjalanan sejarahnya, dapat memberikan pengetahuan lebih tentang nilai-nilai luhur yang ada pada masa lampau, dan kontekstual di masa kini (Restiyadi, 2009: 6). Para arkeolog peneliti Situs BKKD dapat menjadikan kegiatan ini semacam kesadaran mengevaluasi terukur terkait peningkatan fungsi institusi terhadap upaya pengembangan konsultasi publik berbasis media elektronik. Melalui tulisan ini, permasalahan tersebut dirumuskan dalam kalimat tanya: “Bagaimana konsep perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD melalui penawaran konsep pengembangan *E-Consultation*?”

Metode penelitian yang dianggap layak digunakan dalam kajian awal ini adalah metode kajian pengembangan. Peneliti mencoba melakukan kajian proses pengembangan *E-Consultation* yang salah satu contoh kasus terkait upaya perlindungan objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD. Analisis deskriptif dilakukan terkait gambaran objek-objek pemajuan kebudayaan kawasan Situs BKKD. Pemahaman dalam didapatkan, setelah semua data masuk kedalam kerangka tahapan perlindungan, kemudian dilakukan tahapan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi untuk mendapatkan tanggapan / partisipasi publik melalui *E-Consultation*. Kegiatan analisis dalam tulisan ini sangat bergantung kepada kedalaman pemahaman akan amanat UU Pemajuan Kebudayaan dan UU Cagar Budaya. Kesemua tahapan digambarkan dalam sebuah permodelan yang memudahkan pemahaman penelitian ini.

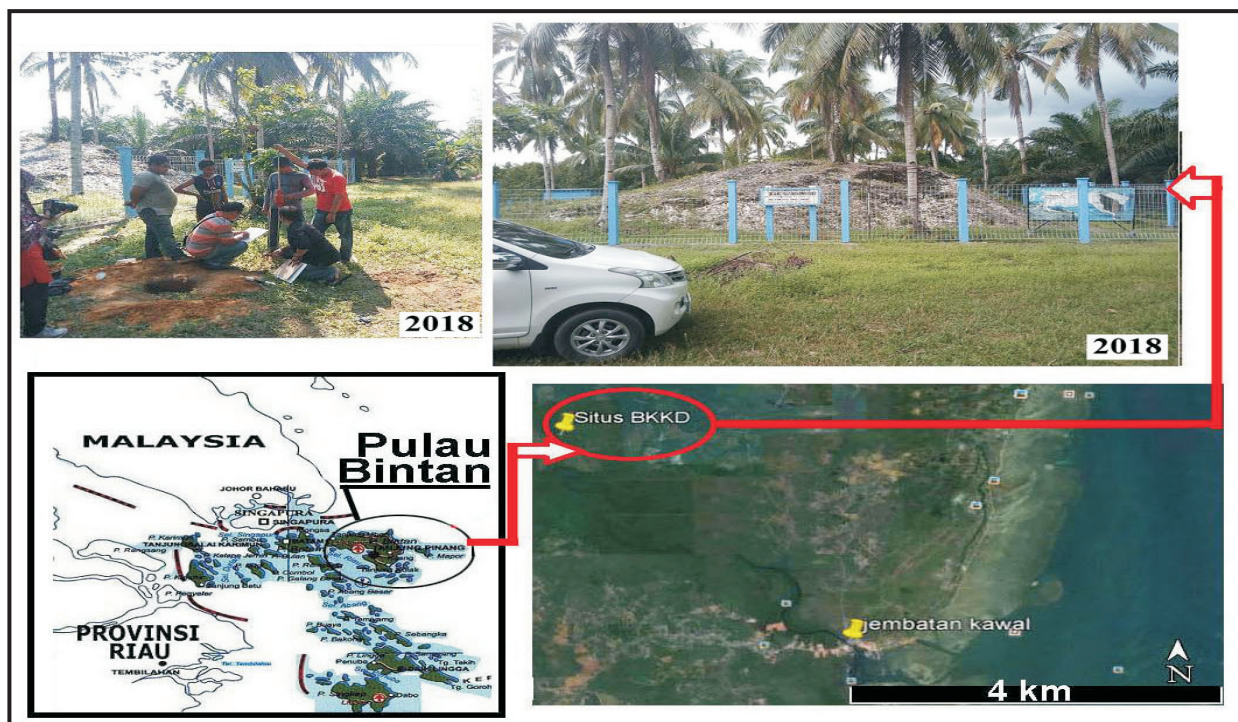
Manfaat teoritis karya tulis ini untuk semakin mendalami kajian pengelolaan kawasan cagar budaya, dengan penambahan regulasi baru berupa UU Pemajuan Kebudayaan yang mengatur terkait objek pemajuan kebudayaan. Adapun manfaat praktis, untuk membantu pemerintah dan publik menawarkan sebuah solusi dalam melindungi objek-objek

pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD melalui pengembangan *E-Consultation*. Pendekatan kualitatif dilakukan, dimana data-data yang diperoleh, menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai alat mengamati data-data primer (Moleong 2005, 9). Kajian ini juga membutuhkan data-data sekunder terkait teori-teori yang relevan dan hasil pengamatan partisipatoris untuk mendukung benar tidaknya kedua produk hukum tersebut dapat bersinergi. Keseluruhan data dianalisis dengan kedalaman tingkat bahasan yang dalam hal ini dibuatkan semacam model kerangka berpikir awal agar memudahkan melihat apakah kedua undang-undang tersebut dapat bersinergi dalam upaya perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD, teristimewa melalui pengembangan *E-Consultation*.

B. HASIL DAN BAHASAN

1. UU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam kaitan Kawasan Situs BKKD

UU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan terdiri atas IX Bab, 61 pasal. Kesembilan bab tersebut : kebudayaan sebagai investasi, sistem pendataan kebudayaan terpadu, pokok pikiran kebudayaan daerah, strategi kebudayaan, rencana induk pemajuan kebudayaan, dana perwalian kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan, penghargaan, dan sanksi (Seftiawan, 2018). Tampaknya melalui UU ini, pemerintah mengajak publik merawat dan memanfaatkan kebudayaannya masing-masing. Harapannya agar dampak pemajuan kebudayaan dirasakan publik manfaatnya kedepannya, bukan hanya kesejahteraan, juga naiknya kedudukan Indonesia di era globalisasi. Undang-Undang Pemajuan



Gambar 1. Peta keletakan situs BKKD, dengan salah satu kegiatan foto penelitian Tahun 2018 (Sumber: Peta Google Earth)

Kebudayaan kemudian mencetuskan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai database kebudayaan.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dapat menjadi alat perlindungan yang mana potensi klaimisasi oleh pihak

asing dapat diminimalisir. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menjadi acuan dalam memantapkan strategi kebudayaan. Dalam sebuah wawancara, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menyatakan, empat langkah strategis pemajuan kebudayaan (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan), secara kongkrit akan dilakukan penyusunan kebijakan dari bawah, kabupaten/kota, lalu ke provinsi hingga nasional yang rencananya disusun dalam kongres kebudayaan yang dilaksanakan pada 2018 (Eppang, 2017). Hasil Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 adalah Strategi Kebudayaan berupa dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan nasional 20 tahun dan dapat diperbarui setiap 5 tahun (Susanto, 2018).

KKI 2018 merupakan puncak dari proses penyusunan dokumen perencanaan secara berjenjang yang diawali dengan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tingkat kabupaten/ kota dan provinsi. Pokok pikiran kebudayaan daerah menunjukkan kalau setiap pemerintahan daerah wajib merumuskan pokok pikiran kebudayaan daerah masing-masing. Dalam penyusunannya, para stakeholder dilibatkan. Sebagai contoh : selain luas kawasan, Situs BKKD harus jelas batasannya dalam menggiatkan siapa saja yang masuk kategori para penggiat budaya dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan sesuai UU Pemajuan Kebudayaan. Setelah kawasan Situs BKKD terdefinisi dengan baik, selanjutnya unsur pemajuan tersebut dapat dikaitkan kepada potensi ekonomi yang berpeluang diraih.

Bantuan yang diberikan pemerintah sudah sesuai dengan amanat kedua UU kebudayaan. Pasal 49 UU Pemajuan Kebudayaan mengatakan Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan. Dalam UU cagar budaya, Pasal 22 menyatakan pemberian kompensasi, insentif serta pengurangan pajak dilakukan untuk mendorong pelestarian oleh pemilik, pengguna atau pengelola cagar budaya

yang dilestarikan. Kendati kompensasi yang diterima bukan berupa imbalan uang, namun pemerintah berusaha memberikan keringanan pajak, berupa bantuan tenaga dan/atau bantuan bahan sebagai penggantian biaya pelestarian kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola cagar budaya (Surbakti, 2017 : 149). Kompensasi merupakan pelaksanaan dari pembagian manfaat tidak selalu dalam bentuk uang namun dapat juga seperti membagi hasil riset atas pengetahuan tradisional tersebut kepada pihak penyedia pengetahuan tradisional atau memfasilitasinya (Siddiq, 2018 : 176-177). Kompensasi bila dikaitkan terhadap Kawasan Situs BKKD, memungkinkan terjadi karena kedua UU Kebudayaan melakukan sinergitas dalam upaya perlindungan kawasan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Memang masih ada jarak yang lebar antara studi analisis kebijakan dan pemanfaatan kedua UU tersebut dalam proses pengambilan kebijakan. Evaluasi berdasarkan studi kasus idealnya akan selalu dimunculkan. Misalkan melalui tulisan ini coba diambil studi terkait Situs BKKD.

Bila melihat definisi perlindungan pada UU Pemajuan Kebudayaan, dibandingkan definisi perlindungan pada UU Cagar Budaya. Pelindungan dalam UU Pemajuan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 ayat 4). Dalam UU cagar budaya, pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (Pasal 1 ayat 23). Adapun pasal 97 dan pasal 98 UU Cagar Budaya juga berbicara tentang pendanaan seputar pengelolaan kawasan cagar budaya. Kedua UU ini memiliki kesamaan, dimana upaya pelindungan dapat dilakukan oleh siapa saja. Bedanya kalau dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2010, pelindungan dilakukan

dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Dalam UU Pemajuan Kebudayaan, perlindungan dilakukan pada sepuluh objek pemajuan kebudayaan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

2. Nilai Penting Objek-objek Pemajuan Kebudayaan Kawasan Situs BKKD

Situs BKKD merupakan situs arkeologis di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. mulai diteliti kantor Balai Arkeologi Sumatera Utara semenjak tahun 2009. Hasil penelitian sejauh ini mengindikasikan Situs BKKD adalah situs prasejarah dengan hunian aktif hingga sekitar tahun 300M. Situs BKKD dikatakan kawasan karena sesuai UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 1 ayat 6 menyatakan Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Situs BKKD ditemukan paling tidak tiga lokasi sampah kerang di (namun hanya satu yang terselamatkan yaitu Situs BKKD saat ini). Berdasarkan definisi UU, Situs BKKD lebih tepat disebut Kawasan Cagar Budaya dengan satuan ruang geografis berupa lahan basah (tempat tersedianya sumberdaya alam melimpah untuk bermukim sepanjang masa). Data artefaktual yang ditemukan di Situs BKKD tampaknya mempertegas kalau situs ini dimanfaatkan masa neolitik. Menjadi menarik karena sangat berbeda dengan konteks pertanggalan hunian di situs-situs bukit kerang lainnya yang ditemukan di Pesisir Timur Sumatera yang dihuni sejak periode mesolitik (Simatupang, 2017 : 65).

Publikasi berita penelitian arkeologi, menjadi sebuah tanggungjawab untuk dikerjakan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sebagai institusi pemerintah beserta sepuluh unit pelaksana

teknis (Balai Arkeologi). Perkembangan media dan jaringan yang cepat harus bisa diimbangi oleh organisasi demi kemudahan dikenal publik. Adapun berbagai macam media sudah ada dari yang gratis atau yang berbayar. Berita hasil penelitian arkeologi bisa lebih dikenal publik, dengan memanfaatkan media secara optimal, untuk menghubungkan institusi dengan publik secara lebih erat. Namun dirasakan, berita hasil penelitian arkeologi tidak banyak 'viral' (kata 'viral' digunakan untuk menyebut sesuatu yang menyebar secara banyak dengan cepat).

Maka bisa saja upaya perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD viral ketika strategi publikasinya ada dan gencar. Upaya strategis tersebut idealnya dipandang sebagai investasi pembangunan peradaban bangsa, maka perlu mendapat jaminan / komitmen pemerintah kepada publik melalui turunan dari peraturan perundang-undangan (Zulkifli & Azhari, 2018 : 67 - 68). Adanya apresiasi kepada masyarakat penggiat budaya, akan semakin memudahkan dalam menciptakan strategi kebudayaan terhadap kawasan cagar budaya Situs BKKD. Dari data yang ditemukan, paling tidak dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan, ada beberapa objek yang teridentifikasi seperti dalam tabel dibawah ini :

Identifikasi sepuluh objek pemajuan kebudayaan pada masyarakat sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan melalui pengembangan <i>E - Consultation</i>	
1	Tradisi Lisan : dipahami sebagai kesaksian yang diwariskan dari generasi ke generasi, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Pada masyarakat sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD, berdasarkan pengamatan pada saat mengikuti sebuah kegiatan pada masyarakat, teridentifikasi ada, namun belum terdata secara detil mendalam.

2	Manuskrip : dipahami sebagai naskah tulisan tangan beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai sejarah dan budaya, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab. Pada masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD, objek manuskrip tidak ada ditemukan. Kalau mencakup kawasan yang lebih luas (se kabupaten / Pulau Bintan) kemungkinan ada dari beberapa kali kegiatan studi pustaka ke kantor arsip / perpustakaan.		diwariskan pada generasi berikutnya. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan objek pengetahuan tradisional dirasakan ada, terkait pengetahuan masyarakat terkait dan kebiasaan perilaku bermata pencaharian rangkap sebagai petani, nelayan dan berkebun (lingkungannya mendukung).
3	Adat istiadat : dipahami sebagai kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat terus-menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD, objek adat istiadat masih kental dirasakan dengan nuansa kemelayuan. Dari beberapa kali kegiatan sosial yang diikuti, meskipun masyarakat sudah heterogen, mereka masih bisa memahami dan melaksanakan adat istiadat tersebut.	6	Teknologi tradisional : dipahami sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD, objek ini tidak ditemukan secara.
4	Ritus : dipahami sebagai tata cara pelaksanaan upacara yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan secara terus – menerus dari generasi ke generasi, misalnya : perayaan peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian beserta perlengkapannya. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan objek ritus melekat pada adat istiadat masih kental dirasakan dengan nuansa kemelayuannya.	7	Seni : dipahami sebagai ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan. Pada masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD, berdasarkan pengamatan, objek seni ditemukan dalam bentuk pementasan <i>mak yong</i> . Meskipun masyarakat heterogen, mereka bisa memahami dan melaksanakan seni pertunjukan <i>mak yong</i> . Perlu pendalaman tersendiri untuk kajian objek ini.
5	Pengetahuan tradisional : dipahami sebagai seluruh ide dan gagasan yang mengandung nilai-nilai lokal hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan terus-menerus dan	8	Bahasa : dipahami sebagai sarana komunikasi, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD, objek bahasa aksen melayu

	masih kental digunakan, meskipun masyarakat sudah heterogen secara kesukuan.
9	Permainan rakyat : dipahami sebagai berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu (menghibur diri / penonton), dilakukan secara terus menerus dan diwariskan ke generasi berikutnya. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD, berdasarkan pengamatan yang dilakukan objek permainan rakyat yang umum dipertandingkan ketiga acara besar seperti lomba lari dengan kelereng, balap karung, dan sebagainya.
10	Olahraga tradisional : dipahami sebagai berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan 'diwariskan pada generasi berikutnya. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Situs BKKD, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan objek olahraga tradisional yang ditemukan adalah sepaktakraw yang biasa dilakukan ketika disore hari.

Kesepuluh objek pemajuan kebudayaan yang diobservasi pada masyarakat sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD, tentunya masih butuh kajian yang lebih mendalam lagi agar terbuka identitas budaya yang selama ini mungkin tertutupi. Dalam Lintas Budaya, setiap orang seharusnya memahami masing-masing budaya yang ada di sekitarnya sehingga dapat beradaptasi ketika berada di kebudayaan yang berbeda. Restiyadi mengatakan kalau pada dasarnya setiap budaya memiliki ciri tersendiri yang disebut sebagai identitas budaya. Identitas budaya tersebut menjadi bentuk baku (pakem) dari budaya yang akan berkembang selanjutnya (Restiyadi, 2009: 4). Semakin banyak data yang

menunjukkan bentuk baku dari kebudayaan setempat, maka akan semakin tinggi daya jelajah merekonstruksi peradaban sebuah kawasan. Ketika hasil-penggalan di Situs BKKD mampu berbicara banyak, akan semakin meningkatkan nilai penting kawasan cagar budaya Situs BKKD. Maka ide terkait pengembangan *E-Consultation* pada dasarnya merupakan sebuah bagian dari upaya mewujudkan harapan tersebut.

3. Pengembangan *E-Consultation* Situs BKKD

E-Consultation bisa dikatakan sebagai sebuah hak konstitusional publik. Informasi akan hasil penelitian arkeologi dan potensi objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD, menjadi hak publik untuk mendapatkannya dan melakukan respondensi. Setiap institusi pemerintah sewajarnya memberikan wadah untuk menerima masukan publik. Sebagai contoh, ketika arah pengembangan penelitian Situs BKKD memprioritaskan kepentingan pendidikan muatan lokal bagi peserta anak didik. Berbagai masukan dari para stakeholder melalui *E-Consultation* Situs BKKD sangat dibutuhkan terkait nilai penting pengetahuan sejarah budaya lokal khususnya pelajar di Kabupaten Bintan. Menurut Ririmase (Ririmasse, 2014 : 21), ada lima aspek model yang dapat dikembangkan agar pelajar mendapatkan pengetahuan cukup terkait warisan budaya sebagai muatan lokal, meliputi : pengembangan tema konten, inisiasi model sosialisasi interaktif, pembaharuan materi, peningkatan frekuensi, dan pembinaan tenaga guru. Kelima aspek diperluas sesuai kebutuhan asalkan pengetahuan warisan budaya menjadi wahana perluasan wawasan demi menarik minat generasi muda.

Generasi muda semakin kritis mendalami persoalan sejarah dan budayanya. Para peneliti tak bisa lagi hanya mengandalkan metode ilmiah mereka, apalagi sampai terkesan arogan

berpikir kalau hanya para arkeolog yang paling berhak meneliti sumberdaya budaya dan sumberdaya arkeologi. Melihat fenomena demikian, Merriman menyarankan agar para arkeolog lebih bersikap seperti jurnalis ketimbang akademisi dengan cara menjadi pelayan untuk komunitas yang mereka bayangkan. Pemahaman yang lemah dari publik tidak seharusnya direspon, tanpa mengetahui publik mana yang diajak berkomunikasi (Merriman, 2004: 8). Penelitian Situs BKKD bila tanpa dikembangkan dalam sebuah kerangka *E-Consultation*, secara otomatis peningkatan fungsi Institusi Pemerintah tidak maksimal tercapai. Hal itu disebabkan karena disinyalir tidak transparan dan tidak akuntabel. Transparan dalam hal ini adalah ketika penelitian Situs BKKD tidak menutup-nutupi interpretasi apapun dari cara pandang mereka dan akuntabel ketika para arkeolog peneliti Situs BKKD menjelaskan dana yang dikeluarkan untuk sebuah penelitian dan pengembangan, potensi apa yang akan didapatkan.

Potensi yang muncul terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD, perlu mendapatkan perlindungan melalui pengembangan media *E-Consultation*. Kurnia, mengatakan kalau keberadaan media dan proses 'informatisasi' selama ini masih belum banyak disentuh. Padahal dengan beragam jenis media baru yang bisa dijadikan sumber informasi dari yang sangat massif hingga yang sangat personal melibatkan proses 'informatisasi' yang relatif berbeda dengan penerimaan publik yang berbeda pula. Di samping itu, kecepatan perkembangan media baru yang didukung teknologi komunikasi yang semakin lama semakin maju menunjukkan bahwa media komunikasi tidak bersifat tetap setiap saat (Kurnia, 2005 : 294-295). Maka perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD melalui media *E-Consultation* idealnya harus dinamis mengakomodasi

dengan baik segala harapan sesuai UU Kebudayaan.

Pengembangan media *E-Consultation*, akan berefek pada optimalisasi perlindungan objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD. Efek yang ditimbulkan dari pemberitaan media massa, dapat ditangkap berbeda berdasarkan faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu mencakup karakteristik profil pribadi lepas pribadi dari masyarakat yang menangkap pesan pemberitaan tersebut. Dengan kata lain, perbedaan dari tiap manusia turut menentukan daya tangkap terhadap makna isi pesan dari pemberitaan. Adapun faktor sosial maksudnya untuk menjelaskan bagaimana keadaan setiap masing-masing individu, pada saat menangkap pemberitaan tersebut (Nurudin 2007: 195--199). Ketika semakin gencar pemberitaan objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD melalui media *E-Consultation*, secara tidak langsung meningkatkan perhatian publik terhadap hasil penelitian pada situs arkeologi tersebut.

Arkeologi dalam pandangan publik adalah penyelesaian masalah pengelolaan cagar budaya melalui forum / diskusi berproses yang diprakarsai para arkeolog. Tawaran solusi yang dihasilkan idealnya relevan terhadap kepentingan publik (Okamura & Matsuda, 2011 : 14). Dalam konteks kepentingan, masyarakat sekitar kawasan Situs BKKD sangat menginginkan pengembangan kawasan tidak hanya sampai pemagaran zona inti tahun 2012. Keinginan publik tentu hasilnya lebih nyata bila dikawal oleh komunitas yang mensuarakannya. Handoko dalam tulisannya mengatakan, gagasan arkeologi komunitas merupakan konsep yang berbeda dengan arkeologi publik yang fokusnya pada pelibatan masyarakat tanpa batas ruang sosial yang jelas. Gagasan arkeologi komunitas menjadi jalan yang paling moderat mempertemukan (peneliti) arkeologi dengan masyarakat atas pengetahuan

sejarah budayanya. Arkeologi komunitas secara inklusif melibatkan partisipasi komunitas, mulai tahap penelitian hingga perencanaan dan pengelolaan sumberdaya (Handoko, 2008 : 33-34). Maka komunitas tidak seharusnya menjadi lawan pemerintah, justru menjadi rekanan melalui pengembangan *E-Consultation* salah satu contohnya.

Pemberdayaan komunitas sebagai konsep manajemen harus mempunyai indikator keberhasilan. Misalnya pemberdayaan berbasis pelatihan sadar akan berbagai potensi pemajuan kebudayaan kawasan cagar budaya Situs BKKD. Komunitas yang berasal dari sekitar Situs BKKD, dilatih terlibat dalam tahap perlindungan. Mereka dilatih menginventarisasi objek-objek pemajuan kebudayaan yang ada pada mereka, mengamankannya dari kerusakan, memeliharanya sesering mungkin, mengaktualisasikannya dan bila perlu turut mempublikasikannya. Tomy dalam pengamatan terhadap kesenian Ludruk di Jawa Timur, mengatakan : dengan menjadi bagian dari pertunjukan ludruk, kekayaan kultural yang tidak berusaha diadopsi dalam ranah kebijakan di daerah akan jadi hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena sesuai dengan definisi kebudayaan yang diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan, bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ciptaan, cita rasa, niat, dan kerja (Tomy, 2018 : 131). Namun peraturan tersebut jangan menjadi legitimasi “memanfaatkan” status kewenangan individual sebagai satu-satunya pakar pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD. Indikator tetap mengacu kepada kemampuan orang yang paham, tegas, dan tidak meragukan. Dalam masyarakat kompleks ‘ahli kebudayaan’ tidak cukup seseorang, karena jumlah pranata semakin banyak (Koentjaraningrat 2009,159).

4. Pelindungan Melalui Pengembangan *E-Consultation* Situs BKKD

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, pelindungan sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan, dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Tahap publikasi menjadi tahapan yang paling terakhir, yang mampu merangkul tahapan-tahapan sebelumnya. Begitu juga pengembangan media laman internet yang fokus pada *E-Consultation* Kawasan Situs BKKD, sebagai tahap terakhir upaya pelindungan. Berbagai manfaat bisa diperoleh instansi pemerintah bidang penelitian kebudayaan dengan memiliki laman sendiri, yaitu : 1. Sebagai media menginformasikan profil masing-masing instansi agar semakin dikenal secara global, 2. Sebagai media untuk saling berbagai data / berita penelitian antar instansi maupun masing-masing instansi dengan pihak luar (eksternal) melalui surat elektronik (e-mail), 3. Sebagai media untuk mengembangkan database berbagai data-data penelitian berskala nasional untuk selalu bersama-sama diperbaharui menggunakan forum resmi dengan instansi pemerintah lainnya, peneliti, dan masyarakat / LSM.

Gagasan publikasi pesan terkait pelindungan objek pemajuan kebudayaan Kawasan Situs BKKD melalui laman internet *E-Consultation* Kawasan Situs BKKD, bukan sebuah kegiatan yang mustahil pada masa terkini, namun memang butuh banyak tantangan mewujudkannya. Andriaty mengatakan kalau peneliti belum sepenuhnya menggunakan jurnal elektronis untuk mendukung kegiatan penelitiannya. Kondisi ini antara lain disebabkan: (1) sulitnya mengubah kebiasaan membaca jurnal tercetak menjadi jurnal elektronis karena membaca melalui layar komputer mungkin kurang nyaman, dan (2) tidak tersedianya fasilitas akses internet cepat yang memadai untuk menelusur informasi elektronis. Hal ini akan berpengaruh pada kemutakhiran informasi yang

digunakan/disitir (Andriaty, 2005 : 28). Masalah pada peneliti tersebut juga ditemukan pada publik / komunitas yang nantinya akan menerima informasi tersebut dan meresponnya. Perlu solusi nyata dari pemerintah untuk kedua masalah tersebut. Ririmase dalam tulisannya, mengatakan kalau sebagai fasilitator pemerintah, institusi arkeologi harus mampu berperan sebagai mediator untuk menjawab tantangan tersebut, dengan mengembangkan strategi kreatif mengakomodasikan aspek sosial dalam pemanfaatan sumber daya budaya (Ririmase, 2008 : 41).

Pengembangan *E-Consultation* dapat dikatakan sebuah strategi kreatif upaya perlindungan objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD. Apabila terlaksana, maka berbagai pokok pikiran kebudayaan akan diperoleh secara lebih dalam. Pokok pikiran kebudayaan daerah menunjukkan kalau setiap pemerintahan daerah wajib merumuskannya masing-masing. Dalam penyusunan, para pegiat budaya dan pemangku kepentingan lain dapat dilibatkan. Bahkan pemerintah sudah seharusnya membuat forum agar semua data terkait pokok pikiran kebudayaan terkumpul secara terpadu. Bahkan para pegiat budaya diapresiasi secara baik sesuai amanat UU RI Nomor 5 Tahun 2017 (bahkan bila sebelumnya telah diapresiasi melalui UU RI No. 11 Tahun 2010). Maka dengan adanya apresiasi kepada masyarakat pegiat budaya, akan semakin memudahkan dalam menciptakan strategi kebudayaan terhadap kawasan cagar budaya Situs BKKD.

Konflik kepentingan akan membentuk satu pola perilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Pola perilaku orang-orang dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik (Wirawan 2010, 134). Maka perlu memiliki manajemen konflik dengan stakeholder pemerintah yang mengurus bidang keuangan negara. Ada juga konflik penyiapan database pokok pikiran

pemajuan kebudayaan kawasan cagar budaya Situs BKKD, yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Terpadu karena dimiliki kementerian, lembaga, perguruan tinggi dan pusat data kebudayaan lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin menggadeng korporasi yang lebih besar. UU Pemajuan Kebudayaan pula mengatur industri besar dan/atau pihak asing yang akan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan bagi kepentingan komersial. Karena itu, wajib memiliki izin dengan memenuhi persyaratan berdasarkan regulasi turunan UU pemajuan kebudayaan. Yang terpenting memiliki persetujuan atas dasar informasi awal, adanya pembagian manfaat, dan pencantuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan.

Sepuluh objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2017, sepertinya masih menyisahkan masalah definisi “budaya” dan “kebudayaan” yang pemaknaannya dirasakan masih sering membingungkan. Marzali dalam tulisannya mengusulkan penggunaan istilah “kultur” untuk mengganti keduanya, yang berarti bahwa kultur secara umum adalah daya dari unsur-unsur intelektual, emosional, dan spiritual suatu kelompok sosial yang memberi ciri-ciri khas kepada kelompok tersebut (Marzali, 2014 : 262). Namun kesepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut, sejauh ini sudah mewakili unsur-unsur intelektual, emosional, dan spiritual suatu kelompok sosial. Menurut Ramly dalam tulisannya mengatakan : peran dinas kebudayaan harus sebanding dengan semangat para budayawan dan seniman rakyat lainnya yang terus hadir menghidupkan dan mengembangkannya sejak lama tanpa kehadiran negara. Dinas kebudayaan berkewajiban membuat rencana strategis pemajuan kebudayaan yang memperkuat akar kebudayaan berbasis temuan-temuan potensi, dan permasalahan kesenian dan kebudayaan di masyarakat setempat (Ramly, 2017).

Pasca berlakunya UU pemajuan kebudayaan, penyusunan strategi kebudayaan idealnya semakin meningkatkan peran lembaga masyarakat lokal. Tugas dan fungsi institusi pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Azansyah mengatakan, ada empat hal yang dapat dijadikan panduan membangun lembaga masyarakat yang efektif. Pertama melengkapi lembaga yang ada. Kedua melakukan inovasi mengidentifikasi lembaga yang sudah ada. Perlu eksperimen melihat lembaga mana yang paling efektif untuk kondisi masyarakat tertentu. Ketiga menghubungkannya melalui penyaluran informasi yang terbuka kepada pengguna lembaga tersebut. Keempat, mendorong persaingan antar yuridiksi agar lembaga tersebut sukses berlomba maju demi menciptakan permintaan untuk lembaga tersebut (Azansyah, 2013 : 277-278). Adapun upaya mengotimalkan peran lembaga lokal dapat dilakukan melalui tahapan - tahapan : (1) pengukuhan kelembagaan, (2) penumbuhan kepercayaan publik, (3) pengembangan kegiatan, (4) penumbuhan jejaring sosial, dan (5) kemandirian. (Sulili.dkk, 2013 : 88-89). Adapun menurut Iqbal secara garis besar ada tiga tipe kegiatan lembaga masyarakat di Indonesia : 1. Melakukan kegiatan yang sama dengan program pemerintah, namun didanai secara swadaya dan fungsinya terkesan sebagai oposisi pemerintah, 2. Berperan sebagai mitra pemerintah yang didanai secara swadaya (tidak oposisi), 3. Berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, maka didanai oleh pemerintah (Iqbal, 2008 : 32).

Efektifitas ataupun optimalitas sebuah kelembagaan masyarakat tentu dapat dinilai secara objektif. Dalam sebuah wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan cagar budaya Situs BKKD, peran kelembagaan yang ada pada mereka sulit berbuat banyak, karena terkesan kurang diakui (legalitas belum ada). Ada kekhawatiran, pemerintah bisa saja membuat lembaga perpanjangan tangan

yang bukan berasal dari mereka. Pemerintah seharusnya bisa menggandeng komunitas dalam upaya pelindungan objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD. Andriyani dalam tulisannya mengatakan, untuk memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Kegiatan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga budaya dan adat istiadat dengan adanya pariwisata harus terus-menerus dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan pengkapasitasan dalam hal ini melalui bimbingan teknis pemberdayaan dalam hal ini kegiatan promosi, bekerjasama dengan agen travel baik dalam maupun luar negeri (Andriyani dkk, 2017 : 16).

Topik seputar kegiatan promosi juga bisa menjadi bagian dari diskusi E-Consultation. Misalkan Kawasan Situs BKKD dijadikan sebagai museum terbuka untuk menarik wisatawan melalui dukungan agen travel. Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui museum terbuka meliputi: penataan kawasan zona pengembang atau penyangga pada Situs BKKD. Rahardjo dalam bukunya mengatakan sudah sejak lama fungsi museum berubah, karena konteks sosial berubah. Banyak pengunjung museum bukan satu-satunya indikator keberhasilan, bahkan bukan indikator utama. Keberhasilan museum ditentukan oleh tercapainya visi dan misi yang dirancangnya (Rahardjo, 2011 : 182-183). Visi dan misi dalam hal ini pastinya terkait upaya pelindungan objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD. Misalkan penggunaan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk tujuan komersial, para pengguna dapat membuat perjanjian pembagian manfaat terhadap penggunaan pengetahuan tradisional tersebut dengan pihak terkait. Akan tetapi

pelaksanaan perjanjian pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah dengan lembaga masyarakat yang ditunjuk.

catatan semua stageholder berkomitmen terlibat dalam tahapan E-Consultation tersebut. Namun sepuluh Objek Pemajuan



Gambar 2. Konsep perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD melalui pengembangan *E-Consultation*

C. PENUTUP

UU Pemajuan Kebudayaan merupakan sebuah momentum memajukan kawasan cagar budaya Situs BKKD melalui pemajuan objek - objek kebudayaan pada kawasannya. Dengan kerjasama antar institusi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat mensinergikan UU Pemajuan Kebudayaan dengan UU Cagar Budaya. Sinergitas terjadi setelah adanya penentuan rencana kebijakan, startegi pelaksanaan, dan selalu melakukan monitoring. Dengan mengangkat penawaran konsep pengembangan *E-Consultation* pada tahapan perlindungan (sub bagian publikasi), diyakini akan sangat membantu dalam upaya pemajuan kebudayaan. Stageholder akan terarah untuk ambil bagian sejak dari tahapan ini (sesudah dilakukan *E-Consultation*).

Pelindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD dapat dilakukan melalui pengembangan *E-Consultation*, dengan

Kebudayaan masih dianggap rancu ketika objek - objek tersebut identik dengan peralatan (artefaktual), yaitu : manuskrip, dan segala peralatan yang berhubungan adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Maka disarankan untuk menghasilkan turunan payung hukum yang lebih dalam membedakannya.

DAFTAR SUMBER

- Andriaty, Etty. 2005. Pemanfaatan Jurnal Elektronik dan Kemutakhiran Informasi yang Distir Dalam Publikasi Primer. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Jalan Ir. H. Juanda No. 20, Bogor 16122. Jurnal *Perpustakaan Pertanian* Vol. 14 (2), . Hal. 25-31.
- Akuntono, I. 2015. *Ini 10 Daerah dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik*, diunduh dari : <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/15/13452021/Ini.10.Daerah.dengan.Keterbukaan.Informasi.Publik.Terbai k/>, pada 26 February 2018.
- Atsar. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi*

- Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Law Reform Volume 13* (2) : 284-299. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Azansyah. 2013. Peran Kelembagaan Dalam Perekonomian, Kondisi Pembangunan Kelembagaan Di Indonesia, Dan Membangun Lembaga Yang Efektif. *Jurnal EKBISI, Vol. VII*. (2). Hal. 262 – 279.
- Andriyani dkk. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 23* (1) : 1-16. UGM : Yogyakarta.
- Damanik, M Pandapotan. (2016). Kerangka Kerja Pengembangan Konsultasi Publik Elektronik Di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, BBPPKI Medan*, 5 (2) 81 – 92.
- Eppang. 2017. *Kemendikbud fokus 10 objek pemajuan kebudayaan*, diunduh dari laman : <http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/83238/kemendikbud.fokus.10.objek.pemajuan.kebudayaan>, pada tanggal 21 juni 2018.
- Handoko, Wuri. 2008. ARKEOLOGI KOMUNITAS : Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Penelitian Arkeologi di Indonesia (Sebuah Pendekatan untuk Wilayah Penelitian di Maluku). *Jurnal Kapata Arkeologi Vol. 4*. (7). Hal. 23 – 36.
- Iqbal, M. 2008. Konstelasi Institusi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Program PIDRA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.9*. (1). Hal. 28 - 45.
- Koentjraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi - Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kurnia, Novi. 2005. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi. *Jurnal MEDIATOR*, Vol. 6 No.2 Desember 2005. Hal. 291 – 296.
- Marzali, Amri. 2014. Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. *Jurnal Humaniora*. Vol. 26. (3). Hal. 251 – 265.
- Merriman, Nick. 2004. Introduction : Diversity and Dissonance in Public Archaeology. In Nick Merriman (ed.). *Public Archaeology*. 1-18. London: Routledge.
- Moleong, Leky J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Grafindo.
- Okamura & Matsuda. 2011. *New Perspectives in Global Public Archaeology*. Osaka : Springer.
- Rahardjo, Supratikno. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung.
- Ramly, Nadjamuddin. 2017. *Pemajuan Kebudayaan Berkemajuan*. Opini. Harian Kompas. 17 Februari 2017.
- Restiyadi, Andri. 2009. Identitas Budaya, kreativitas dan Kajian Arkeologi Publik. *Berkala Arkeologi Sangkhakala Vol XII No.23*. Hal. 1 – 7.
- Ririmasse, Marlon. 2008. Siklus Informasi Arkeologi : Menuju Pemasarakatan Hasil Penelitian yang Terintegrasi di Balai Arkeologi Ambon. *Jurnal Kapata Arkeologi Vol. 4* (7). Hal. 37 – 51.
- Seftiawan. 2018. *Setelah Menunggu 35 Tahun, RUU Kebudayaan Disahkan DPR*. Diunduh dari : <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2017/04/28/setelah-menunggu-35-tahun-ruu-kebudayaan-disahkan-dpr-400048>, pada tanggal 1 Juni 2018.

- Simatupang, dkk. 2017. Ekskavasi dan Kajian Manajemen Arkeologi Situs Bukit Kerang Kawal Darat di Kabupaten Bintan, Prov. Kepulauan Riau. *BPA. No. 32*. Medan: Balai Arkeologi Sumatera Utara.
- Siddiq. 2018. Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia : Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48 (1). Hal. 164-180.
- Sulili dkk. 2013. Peran Kelembagaan Lokal Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Studi Kasus Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Makassar. *Jurnal Sosiologi SOCIUS* Departemen Sosiologi FISIP UNHAS Volume 12. (1). Hal. 72-89.
- Surbakti, K. 2017. Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 (Perihal Pemberian Insentif dan Kompensasi)". *Jurnal Kapata* Vol. 13 (2). Hal. 141 – 150.
- Susanto. 2018. Hasil Kongres Kebudayaan yang Diserahkan ke Jokowi, diunduh dari laman : <https://nasional.tempo.co/read/1153802/tentang-hasil-kongres-kebudayaan-yang-diserahkan-ke-jokowi>, pada tanggal 10 Desember 2018.
- Tomy Michael. 2018. Law Enforcement Through ‘Ludruk’ And Cultural Advancement Asia Pasific Fraud. *Journal* Volume 3 (1). Hal. 125-131.
- UU RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Wirawan.2010. *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Zulkifli & Azhari. 2018. Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina: Journal of Law*, 1 (1) April 2018. Hal. 56-58.

HUBUNGAN KUANTAN DENGAN KERAJAAN INDRAGIRI DAN MINANGKABAU PADA MASA KOLONIAL BELANDA (1905 -1942)

RELATIONSHIP BETWEEN KUANTAN AND INDRAGIRI AND MINANGKABAU KINGDOM DURING DUTCH COLONIALIZATION (1905 – 1942)

Indriani

SMAN 1 Singingi

smansasimulem@gmail.com

ABSTRACT

This research was made to: first, finding Kuantan demography and geographic condition during Dutch colonialization. Second, finding the relationship between Kuantan and Indragiri and Minangkabau kingdom. Third finding the consequences of said relationship. The temporal scope of this research is the timeline of Dutch Colonialization (1905 – 1942), while the spatial scope is Kuantan district and its capital city, Taluk or widely known as Taluk Kuantan. The method used in this research is library research. Rantau Kuantan is a migration destination area for Minangkabau's people and this migration happened from time to time. The relationship between Kuantan and Minangkabau can be seen on the indigenous government of Rantau Kuantan and on Kuantan's oral tradition. The relationship between Kuantan and Indragiri can be seen on the title "Orang Kayo", which is given by Sultan Indragiri to the head of Koto Lubuk Ramo Federation III. In the relationship between Kuantan, Indragiri and Minangkabau is found on the saying "Bertuan ke Minangkabau, Beraja ke Indragiri, Berdatuk ke Datuk Bendahara".

Keywords: *Kuantan, Minangkabau, Indragiri, indigenous government, oral tradition*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: pertama, keadaan geografis dan demografis Kuantan pada masa Kolonial Belanda, kedua, hubungan antara daerah Kuantan dengan Kerajaan Indragiri dan Minangkabau, ketiga, pengaruh dari hubungan Kuantan dengan Kerajaan Indragiri dan Minangkabau. Ruang lingkup temporal tulisan ini difokuskan pada masa kolonial Belanda (tahun 1905-1942), sedangkan ruang lingkup spasialnya mengambil wilayah distrik Kuantan secara umum dengan ibukotanya Taluk, yang lebih populer disebut Taluk Kuantan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka. Rantau Kuantan adalah daerah perantauan orang-orang dari Minangkabau, migrasi ini sudah berlangsung dari masa ke masa. Hubungan antara Kuantan dengan Minangkabau terlihat dalam bentuk pemerintahan adat Rantau Kuantan dan dalam tradisi lisan Kuantan. Hubungan Rantau Kuantan dengan Indragiri terlihat dari gelar "Orang Kayo" yang diberikan Sultan Indragiri kepada kepala Federasi III Koto Lubuk Ramo. Hubungan antara Kuantan dengan Indragiri dan Minangkabau dinyatakan dengan istilah "Bertuan ke Minangkabau, Beraja ke Indragiri, Berdatuk ke Datuk Bendahara".

Kata kunci: *Kuantan, Minangkabau, Indragiri, pemerintahan adat, tradisi lisan.*

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 12 Oktober 1999 daerah-daerah Kuantan dan Singingi menjadi sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Taluk Kuantan, dengan luas wilayah 7.656,03 km². Berdasarkan Perda No. 16 tahun 2002 Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai 12 kecamatan definitif yaitu: 1. Kuantan Mudik 2. Hulu Kuantan 3. Gunung Toar 4. Kuantan tengah 5. Benai 6. Kuantan Hilir 7. Pangean 8. Logas Tanah Darat 9. Cerenti 10. Inuman 11. Singingi 12. Singingi Hilir, dengan 10 kelurahan dan 190 desa definitif (BAPPEDA dan BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2007: 14-18).¹ Sejak saat itu secara administratif pemerintahan, daerah Kuantan berpisah dari pemerintahan Indragiri. Kabupaten Kuantan Singingi berada di bagian selatan Propinsi Riau dan terletak pada jalur tengah lintas Sumatera. Pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi berada di Taluk Kuantan, berada pada posisi yang cukup strategis yakni berada pada posisi silang yang menghubungkan Propinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan menghubungkan ibu kota Propinsi Riau Pekanbaru dengan Sumatera Barat serta Kabupaten Indragiri Hulu.

Sungai Kuantan dan sungai Indragiri adalah dua nama untuk satu aliran sungai. Batang Kuantan (Sungai Kuantan) adalah nama sungai pada bagian hulu yang melintasi daerah-daerah Kuantan, dan ketika memasuki wilayah Indragiri sungai ini bernama Sungai Indragiri. Daerah Kuantan/Rantau Kuantan merupakan nama bagi daerah-daerah yang berada di sepanjang tepi Sungai Kuantan (Batang Kuantan).

Kuantan atau Rantau Kuantan adalah daerah perantauan orang-orang dari Minangkabau. Dalam kehidupan sehari-hari, adat istiadat serta bahasa Minangkabau digunakan oleh masyarakat Kuantan

Singingi. Ada kemiripan tradisi masyarakat Kuantan dengan adat Minangkabau misalnya dalam pemerintahan adat, hidup bersuku-suku dan berpenghulu, seperti halnya masyarakat di Sumatera Barat.

Kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat Kuantan terutama kaum muda, mereka tidak menerima bahwa adat istiadat masyarakat Kuantan mempunyai hubungan dengan adat istiadat Minangkabau. Mengapa hal ini terjadi? Tidak dapat dipungkiri pada saat ini bahwa yang berkecimpung dan mengkaji masalah-masalah adat istiadat dalam masyarakat hanyalah kaum tua. Kaum muda tidak dibawa ikut serta dan juga tidak tertarik terhadap masalah adat istiadat. Padahal adat istiadat yang terdapat pada suatu daerah bukanlah muncul sesaat, tapi lahir, berproses dan berkembang dalam kurun waktu yang panjang dari generasi ke generasi. Karena itulah penulis ingin melihat bagaimana hubungan yang terjadi antara daerah Kuantan dengan Minangkabau dan Indragiri pada masa lalu sehingga terciptanya adat istiadat masyarakat Kuantan pada saat ini. Hubungan Kuantan dengan Indragiri tidak dapat dipisahkan, karena baru pada tanggal 12 Oktober 1999 daerah ini menjadi sebuah wilayah pemerintahan administratif Kabupaten Kuantan Singingi.

Tulisan ini berjudul “Hubungan Kuantan Dengan Kerajaan Indragiri Dan Minangkabau Pada Masa Kolonial Belanda (1905 -1942)”. Pada tahun 1905 pemerintah Kolonial Belanda mulai berkuasa di wilayah administratif Distrik Kuantan. Tahun 1942 berkuasa pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia, sekaligus berakhirnya pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di daerah Kuantan terdapat sumber-sumber tertulis tentang daerah ini, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penelitian (metode penelitian pustaka). Sumber-sumber tertulis tentang Distrik Kuantan yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia seperti: 1) Stuurman, A. *Memorie van Overgave*

¹ Kecamatan nomor 1 sampai dengan nomor 10 termasuk dalam *Districten Kuantan* atau *onderafdeeling Kuantan* pada masa kolonial Belanda.

Betreffende de Afdeeling Indragiri 2 Mei 1932. 2) *Ontheffing zelfbest: van hoeboek Djambi van zijn waardigheid en tijdelijke opdracht van het bestuur over dat Landschap a/d Controleur der Kwantandistricten*. 3) *A. Grondgeland, 1910. Mededeelingen Betreffende De Kwantan Districten, Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie zevende volgrees-negende deel*. Sedangkan karya Tsuyoshi Kato, 1997 “*The localization of Kuantan in Indonesia; From Minangkabau Frontier to a Riau Administrative District*”, membahas tentang Kuantan sebagai daerah rantau Minangkabau yang dihubungkan oleh sungai-sungai yang ada di provinsi Riau dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Kuantan.

Letak geografis Kuantan yang strategis diantara Minangkabau dan Indragiri dengan sarana penghubungnya yaitu sungai Kuantan/Indragiri sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik, ekonomi, social dan budaya masyarakat Kuantan. Pengaruh dari hubungan tersebut terlihat dalam komposisi penduduk Kuantan, pemerintahan adat Rantau Kuantan, bahkan dalam tradisi lisan asal muasal daerah Kuantan.

B. HASIL DAN BAHASAN

1. Keadaan Geografis Dan Demografis Kuantan

Distrik Kuantan, *onderafdeeling* Indragiri Hulu dan *onderafdeeling* Indragiri Hilir adalah bagian dari *Afdeeling* Indragiri. Selain dinamakan Distrik Kuantan, orang Melayu juga menyebutnya dengan Rantau Kuantan (ANRI, BB 245:22). Rantau Kuantan dikenal dengan sebutan “*Rantau Nan Kurang Oso Duo Pulau*” artinya negeri tempat perantauan yang mempunyai 19 koto (negeri) atau negeri yang terdiri dari dua puluh kurang satu koto. Daerah Kuantan ini berbatas di hulu (barat) dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah hilir (timur) dengan desa Batu Sawa, sebelah selatan berbatas dengan Provinsi Jambi dan

sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Kampar (Rahim, 1985: 281).

Pada masa kolonial Belanda Sungai Kuantan merupakan sarana perhubungan utama antara Sumatra's Westkust dengan pantai timur Sumatera dengan melalui Taluk di Kuantan dan Rengat di Indragiri Hulu. Antara Taluk dan Rengat terdapat pelayaran rutin yang dilayani tiga kapal motor setiap minggunya, kapal ini berfungsi untuk mengangkut karet dan hasil bumi lainnya. Aliran sungai Indragiri-Kuantan memiliki tikungan yang tajam dan berkelok-kelok terutama ketika sudah memasuki daerah Kuantan. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah Belanda melakukan penggalian dan pemotongan di tikungan sungai, terutama di daerah hilir (Ligtvoet, 1909: 70).

Selain berfungsi ekonomi yaitu sebagai sarana transportasi, sungai Kuantan selalu mengangkut lumpur dan pasir yang terbawa arus sehingga menjadikan daerah di sepanjang tepi sungai menjadi subur. Keberadaan hutan lebat, memiliki berbagai jenis kayu dan rotan, suburnya tanaman karet dan sebagainya tidak terlepas dari pasokan air tersebut. Salah satu jenis kayu yang terkenal adalah kayu gaharu yang tumbuh di dalam hutan di sepanjang aliran sungai. Selain itu, sejak masa lalu daerah sepanjang sungai Kuantan sudah terkenal mengandung banyak emas. Sungai Kuantan/Indragiri merupakan sungai yang sangat penting sebagai sumber daya ekonomi bagi daerah Kuantan/Indragiri, juga terhadap daerah sekitarnya. Bahkan Dobbin menyebutkan bahwa sungai Kuantan/Indragiri bersama dengan sungai Siak dan Kampar menjadi kunci bagi kemajuan ekonomi daerah Dataran Tinggi Minangkabau. (Juwono, 2006: 38).

Dalam laporan K.J.A Ligtvoet seorang kepala Jawatan Kereta Api di Sumatera Tengah ketika melakukan survei di daerah-daerah di sepanjang sungai-sungai besar di Sumatera Tengah pada tahun 1909 memperkirakan jumlah penduduk Indragiri Hulu dan Distrik Kuantan seluruhnya 48.200 jiwa. J.A.

Ligvoet tidak mengambil data dari seluruh daerah pada 2 (dua) *onderafdeeling* ini, tetapi hanya 7 (tujuh) daerah dari Indragiri Hulu dan 8 (delapan) daerah dari Distrik Kuantan. Hal ini berdasarkan daerah-daerah yang direncanakan akan dilalui oleh jalan kereta api tersebut (Ligtvoet, 1909: 11).

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui jumlah penduduk Kuantan (dari nomor 8 sampai dengan 17) adalah 30.100 jiwa, dengan jumlah penduduk Kuantan terbanyak terdapat di Baserah yaitu 5.000 orang, sedangkan di ibu kota Distrik Kuantan yaitu Taluk hanya 3.600 jiwa, yang paling sedikit adalah di Simandolak (1.600 jiwa). Ada kesamaan dengan jumlah penduduk Indragiri Hulu yang terbanyak adalah di Kelayang sebanyak 5.000 jiwa, bukan di ibu kota *afdeelingnya* Rengat. Bahkan jumlah penduduk Taluk jauh lebih banyak daripada Rengat. Secara keseluruhan ternyata jumlah penduduk Kuantan pada tahun 1909 lebih banyak daripada penduduk Indragiri Hulu.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Indragiri Hulu dan Kuantan Tahun 1909

No.	Nama Daerah	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Rengat	2.400
2.	Japura	1.000
3.	Morong	1.400
4.	Kelayang	5.000
5.	Kota Baru	2.000
6.	Peranap	3.500
7.	Batu Rijal	2.800
8.	Cerenti	3.200
9.	Inuman	2.500
10.	Baserah	5.000
11.	Pangean	3.400
12.	Simandolak	1.600
13.	Sentajo	3.000
14.	Taluk	3.600
15.	Gunung	2.500
16.	Lubuk Jambi	3.500
17.	Lubuk Ambacang	1.800
	Jumlah	48.200

Sumber: Ligtvoet, K.J.A., *Rapport Betreffende Een Onderzoek Naar In Te Voeren Stoomvaartdiensten Op Rivieren In Midden-Sumatra*, (Batavia: Landsdrukkerij, 1909)

Sedangkan untuk melihat kekuatan penduduk Kuantan berdasarkan jumlah penduduk laki-laki yang bekerja (angkatan kerja) pada tahun 1910 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Laki-Laki di Distrik Kuantan Pada Usia Angkatan Kerja Tahun 1910

No.	Nama Distrik	Penduduk Laki-Laki Yang Bekerja
1.	IV Koto di Hilir	3.571 jiwa
2.	V Koto di Tengah	1.721 jiwa
3.	V Koto Lubuk Jambi	1.701 jiwa
4.	IV Koto Lubuk Ambacang	252 jiwa
5.	Lubuk Ramo	196 jiwa
6.	Tanah Darat	397 jiwa
	Jumlah	7.838 jiwa

Sumber: Grondgeland, "Mededeelingen Betreffende De Kwantan Districten", dalam *Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie zevende volgreeds-negende deel*, ('S Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1910), hal. 127

Tabel di atas dapat menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja di Distrik Kuantan adalah 7.838 jiwa dengan jumlah angkatan kerja paling banyak terdapat di IV Koto di Hilir yaitu sebanyak 3.571 jiwa dan yang paling sedikit terdapat di Lubuk Ramo 196 jiwa, sedangkan total jumlah penduduk ditaksir sebanyak $\pm$ 30.000 jiwa (Grondgeland, 1910:127).

Besar atau kecilnya jumlah angkatan kerja pada suatu daerah berkaitan erat dengan keadaan lapangan kerja di daerah tersebut. Dari 2 (dua) tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Kuantan selalu terjadi

peningkatan yang cukup besar. Hal ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dan situasi politik yang cukup aman di daerah ini.

Pada akhir tahun 1915 menurut *Deli Courant* tanggal 5 April 1916 menunjukkan bahwa penduduk *Afdeeling* Indragiri (terdiri dari *Onder Afdeeling* Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Distrik Kuantan) dengan luas wilayah 25.000 km persegi, maka kepadatan penduduk Indragiri adalah 1,6 jiwa per km persegi, jumlah ini adalah yang paling sedikit di Sumatera. Jumlah penduduk paling banyak di Sumatera adalah di *Sumatra's Westkust* dengan jumlah 1.221.200 jiwa dengan kepadatan penduduk 30 jiwa per km persegi, sedangkan wilayah yang paling luas adalah *Sumatra's Oostkust* yaitu 91.800 km persegi. Penduduk pribumi terbanyak juga terdapat di *Sumatra's Westkust* yaitu 1.210.000 jiwa, sedangkan penduduk dari suku bangsa Cina paling banyak terdapat di *Sumatra's Oostkust* sebanyak 132.000 jiwa dan bangsa Eropa 5.200 jiwa (Lekkerkerker, 1916: 339).

Berdasarkan penghitungan penduduk bulan Desember 1917 Kuantan mempunyai penduduk 34.000 jiwa (ANRI, R28/10/18 BB 1097). Dari jumlah penduduk *afdeeling* Indragiri 111.218 jiwa, sebanyak 2.266 jiwa adalah merupakan suku bangsa Cina. Dari jumlah penduduk ini juga dapat diperkirakan bahwa kepadatan penduduk Indragiri 5 jiwa per kilometer persegi (Slotemaker, 1926: 2). Bandingkan dengan kepadatan penduduk Indragiri masa sebelumnya yang hanya 1,6 jiwa per kilometer persegi, maka terjadi pertambahan penduduk yang sangat besar di Indragiri secara umum. Dapat disimpulkan bahwa dalam waktu dari tahun 1915 sampai 1920 telah terjadi migrasi besar penduduk dari luar Indragiri ke Indragiri, termasuk juga di distrik Kuantan.

Tabel 3.

Jumlah Penduduk *Afdeeling* Indragiri Tahun 1920

No.	Onder Afdeeling	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Indragiri Hilir	39.441 jiwa
2.	Indragiri Hulu	34.387 jiwa
3.	Distrik Kuantan	37.390 jiwa
	Jumlah	111.218 jiwa

Sumber: Slotemaker, C.G., *De Bevolkingsrubbercultuur in Nederlandsch-Indie VI. Riouw en Onderhoorigheden, Oostkust van Sumatra en Atjeh en Onderhoorigheden*, (Wetevreden: Landsdrukkerij, 1926), hlm. 2

Menurut hasil sensus tahun 1930 komposisi penduduk Taluk Kuantan adalah: penduduk pribumi 48.279 orang, 419 orang Cina, 21 orang Timur Asing dan 13 orang Eropa (Stuurman, 1932: 20). Penduduk pribumi terdiri dari etnis Melayu (Indragiri dan Minang) dan Jawa. Dari komposisi penduduk tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kuantan cukup heterogen. Dominannya jumlah penduduk suku bangsa Melayu yang berasal dari Minangkabau dan Indragiri di Kuantan pada masa itu menunjukkan sudah terjalin hubungan jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda ke daerah ini dengan kerajaan Minangkabau dan Indragiri.

2. Hubungan Kuantan dengan Minangkabau dan Indragiri

a. Hubungan Kuantan dengan Minangkabau

Kuantan menurut sudut pandang historis, adat dan etnologi termasuk dalam pengaruh Indragiri dan Minangkabau. Ada sebuah pernyataan yang sering didengar di daerah Kuantan tentang hubungan Kuantan dengan Minangkabau (Sumatera Barat) yaitu ungkapan "*rantau nan tigo jurai*" atau "yang terdepan dari 3 cabang": *jurai* atau cabang dari tiga sungai penting di Sumatera Tengah yang mengalir dari Bukit Barisan ke pantai timur, yaitu Sungai

Kampar, Sungai Kuantan-Indragiri dan Sungai Batanghari. Selama berabad-abad orang Minangkabau melakukan rute migrasi besar-besaran. Dalam prosesnya, beberapa daerah di tepi-tepi sungai, khususnya dekat batas timur Sumatera Barat, adalah tempat menetapnya migran Minangkabau kuno. Beberapa contoh adalah Kuantan di Kuantan-Indragiri, Lima Kota Bangkinang di Kampar Kanan, Pulau Punjung dan Sungai Dareh di Batanghari Hulu. *Rantau nan tigo jurai* berkembang sebagai tiga daerah besar terdepan Minangkabau di timur Bukit Barisan. Kuantan-Indragiri mempunyai sebuah ciri khusus diantara *rantau nan tigo jurai*, ini berhubungan dengan pembentukan pusat kerajaan Minangkabau Pagaruyung, Sumpur Kudus dan Buo yang dapat dilihat melalui lambang-lambanganya. Jadi, tidaklah mengherankan terdapat hubungan sangat penting antara Kuantan dengan Pagaruyung sebagai pusat kerajaan Minangkabau. (Kato, 1997: 741).

Daerah Kuantan merupakan rantau dari Kerajaan Pagaruyung (Minangkabau). Penduduk Kuantan sebagian juga berasal dari Minangkabau, waktu datang ke Rantau Kuantan untuk pertama kali mereka menetap di Inuman, tetapi kapan terjadinya dan bagaimana mereka menyebar dari Kerajaan Minangkabau, hal ini tidak dapat diketahui secara pasti. Ketika penduduk yang menetap di sepanjang Batang Kuantan jumlahnya semakin banyak dan daerah tersebut menjadi penting, raja-raja Minangkabau mulai mengatur pemerintahan, mereka mempersatukan daerah-daerah yang berisi sejumlah *koto* dan tempat-tempat kecil yang dipimpin oleh seorang dengan gelar Datuk sebagai wakil pemerintah (De Graaf, 1918: 498).

Negeri atau koto tertua yang ditempati oleh nenek moyang mereka yang merantau ke sini adalah Inuman. Sekali dalam dua atau tiga tahun raja Pagaruyung datang berkunjung ke daerah tersebut. Akan tetapi setelah kekuasaan raja Pagaruyung semakin lemah, apalagi setelah jatuhnya Pagaruyung di bawah kekuasaan Belanda

sesudah perang Padri, sering terjadi sengketa antara kesatuan yang satu dengan yang lainnya. Salah seorang keturunan raja Pagaruyung yang terakhir lari ke Kuantan dan atas kesepakatan datuk-datuk maka diangkatlah putera Sultan Muningsyah untuk menjadi raja di daerah ini. Sahnya pengangkatan sebagai sultan yaitu sesudah mengikuti upacara arak-arakan dari Seluka sampai ke Cerenti pada tahun 1883. Sejak itu baru diberi gelar Yang Dipertuan Putih Sultan Abdullah. Pada mulanya raja berkedudukan di Cerenti, kemudian baru pindah ke Basrah. Kerajaan inilah yang dikenal sebagai Kerajaan Kuantan (Rahim, 1985 :282).

Sebagai daerah rantau dari kerajaan Pagaruyung, maka sebagai tuan sekali dalam dua atau tiga tahun akan mengunjungi rantau untuk mengambil pajak. Sebagai wakil dari raja adalah "*lima urang gadang*", mereka disebut dengan "*Datuk Nan Balimo*", tugasnya mewakili Rantau Kuantan keluar wilayah (De Graaf, 1918:498). Mereka adalah kepala dari lembaga pemerintahan pribumi di Kuantan, juga setelah Kuantan berada di bawah kekuasaan Belanda ketika distrik Kuantan dipimpin seorang kontrolir.

Daerah Kuantan waktu berada di bawah pengaruh Minangkabau dijadikan beberapa federasi. Setiap federasi terdiri dari beberapa koto yang masing-masingnya merupakan daerah otonom sendiri. Setiap koto atau negeri mula-mula terdapat *seurang godang* yang fungsinya dapat memutuskan setiap masalah yang timbul dalam negeri (koto). Di Rantau Kuantan terdapat tiga federasi yang terdiri atas 13 negeri (koto) dan dipegang oleh *seurang godang*. Semenjak adanya federasi ini *urang godang* tiap koto tidak ada lagi. Federasi-federasi tersebut adalah:

- a. IV Koto di Atas meliputi negeri Sampurago, Lubuk Ambacang, Koto Tuo dan Sungai Pinang. Federasi ini dikepalai *urang godang* yang bergelar Datuk Patih

- dan berkedudukan di Lubuk Ambacang.
- b. V Koto di Tengah meliputi negeri-negeri Kari, Taluk, Simandolak, Siberakun dan Sibuyao.
 - c. IV Koto di Hilir meliputi negeri Pangean, Basrah, Inuman dan Cerenti. Federasi IV Koto di Hilir ini dikepalai Datuk Ketemanggungan selaku *urang godang* nya Rantau Nan Kurang Oso Dua Puluh, artinya di Rantau Kuantan terdapat 19 negeri (koto).
 - d. IV Koto di Mudik atau Empat Koto Gunung yang meliputi negeri Teluk Ingin, Toar, Gunung dan Lubuk Tarantang.
 - e. Gajah Tunggal yaitu negeri Lubuk Jambi
 - f. Padang Tarab yang terdapat di sebelah hulu Lubuk Ambacang, kemudian digantikan dengan Pantai Lubuk Ramo (De Graaf, 1918:499)

Intervensi Minangkabau ke Indragiri untuk menguasai Kuantan telah dapat dihancurkan oleh Datuk Denang Lelo, Datuk Jo Mangkuto dan Datuk Lelo Dirajo dari Peranap dan Baturijal. Untuk beberapa waktu, hasil lada hitam dari Minangkabau telah dapat dibawa ke Indragiri. Selanjutnya lada hitam itu diangkut ke Batu Sawar-Johor untuk diperdagangkan, karena Batu Sawar sudah menjadi pusat perdagangan yang besar di Johor (Yusuf, 1994: 61-64).

Masuknya orang Minangkabau secara besar-besaran pada tahun 1915-1920 di Kuantan berkaitan dengan kebutuhan akan tenaga kerja di perkebunan karet. Kebanyakan kedatangan mereka berasal dari daerah Tanah Datar dan berbagai daerah di sekitar Solok. Orang Minangkabau yang lain, sudah lebih dahulu bertempat tinggal di Kuantan tetapi jumlahnya sedikit dan mereka datang secara bertahap dalam masa yang panjang dari zaman ke zaman (Schwartz, 1893:149).

Penduduk rantau Kuantan yang berasal dari Minangkabau tersebut bercampur dengan orang-orang di daerah

Kuantan yang berbatas dengan Distrik Batanghari dan Indragiri Hulu. Tetapi daerah bagian timur rantau Kuantan yang berbatas dengan Indragiri juga mendapat pengaruh dari Johor baik dalam bidang pemerintahan maupun terhadap adat kebiasaan.

b. Hubungan Kuantan Dengan Kerajaan Indragiri

Hubungan Indragiri dengan Rantau Kuantan sangat dekat, bahkan pada masa Kuantan berada di bawah pengaruh Pagaruyung diserahkan tugas kepada Datuk Temenggung dan Yang Dipertuan Muda Indragiri menjadi orang tengah di Konfederasi Rantau Kuantan. Penyerahan tugas itu dengan maksud untuk menyelesaikan persengketaan antara *urang godang* di Kuantan. Datuk Temenggung dan Yang Dipertuan Muda Indragiri ditugaskan dengan syarat:

- a. Bila timbul pertikaian, maka Datuk Temenggung atas permintaan *urang godang balimo* di Rantau harus menyelesaikannya. Bila Datuk Temenggung tidak berhasil menyelesaikan, maka harus diserahkan kepada Yang Dipertuan Muda untuk diputuskan dan keputusan itu harus dipatuhi oleh semua yang bersangkutan.
- b. Yang Dipertuan Muda harus menunggu kedatangan Maharaja Pagaruyung di Cerenti dalam rangka perjalanannya ke Kuantan sekali tiga tahun. Yang Dipertuan Muda harus mempersembahkan piring, gelas, mangkuk, pinggan, payung dan sebagainya masing-masing berjumlah 100 buah.
- c. Orang Kuantan yang berada di Indragiri, langsung dibawah pengawasan dan tanggung jawab Datuk Temenggung dan Yang Dipertuan Muda Indragiri.
- d. Untuk menutup ongkos perjalanan dan persembahan itu, yang Dipertuan Muda diberi hak untuk memungut *Uang Kepala* sebesar

satu rial dari setiap orang Kuantan yang ke laut.

- e. Orang Kuantan tidak akan mengakui Datuk Temenggung dan Yang Dipertuan Muda Indragiri selama mereka tidak muncul di Inuman bagi Datuk Temenggung dan di Cerenti bagi yang Dipertuan Muda Indragiri, semenjak pengangkatannya.
- f. Yang Dipertuan Muda tidak dibenarkan menginjakkan kaki di Kuantan. Dia hanya diizinkan sampai batas Cerenti saja (Yusuf, 1994: 61-64)

Setelah Indragiri menjadi sebuah kerajaan, daerah Rantau Kuantan merupakan daerah penyanggah antara Kesultanan Indragiri dengan Minangkabau. Rantau Kuantan patuh kepada pemerintah Indragiri dan mengikuti adat istiadat Minangkabau. Di daerah yang merupakan daerah pengaruh Minangkabau diperintah oleh Datuk Patih dan Datuk Temenggung (Yusuf, 1994 :62-64).

Hubungan Rantau Kuantan dengan *landschap* Indragiri adalah sangat erat, Raja Pagaruyung, Raja Muda di Indragiri bersama-sama dengan Datuk Tumenggung segera ingin menyelesaikan masalah perbatasan Indragiri dengan Kuantan, karena banyak orang Indragiri yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung melakukan perjalanan ke Kuantan. Pengikat yang kuat terhadap Rantau Kuantan dengan Indragiri adalah dari III Koto Lubuk Ramo sampai ke Kerajaan Indragiri. Dimana kepala federasi ini diberi gelar “Orang Kaya”, jabatan ini harus disetujui oleh Sultan dari Indragiri. Hal tersebut dinyatakan dengan istilah “Bertuan ke Minangkabau, Beraja ke Indragiri, Berdatuk ke Datuk Bendahara”. Yang disebut terakhir adalah dari kerajaan Indragiri. Tali pengikat dengan Indragiri ini tampaknya lambat laun semakin lemah, tetapi pada tahun 1901 dibuat sebuah kontrak antara Kuantan dengan Indragiri yang berisi perjanjian untuk saling membantu dalam

ikatan politik dan melepaskan 1/3 dari pajak (Grondgeland, 1910:132).

3. Pengaruh Hubungan Kuantan dengan Minangkabau dan Indragiri

a. Kuantan Menurut Tradisi Lisan

Menurut tradisi lisan yang turun temurun dari cerita orang tua-tua daerah ini mengatakan bahwa nenek moyang penduduk rantau Kuantan dahulunya berasal dari daerah Minangkabau. Dari informasi itu dikatakan bahwa Raja Minangkabau dari Pagaruyung mengirim dua bangsawan ke Kuantan untuk membawa adat dan pesan ke daerah ini. Mereka adalah Datuk Ketemanggungan (Datuk Tumanggung) dan abang tirinya Datuk Perpatih Nan Sebatang (Datuk Perpatih). Mereka membuat sebuah rakit dari kayu kulim (*scorodocarpus borneensis*) untuk perjalanan. Walaupun rakit kulim tersebut tidak mengapung, untuk kedua bangsawan tersebut telah diberkati dengan kekuatan supernatural. Mereka dan pengikutnya memimpin rakit menghiliri sungai Kuantan-Indragiri dan pada waktunya menentukan daerah Kuantan sekarang. Dua bangsawan tersebut memasukkan beberapa daerah yang berasal dari hutan perawan dan yang belum termasuk ke dalam Kuantan, kemudian meletakkan dasar dari *Rantau Nan Kurang Oso Dua Puluh*. Akan tetapi sebagian sumber mengatakan bahwa sebelum datuk-datuk itu datang, di sepanjang sungai itu sudah ada beberapa negeri yang mempunyai penduduk cukup banyak (Kato, 1997:741)

Menurut tradisi lisan versi lain, rantau Kuantan dahulunya meliputi seluruh daerah aliran Batang Kuantan yaitu sejak pertemuan Batang Sinamar dengan Batang Ombilin di sebelah barat sampai ke laut di sebelah timur. Pembesar-pembesar Minangkabau dan pengiringnya yang mula-mula datang ke Rantau Kuantan menghilir dengan rakit kulim. Cerita tentang rakit kulim itu tidak hanya terdapat di rantau Kuantan saja yang setelah berdirinya

Kerajaan Indragiri hanya terdiri dari negeri-negeri sebelah hulu Batu Rijal sampai Lubuk Ambacang, tetapi juga terdapat di Kerajaan Indragiri. Hal ini menunjukkan bahwa rantau Kuantan dan Indragiri pada mulanya memang merupakan kesatuan, baik dalam bidang politik, maupun dalam adat dan kebudayaan.

Jika melihat keadaan Batang Kuantan antara Muaro Sijunjung dengan Lubuk Ambacang tidak memungkinkan orang untuk menghilirinya dengan sebuah rakit yang agak besar. Di sana-sini terdapat jeram-jeram yang sangat deras dan tepi-tepi sungai yang kebanyakan terdiri dari batu-batu kapur yang tinggi dan terjal, sedangkan di dalam sungai sendiri terdapat batu-batu yang besar dan bermunculan di atas permukaan air. Cerita tentang rakit kulim itu menjadi lambang perpindahan orang-orang Minangkabau ke Rantau Kuantan yaitu pada akhir abad ke-14. Pembesar-pembesar yang dibawanya menetap di sana, dan pengiring-pengiring mereka yang turut dalam rakit kulim itu dipandang sebagai orang yang memperkuat negeri, mencencang melatih di rantau Kuantan, serta keturunan mereka menjadi ahli waris yang syah atas ulayat sesuatu negeri.

Migrasi dari alam Minangkabau itu terjadi secara berangsur-angsur dalam masa berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin dalam masa berabad-abad, tetapi penduduk rantau Kuantan tidaklah semata-mata berasal dari Minangkabau itu saja. Sebelum kedatangan orang Minangkabau tersebut, Rantau Kuantan pun sudah mempunyai banyak penduduk, yang dalam bahasa dan adat istiadat tidak banyak berbeda dari orang-orang pindahan itu, sama-sama disebut orang Melayu. Penduduk asli Kuantan itu tidak ditaklukkan oleh orang-orang yang pindah itu, hak milik mereka atas tanah pun tidak diganggu dan ada beberapa negeri yang penduduknya semua atau sebagian besar terdiri dari penduduk asli. Menurut sejarah adat tentang pembentukan suatu negeri dalam rantau Kuantan, dapat disimpulkan bahwa tidak

ada satu negeri pun, yang penduduknya terdiri semata-mata dari orang pindah dari sebelah barat itu (Kato, 1997: 741-743).

Perpisahan antara rantau Kuantan dan Indragiri sudah terjadi karena timbulnya suatu negeri dekat kuala Batang Peranap yang penduduknya berasal dari Batang Hari, yaitu negeri Batu Rijal. Semua negeri di bagian hulu Batu Rijal itulah yang kemudian biasa disebut rantau Kuantan, sedangkan Batu Rijal sendiri termasuk dalam Kerajaan Indragiri. Menurut adat, negeri Batu Rijal disebut *tigo lorong*, karena negeri itu terletak di batas. Yang dimaksud dengan *tigo lorong* itu ialah tiga orang penghulu negeri yang masing-masing mempunyai kebesaran tersendiri, seorang sebagai kepala sembah untuk menghadapi Rantau Kuantan dan Pagaruyung, seorang menjadi kepala sembah dalam menghadapi Raja Indragiri dan seorang lagi sebagai kepala sembah pula bila berhubungan dengan Raja Padang Lawas (Batang Hari) (Sutan: 264-265).

Orang dari Minangkabau yang mendiami rantau Kuantan sebelah hulu Batu Rijal kemudian mendirikan sembilan belas negeri, oleh karena itu mereka menyebut daerah tersebut “*rantau nan kurang oso duo puluah*”. Menurut versi lain, timbulnya pertikaian paham antara Datuk Ketemanggungan dengan kedua orang datuk lainnya mengakibatkan Datuk Ketemanggungan meninggalkan Rantau Kuantan dan menghilir ke daerah yang kemudian disebut Indragiri, sejak itu Rantau Kuantan dibagi dua, yaitu:

- a. IX Koto di Mudik, sepuluh dengan Pantai Lubuk Ramo;
- b. IX Koto di Hilir, sepuluh dengan Pantai Lubuk Ramo.

IX Koto di Mudik dipimpin oleh Datuk Patih, dan IX Koto di Hilir termasuk dalam luhak Datuk Bendaro Lelo Budi. Terlihat Padang Tarab telah diganti dengan Pantai Lubuk Ramo yang sebenarnya tidak terletak di tepi Batang Kuantan, melainkan di tepi Batang Petai, yang menjadi hulu Batang Peranap. Sebenarnya pantai Lubuk Ramo merupakan satu federasi pula, terdiri

dari tiga negeri, Lubuk Ramo, Pantai dan Sungai Buluh. Kepala federasi itu bergelar Datuk Timbang Tail. Menurut orang Kuantan, Datuk Timbang Tail itu adalah yang tengah diantara Datuk Patih di IX Koto di Mudik dengan Datuk Bendaro Lelo Budi di IX Koto di Hilir. Itulah sebabnya, maka Pantai Lubuk Ramo yang dianggap sebagai satu negeri saja disebut dua kali, termasuk sebagai negeri kesepuluh dalam IX Koto di Hilir (Kato, 1997:743-744).

Antara Lubuk Jambi dengan Lubuk Ramo terdapat negeri Cengar, yang didirikan oleh orang Lubuk Jambi dan orang Lubuk Ramo, tetapi telah lama memenuhi syarat-syarat sebagai satu negeri. Oleh konfederasi Rantau Kuantan negeri itu dipandang sebagai "*bungo setangkai*" negeri Lubuk Jambi. Antara Taluk dengan Logas (Kampar Kiri) terdapat pula negeri Jake, yang dipandang sebagai "*bungo setangkai*" negeri Taluk dan Kari. Antara Taluk sebelah hulu dan Simandolak serta Siberakun sebelah hilir, terletak negeri-negeri Sentajo, Kopah dan Benai yang tersebut dalam bilangan federasi V Koto di Tengah, tetapi termasuk dalam lingkungan federasi itu, barangkali negeri-negeri ini pun adalah negeri-negeri yang telah ada sebelum rakit kulim itu hilir. Begitu juga Teratak Air Hitam, yang mulanya adalah satu banjar saja dari negeri Sentajo. Akhirnya Tanah Darek dekat Pangean dalam lingkungan federasi IV Koto di Hilir, yang tidak disebut dalam bilangan adat "*rantau nan kurang oso nan duo puluh*" dan lima teratak yang terletak dekat Lubuk Ambacang dan bertalian dengan IV Koto di Atas, yaitu Sumpu, Sungai Kandi, Serosa, Gunung Balai dan Rambahan. Itulah semua negeri yang berada dalam konfederasi Rantau Kuantan, 19 dalam bilangan, tetapi sebenarnya 30 atau lebih negeri yang masih didiami orang (Schwartz, 1893: 149).

Menurut versi yang lain, penduduk asli Taluk terdapat di Dusun Tuo, terdapat sebuah keluarga berjumlah sekitar 15 orang. kemudian masuk seorang ulama memberikan ajaran kebatinan dengan mengajar mengucapkan

"*bismillahirrahmanirrahim*" (masuk Islam). Ketika ulama tersebut pindah, harus pindah pula satu orang yang paling pintar, sehingga dicarilah ke seluruh negeri untuk dikirim belajar ke Mekkah. Sesampainya orang tersebut di Irak, pertama kali ia belajar mengaji, setelah usianya cukup ia dikhitan dan namanya diganti menjadi Haji Fawathi, setelah akil baligh barulah ia menuju ke tanah suci.

Pada usia 25 tahun ia kembali ke tanah air, terlebih dahulu ia singgah ke Palembang pada masa Kerajaan Sriwijaya, dari sana ia membawa gantang dengan tempat duduk sunat rasul, cupaknya ditinggal di Palembang. Ketika ia kembali ke Dusun Tuo dibuatlah sebuah mesjid kecil di Padang Mansalo (Bansalo) dan sampai akhir hayatnya ia tetap berada di sana. Istrinya yang berasal dari Palembang kemudian membawa serta keluarganya ke Taluk sehingga penduduk yang pertama berkembang di Kuantan adalah berasal dari Palembang. Selanjutnya dari Dusun Tuo penduduk pindah ke koto (dekat RSU lama), mulailah dibentuk penghulu untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dusun Tuo dan Kandang Tamiang masih ada ketika Belanda masuk ke daerah ini.

b. Pemerintahan Adat Rantau Kuantan

Kedudukan tertinggi dalam pemerintahan adat adalah sultan. Sebagai raja ia adalah penguasa tertinggi dibidang politik, adat, agama, ekonomi, budaya dan sebagainya. Kedudukan sebagai raja didapatkan karena keturunan. Tetapi tidak semua turunan raja dapat menjadi sultan. Kedudukan raja akan syah apabila sudah mendapat pengesahan menurut suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh adat, antara lain melalui upacara penobatan. Setelah raja dinobatkan ia mempunyai wewenang untuk memimpin secara resmi, namun wewenang raja di kerajaan Kuantan tidaklah penuh (bukan otokrasi). Dalam mengambil keputusan maupun melaksanakannya, sultan harus mendapat persetujuan lebih dulu dari majelis *Urang Godang*. *Urang Godang* di Kuantan tidak

berhak mencampuri urusan dalam *nagori* secara langsung, ia hanyalah sebagai badan pengawas terhadap daerah yang ada di bawah kekuasaannya. Jika sultan diresmikan dengan upacara penobatan, pemimpin-pemimpin adat lainnya diresmikan dengan upacara pengangkatan dan peresmian. Di bawah ini adalah struktur pemerintahan adat di Kerajaan Kuantan (Rahim, 1985: 284-285).

Untuk mengurus kepentingan bersama dengan negeri-negeri tetangga maka diadakan federasi-federasi. Mula-mula sekali di rantau Kuantan terdapat tiga federasi, yaitu:

- a. IV Koto di Atas, terdiri dari negeri-negeri Sumpurago, Lubuk Ambacang, Koto Tuo dan Sungai Pinang.
- b. V Koto di Tengah, terdiri dari negeri-negeri Kari, Taluk, Simandolak, Siberakun dan Sibwayo.
- c. IV Koto di Hilir yaitu Pangean, Basrah, Inuman dan Cerenti.

Federasi IV Koto di Atas dikepalai oleh seorang *urang godang* bergelar Datuk Patih berkedudukan di Lubuk Ambacang, federasi V Koto di Tengah dikepalai oleh Datuk Bandaro Lelo Budi yang bertempat di Kari, dan federasi IV Koto di Hilir dikepalai oleh Datuk Ketemanggungan yang bertempat di Inuman. Ketiga federasi ini mengadakan federasi lagi yaitu konfederasi rantau Kuantan atau "*rantau nan kurang oso duo puluoh*", karena selain 13 negeri yang tergabung dalam ketiga federasi tersebut, masih ada negeri-negeri lainnya yang turut dalam federasi itu. Empat negeri lagi yaitu Teluk Ingin, Gunung, Toar dan Lubuk Terentang yang membentuk satu federasi pula disebut IV Koto Gunung atau IV Koto di Mudik di bawah payung Datuk Bendaro. Tetapi kedudukan Datuk Bendaro kepala federasi IV Koto Gunung itu tidak sama dengan ketiga datuk tersebut, ia hanya dipandang sebagai wakil Datuk Bendaro Lelo Budi di Kari. Sebutan IV Koto di Mudik (sebelah Hulu) menyatakan perwaliannya dengan V

Koto di Tengah. Sebuah negeri lagi yaitu Lubuk Jambi disebut Gajah Tunggal, karena tidak memasuki sesuatu federasi, selain konfederasi Rantau Kuantan. Dengan demikian terdapat 18 negeri, satu lagi adalah negeri Padang Tarab yang sekarang termasuk dalam daerah Sumatera Barat. Menurut keterangan, negeri Padang Tarab termasuk dalam "*rantau nan kurang oso duo puluoh*" itu. Tetapi di Kuantan sendiri sekarang tidak pernah didengar Padang Tarab dalam bilangan yang sembilan belas itu, meskipun tidak mustahil bahwa zaman dahulu Padang Tarab termasuk dalam bilangan tersebut, karena letaknya memang di tepi batang Kuantan (Sutan: 267-268).

Dibentuknya sebuah koto adalah kesepakatan penduduk pendatang dengan penduduk asli untuk membentuk satu pemerintahan bersama dengan melakukan perundingan lebih dahulu. Ada pula *koto-koto* yang dibuat oleh penduduk kampung asli itu sendiri, baik atas anjuran pembesar-pembesar yang datang dari pusat Minangkabau, maupun atas inisiatif sendiri sesudah bermusyawarah lebih dahulu. Tanah untuk mendirikan *koto* itu dipilih tanah ketinggian yang diperkirakan tidak pernah kebanjiran. Rantau Kuantan hampir setiap tahun dalam musim penghujan mengalami banjir, tetapi tidak ada satu *koto* di Rantau Kuantan yang pernah kena banjir, meskipun hampir semua *koto* terletak di tepi batang Kuantan. Setiap *koto* dilingkungi dengan parit yang lebar dan dalam, biasanya pada tiga sisi, karena satu sisi biasanya berbatas dengan Batang Kuantan. Tanah *koto* adalah tanah tempat perumahan, di sanalah berdirinya *rumah-rumah godang* kepunyaan satu keluarga menurut adat, sedangkan tanah untuk perladangan, padang penggembalaan ternak dan pekandangan terletak di luar *koto*. Setelah negeri menjadi ramai, maka banyak orang yang membuat rumah dan berdiam di tanah perladangan masing-masing. Dengan demikian timbul *banjar-banjar*, semakin banyak penduduk suatu negeri, semakin banyak dan semakin ramai pula *banjarnya* (Sutan: 265-266).

Berhubung dalam satu negeri terdapat empat suku, maka tanah *koto* itupun dibagi empat, satu bagian untuk satu suku. Dalam setiap suku terdapat empat orang pemangku adat yaitu seorang penghulu kepala suku, seorang *monti*, seorang *dubalang* dan kemudian juga seorang pegawai agama. Dalam pemerintahan suatu negeri hanya penghulu yang patut berbicara, *monti*, *dubalang* dan pegawai agama hanya sebagai penasehat penghulu. Dalam rapat-rapat suku ketiga orang pegawai adat itu sama hak dan kekuasaannya dengan penghulu, karena masing-masing mewakili sebagian dari suku. Di *koto* terdapat balai penghulu atau balai adat yang merupakan tempat *penghulu nan berempat* bersidang, memutuskan perkara-perkara dan membicarakan soal-soal kepentingan negeri. Di *koto* juga terdapat sebuah mesjid, tempat orang melakukan sholat jum'at dan sholat hari raya. Mempunyai balai dan mesjid adalah syarat mutlak bagi suatu perkampungan untuk dipandang sebagai satu negeri. Di setiap *banjar* terdapat *balai tuo banjar*, tempat keempat *orang tuo banjar* bersidang memutuskan perkara-perkara kecil dan untuk membicarakan soal-soal kepentingan *banjar*. Seorang *tuo banjar* adalah wakil penghulu, tetapi tidak terhitung sebagai orang adat, artinya jabatannya tidak diwariskan menurut adat. Karena penghulu ada empat orang, maka dalam tiap *banjar* pun terdapat empat orang *tuo banjar*. Dalam mengangkat orang *tuo banjar*, penghulu harus berunding dengan ketiga orang pemangku adat tersebut diatas (Rahim, 1985: 267-268).

Setiap negeri merupakan satu daerah otonom kecil yang mempunyai wewenang '*gontiang memutuihkan, bebiang mencabiakkan*' artinya memutuskan setiap masalah yang timbul dalam negeri. Pada mulanya dalam tiap-tiap negeri terdapat seorang *urang godang* yang disebut *urang godang seorang sekoto*. Tetapi lama kelamaan *urang godang seorang sekoto* itu tergeser oleh semangat demokrasi, sehingga fungsinya tidak lebih dari orang tua

(penasehat) *penghulu nan berempat* dan akhirnya hilang sama sekali.

Sebagai sendi utama di desa-desa adalah *tua kampung* dan jika tidak berhasil menyelesaikan tugas akan dibantu oleh *monti* atau penghulu untuk menyelesaikan pelanggaran atau kejahatan sesuai dengan sifat dan dari besarnya tingkat perselisihan. Personil dari setiap suku akan melaksanakan tugas dan selanjutnya memutuskan perkara bersama dengan penghulu sukunya dan jika diperlukan juga dengan penghulu-penghulu dari suku lain. Pemasukan uang dari seluruh negeri diputuskan oleh penghulu-penghulu secara bersama dengan Datuk sebagai ketua. Sangat banyak tugas termasuk kejahatan yang paling berat yang harus diputuskan seluruhnya oleh penghulu atau penghulu bersama-sama kenalannya. Dalam menentukan batas-batas daerah adalah berdasarkan persetujuan dari jabatan yang lebih tinggi yaitu raja dari masing-masing daerah.

Penduduk Kuantan sebagian berasal dari Priangan Padang Panjang sehingga lembaga masyarakat terbentuk dari adat kemenakan (mengikuti anak perempuan). Hal ini merupakan bagian dari asal mula terbentuknya pemerintahan. Tapi seperti pada daerah lainnya dari Kerajaan Minangkabau, disini juga lambat laun terjadi perubahan dalam pemerintahan, dimana kehadiran dan kedudukan raja secara langsung kurang berpengaruh (Aanteekeningen Omtrent Midden Sumatra Aan Officiele Bescheiden Ontleend, 1880: 5).

Penduduk dibagi atas suku-suku, suku-suku ini hidup dalam keluarga-keluarga (seperut) dan keluarga (selutut); pada umumnya berdasarkan garis keturunan ibu. Perkawinan antara orang dari dalam suku sendiri dilarang, tetapi ketika anggota suku menjadi besar jumlahnya, hal ini kadang-kadang tidak dipertahankan secara kuat. Penduduk Distrik Kuantan menganut system *matriachaat (matrilineal)* yang diperoleh melalui keturunan ibu. Dalam pembagian

warisan, harta benda dibedakan atas harta pusaka dan harta pencarian, dalam harta pencaharian diambil melalui perolehan hasil pekerjaan laki-laki dan perempuan bersama-sama. Ketika seorang istri meninggal harta dibagi diantara anak laki-laki dan anak-anak dari saudara perempuan. Harta pencaharian dari laki-laki yang datang diberikan kepada anak dari saudara perempuan mereka. Banyaknya jumlah pembagian, sebagian dikeluarkan dari harta pusaka, untuk menghindari terpecahnya harta milik keluarga (Grondgeland, 1910:129).

Keseluruhan hukum “*tanggung-menanggung*” telah dibentuk di Kuantan. Hukuman yang diberikan hanya terdiri dari denda uang. Menganiaya dan menghilangkan salah satu anggota badan atau hukuman mati tidak pernah diterapkan. Hukuman dengan kerja paksa juga tidak ada, sedangkan hukuman dengan menggadaikan sangat sedikit ditemukan. Penyelesaian menurut hukum berlaku menurut buku Undang-Undang Pidana lama dan peraturan dari Al-Qur’an (Schwartz, 1893:338).

Mengenai hak mengolah tanah di sepanjang sungai pada umumnya dimanfaatkan oleh pengembala-pengembala milik keluarga sendiri. Tanah yang tidak diolah/digarap oleh pemiliknya menjadi milik penggarap walaupun tanah itu berada di dalam kampung. Peraturan ini tidak berlaku bagi orang asing, walaupun mereka telah menggunakan tanah tersebut (Grondgeland, 1910:135).

C. PENUTUP

Hubungan Kuantan dengan Minangkabau terlihat dalam tradisi lisan yang menyatakan nenek moyang Rantau Kuantan dahulunya berasal dari daerah Minangkabau. Raja Minangkabau dari Pagaruyung mengirim dua bangsawan ke Kuantan untuk membawa adat dan pesan ke daerah ini. Mereka adalah Datuk Ketemanggungan (Datuk Tumanggung) dan abang tirinya Datuk Perpatih Nan Sebatang (Datuk Perpatih).

Masuknya orang Minangkabau secara besar-besaran ke Kuantan terjadi pada tahun 1915-1920. Kebanyakan mereka datang dari daerah Tanah Datar dan berbagai daerah di sekitar Solok untuk bekerja di perkebunan karet. Penduduk Rantau Kuantan yang berasal dari Minangkabau tersebut bercampur dengan orang-orang di daerah Kuantan yang berbatasan dengan Distrik Batanghari dan Indragiri Hulu.

Hubungan Kuantan dengan Minangkabau terlihat dalam pemerintahan adat Rantau Kuantan, masyarakat dibagi atas suku-suku, suku-suku ini hidup dalam keluarga (seperut) dan keluarga (selutut). Setiap suku terdiri dari empat orang pemangku adat yaitu seorang penghulu kepala suku, *monti*, *dubalang* dan pegawai agama. Dalam pemerintahan suatu negeri hanya penghulu yang patut berbicara, *monti*, *dubalang* dan pegawai agama hanya sebagai penasehat penghulu. Perkawinan antara orang dari dalam suku sendiri dilarang. Penduduk Kuantan menganut system *matriachaat* (*matrilineal*) yang diperoleh melalui keturunan ibu. Dalam pembagian warisan, harta benda dibedakan atas harta pusaka dan harta pencarian, dalam harta pencaharian diambil melalui perolehan hasil pekerjaan laki-laki dan perempuan bersama-sama. Ketika seorang istri meninggal harta dibagi diantara anak laki-laki dan anak-anak dari saudara perempuan. Harta pencaharian dari laki-laki yang datang diberikan kepada anak dari saudara perempuan mereka.

Hubungan Rantau Kuantan dengan Indragiri pada masa lalu sangat erat, terbukti ketika Raja Pagaruyung, Raja Muda di Indragiri bersama-sama dengan Datuk Tumenggung menyelesaikan masalah perbatasan Indragiri dengan Kuantan. Pengikat yang kuat terhadap Rantau Kuantan dengan Indragiri adalah dari III Koto Lubuk Ramo sampai ke Kerajaan Indragiri. Dimana kepala federasi ini diberi gelar “Orang Kaya”, jabatan ini harus disetujui oleh Sultan dari Indragiri. Hal tersebut dinyatakan dengan istilah

“Bertuan ke Minangkabau, Beraja ke Indragiri, Berdatuk ke Datuk Bendahara”. Yang disebut terakhir adalah dari kerajaan Indragiri. Hingga kini hubungan Kuantan dengan Indragiri dan Minangkabau masih berlangsung dengan damai dan harmonis. Apalagi saat ini sarana transportasi lebih mendukung dengan adanya fasilitas jalan raya dan angkutan darat yang mencukupi. Kekayaan dan kekurangan hasil alam Kuantan mengakibatkan terjadinya transaksi perdagangan dan migrasi tenaga kerja ke daerah ini dari kedua daerah tersebut.

Pembentukan wilayah administrasi pemerintahan kolonial Belanda di Kuantan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah kolonial baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pemerintah kolonial Belanda menyebut daerah ini dengan *Districten Kuantan atau Onderafdeeling Kuantan* sebagai bagian dari *afdeeling* Indragiri dengan ibukotanya Taluk atau lebih dikenal dengan Taluk Kuantan. Di Taluk ditempatkan seorang kepala pemerintahan yang disebut dengan *controleur*. Kontrolir ini hanya dibantu oleh beberapa pejabat pemerintahan dari bangsa Belanda sendiri, selebihnya dipakai pegawai-pegawai pribumi. Bahkan pemerintah Belanda masih memberlakukan pemerintahan *nagori* menurut sistem setempat dan pemerintahan adat, namun pemerintahan *nagori* pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak lagi bersifat otonom. Untuk tetap dapat mempertahankan pemerintahannya, Belanda melakukan *korte verklaring* dengan kepala pemerintahan setempat untuk mengikat kesetiaan pemerintahan lokal terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kepala-kepala pemerintahan setempat diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah kolonial Belanda.

DAFTAR SUMBER

- Aanteekeningen Omtrent Midden Sumatra Aan Officiële Bescheiden Ontleend. 1880. *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, Deel XXXIX Van Kunsten En Wetenschappen*, Batavia, 's Hage, W.Bruining & Co MNijhoff.
- ANRI, BB 245. *Nota van de afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten betreffende de toevoeging van een gedeelte der Ooskust van Sumatra bij het Gouvernement Midden Sumatra (Sumatra's Westkust + Riouw)*
- ANRI, R28/10/18 BB 1097. *Ontheffing zelfbest: van hoeboek Djambi van zijn waardigheid en tijdelijke opdracht van het bestuur over dat Landschap a/d Controleur der Kwantandistricten*.
- BAPPEDA dan BPS Kabupaten Kuantan Singingi, *Kuantan Singingi Dalam Angka 2007*.
- De Graaf, S en D.G. Stibbe. 1918. *Encyclopaedie Van Nederlandsch-Indie Tweede Druk* onder Redactie van Tweede Deel, Leiden: H.M. S. Gravenhage Martinus Nijhoff den N.V/V/HE.J. Brill.
- Grondgeland, A. 1910. *Mededeelingen Betreffende De Kwantan Districten, Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie zevende volgrees-negende deel*, S Gravenhage Martinus Nijhoff.
- Juwono, Harto dan Yosephine Hutagalung. 2006. *Tiga Tungku Sejarangan: Sejarah Kesultanan Indragiri Sampai Peristiwa 5 Januari 1949*, Yogyakarta: Ombak.
- Kato, Tsuyoshi. 1997. “The localization of Kuantan in Indonesia; From Minangkabau Frontier to a Riau Administrative District”, in: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Riau in Transition* 153 no:4, Leiden.
- Lekkerkerker, C. 1916. *Land en Volk Van Sumatra*, Leiden, N.V. Boekhandel en Drukkerij Voorhe en E.J. Brill.
- Ligtvoet, K.J.A. 1909. *Rapport betreffende een onderzoek naar In Te Voeren*

- Stoomvaartdiensten op Rivieren in Midden-Sumatra*, Batavia Landsdrukkerij.
- Rahim. A, Marleily. 1985. "Sistem Pemerintahan Adat Melayu di Rantau Kuantan dan Kampar Kiri", dalam S. Budisantoso (eds.), *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*. Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
- Schwartz, H.J.E.F, 1893 "Nota over den politieken en economischen toestand van het landschap Kwantan", dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land En Volkenkunde*, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
- Slotemaker, C.G. 1926. *Bevolkingsrubbercultuur in Nederlandsch-Indie VI. Riouw en Onderhoorigheden, Oostkust van Sumatra en Atjeh en Onderhoorigheden*, Weltevreden: Landsdrukkerij.
- Stuurman, A. *Memorie van Overgave Betreffende de Afdeeling Indragiri 2 Mei 1932*
- Sutan, Jamal Lako, *Daerah Riau dari Zaman ke Zaman*, Manuskrip tanpa tahun.
- Yusuf, Ahmad dkk. 1994. *Sejarah Kesultanan Indragiri*. Pekanbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

HARMONISASI ANTAR ETNIK DI KABUPATEN BATANGHARI, JAMBI ABAD IX-XX

ETHNICS HARMONIZATION IN BATANGHARI REGENCY ON 19TH – 20TH CENTURY

Dedi Arman

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri
Jln. Pramuka No. 7 Tanjungpinang
deasutanmakmur@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the harmonious life of different ethnic living on Batanghari Regency on Jambi Province. Batanghari is unique, while other areas in Indonesia engulfed in constant conflict after the implementation of regional autonomy, people in Batanghari live peacefully. There is no conflicts between ethnics living there. This research uses historical approach which consist of collecting sources using archival study and field study by interviewing the cross ethnic communities. The researcher found that the migration to Batanghari was caused by establishment of rubber plantation, petroleum drilling, and transmigration program. The recent trend of migration, however, was caused by civil servant's recruitment and the economic potential of Batanghari itself. Harmonization can be seen from the interaction between native residents with immigrants. This harmony is supported by several factors, such as: intercultural marriage and sense of belonging between the resident as people of Batanghari. The Melayu tradition unify the multi-ethnic communities in Batanghari, including Melayu, Minangkabau, Javanese, Batak, Chinese and Banjar/ Melayu tradition acts as unifier between these traditions and protects its balance. Though coming from different regions and cultural background, the residents of Batanghari are proud to live there and their solidarity is reflected on Batanghari's slogan Serentak Bak Regam.

Keywords: Ethnic Harmonization, Batanghari, Jambi

ABSTRAK

Tulisan ini membahas kehidupan harmonis antar etnik di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang marak terjadi konflik antar etnik pasca otonomi daerah, hal itu tidak terjadi di Batanghari. Tidak pernah terjadi konflik antar etnik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dimulai dengan pengumpulan sumber melalui studi kearsipan dan studi lapangan melalui wawancara dengan masyarakat lintas etnik. Dari hasil penelitian, disimpulkan migrasi penduduk ke Batanghari disebabkan dibukanya perkebunan karet, pengeboran minyak bumi, dan program transmigrasi. Belakangan pendatang ramai ke Batanghari disebabkan penerimaan pegawai negeri sipil dan juga daya tarik ekonomi untuk usaha. Harmonisasi dapat dilihat dari interaksi penduduk asli secara baik dengan para pendatang. Keharmonisan terjaga karena beberapa faktor diantaranya perkawinan silang dan, perasaan bersaudara antar warga. Adat Melayu Batanghari menjadi perekat antar etnik yang ada di Batanghari yang mencakup Etnik Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, Tionghoa dan juga Banjar. Adat Melayu ditempatkan di atas semua adat dari beragam etnik dan menjadi pelindung. Meski berasal dari berbagai daerah, masyarakatnya bangga sebagai masyarakat Batanghari. Kekompakan masyarakatnya tergambar dalam slogan Batanghari *Serentak Bak Regam*.

Kata Kunci: harmonisasi etnik, Batanghari, Jambi

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural yang terdiri dari berbagai etnik, seperti Jawa, Sunda, Madura, Aceh, Minangkabau, Batak, Bugis, Banjar, Ambon, dan keturunan Arab, India, dan Cina. Di samping mendiami suatu wilayah, mereka juga hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu. Proses integrasi yang mereka alami sudah berlangsung sejak lama, sejak zaman kerajaan sebelum kedatangan bangsa Barat. Pembauran pun telah terwujud dalam bentuk-bentuk budaya yang menjadi milik bersama. Akan tetapi, sejak satu dasawarsa terakhir, kehidupan yang harmonis tersebut di beberapa daerah mulai goyah dan bahkan berubah menjadi konflik fisik. Kerukunan hidup yang selama ini terjaga dengan baik mulai hilang. Bahkan, konflik tersebut seolah-olah dapat pula menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan mengancam integrasi bangsa.

Kasus kerusakan dalam beberapa tahun terakhir, seperti di Sampit, Ambon, dan Poso telah menyebabkan banyak orang berbicara tentang adanya konflik etnis atau konflik antara kelompok-kelompok etnis yang mengancam integrasi nasional. Apabila kita melihat konflik-konflik yang terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik itu konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah, maupun konflik horizontal antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Isu etnisitas bukan isu sentral atau pun isu pemicu. Kebanyakan dari persoalan yang muncul menjadi konflik berkaitan kekuasaan dan sumber daya alam. (Thung Ju Lan, 2010:1).

Otonomi dan primordialisme berpotensi mengganggu harmonisasi kehidupan masyarakat. Padahal di hampir setiap daerah terjadi migrasi penduduk masuk sehingga membentuk masyarakat multi etnis. Di masyarakat multi etnis rentan terjadi konflik antar etnis. Namun, sejumlah daerah yang multi etnis dapat menjaga harmonisasi hubungan antar etnis.

Provinsi Jambi termasuk salah satu daerah yang dapat mempertahankan keharmonisan hubungan antar etnis tersebut, baik antara penduduk pendatang maupun antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Sepanjang sejarahnya tidak terdapat catatan konflik berdarah sesama mereka. Kehadiran mereka di daerah Jambi pada awalnya lebih disebabkan karena Jambi merupakan salah satu pusat perdagangan di kawasan Pantai Timur Sumatra dan Selat Malaka. Kedatangan mereka telah menambah jumlah penduduk, mengubah komposisi penduduk dan membentuk masyarakat yang plural. Mereka melakukan proses integrasi sehingga generasi berikutnya mengidentifikasikan diri sebagai orang Melayu Jambi. (Lindayanti, dkk:2009:2).

Salah satu daerah di Jambi yang bisa jadi contoh masyarakatnya yang harmonis meski terdiri dari sejumlah etnis adalah masyarakat Kabupaten Batanghari. Daerah ini salahsatu kabupaten tertua di Provinsi Jambi yang lebih dulu terbentuk sebelum keberadaan Provinsi Jambi. Di Batanghari terdapat etnis Melayu, Suku Anak Dalam (SAD), Jawa, Minangkabau, Batak, Bugis, Tionghoa dan juga etnis lain yang dianggap etnis asli Jambi, seperti penghulu.

Sejumlah tulisan telah membahas kerukunan antar etnis di Provinsi Jambi. Lindayanti, et.al (2009) dari Universitas Andalas menulis Harmonisasi Kehidupan di Provinsi Multi Etnik: Studi Kasus Integrasi antara Penduduk Pendatang dan Penduduk Asli Jambi. Dalam tulisannya disebutkan Jambi nyaris tak pernah ada konflik antar etnis. Kebanyakan konflik yang terjadi adalah antara penduduk asli atau Suku Anak Dalam dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tulisan ini fokus lokasi penelitiannya di tiga daerah, yakni Jambi Seberang, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun, dalam penelitian ini tak ada mengupas tentang Kabupaten Batanghari yang merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Etnis

yang ada di Kabupaten Batanghari berbeda dengan yang ada di Jambi Seberang dan Tanjungjabung Timur.

Tulisan lain adalah Sya'roni (2005), yang menulis *Interaksi Sosial Antar Kelompok Etnis (Studi Kasus di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi)*. Dalam tulisannya, Masyarakat Kelurahan Tambak Sari terdiri dari berbagai latar belakang agama, sosial, dan adat istiadat. Perbedaan itu telah ada sejak mereka berada di daerah asalnya masing-masing. Kondisi ini berdampak pada corak hubungan interaksi sosial mereka di tempat mereka yang baru. Perbedaan latar belakang antara anggota kelompok tersebut menyebabkan adanya prasangka sosial antar mereka, dan prasangka sosial ini berdampak pada terciptanya jarak sosial dalam kehidupan mereka dengan kelompok etnis lainnya.

Radjimo Sastro Wiyono (2012) menulis *Kabupaten Batanghari: Transformasi Kota Tradisional dan Ikatan Politis Jambi-Kerinci* dalam buku *Kota-Kota di Sumatra, Enam Kisah Kewarganegaraan*. Dalam tulisannya, Radjimo menyebutkan Batanghari dengan ibukota Muara Bulian sebagai kota tradisional yang baru berkembang dan masih dalam tahap pembangunan fisik disejumlah bidang. Ia menyoroti kondisi jalan raya yang relatif jelek. Dalam tulisannya, juga disebutkan Batanghari dihuni sejumlah etnis. Warga Jawa di Batanghari memiliki dua paguyuban yang skalanya besar. Etnis Kerinci dianggap sebagai pendatang dan banyak berpengaruh dalam pemerintahan di Jambi, termasuk di Batanghari, (Sastro Wiyono, 2012).

Arif Rahim (2017), dalam tulisannya *Jambi: Daerah Rantau Etnis Minangkabau* di Jurnal Dikdaya memaparkan Daerah Jambi sudah dijadikan daerah rantau oleh etnis Minangkabau sejak zaman klasik. Mobilitas merantau itu timbul seiring dengan terbentuknya jaringan perdagangan. Sejak masa itu etnis Minang

telah terlibat aktif dalam kegiatan perdagangan, yakni memperdagangkan hasil bumi daerah Minangkabau seperti lada, kapas, gambir, kopi, emas, dan lain-lain, untuk selanjutnya ditukar dengan produk dari luar seperti tekstil dan lain-lain. Kedatangan orang-orang Minangkabau di daerah Jambi telah memberi pengaruh terhadap unsur-unsur kebudayaan Jambi saat ini. Pengaruh itu terlihat dalam bidang Organisasi sosial (adat), sistem mata pencaharian, kehidupan beragama, dan kesenian.

Tulisan ini berbeda dengan tulisan sebelumnya tidak hanya dari lokasi penelitian yang berbeda, tetapi juga ada perbedaan faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi penduduk. Migrasi penduduk ke Batanghari salahsatunya karena penemuan minyak bumi di Bajubang yang wilayah Batanghari sejak awal abad 20. Terjadi migrasi besar-besaran ke Batanghari untuk bekerja di perusahaan minyak bumi yang awalnya dikuasai perusahaan Belanda. Daerah lain di Jambi tidak ada yang menghasilkan minyak bumi kecuali Kabupaten Muaro Jambi. Namun, Muaro Jambi sendiri merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tulisan ini merumuskan permasalahan, yakni:

1. Faktor –faktor apa yang menyebabkan terjadinya penduduk Batanghari yang multi etnik?

2. Bagaimana interaksi antar etnik dan Faktor-faktor apa yang menjadi perekat hubungan penduduk asli dan pendatang sehingga bisa harmonis?

3. Bagaimana kebijakan yang pernah dikeluarkan pemerintah untuk mewujudkan harmonisasi?

Dari perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan, pertama mencari masukan tentang faktor apa yang menjadi penyebab penduduk Batanghari multi etnik. Kedua, menggali informasi tentang interaksi yang terjadi antara penduduk pendatang dan penduduk asli, serta

mencari faktor yang bisa menyebabkan terjadinya harmonisasi. Ketiga, menjabarkan kebijakan yang pernah dikeluarkan pemerintah sehingga hubungan antara penduduk pendatang dan penduduk asli menjadi harmonis. Kelima, merumuskan strategi pola integrasi berbagai etnis menuju pengharmonisan hubungan antara penduduk asli dan pendatang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik internal dan eksternal, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik atau pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu menentukan topik yang akan dibahas yaitu perdagangan lada. Pengumpulan data berupa studi kepustakaan dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari.

Tahap selanjutnya yaitu kritik internal dan eksternal, untuk melihat keaslian dan reliabilitas sumber yang didapatkan. Kritik eksternal yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan melihat latar belakang dari penulis, kertas yang digunakan, jenis huruf, bahasa, ejaan, dan penerbit dari sumber buku. Kritik internal dilakukan dengan melihat isi dari buku itu, apakah isinya relevan dengan fakta sejarah dan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya interpretasi, dilakukan berdasarkan fakta dan juga data yang diperoleh sehingga tidak hanya imajinasi semata untuk itu peneliti mencantumkan sumber data yang digunakan. Pada tahap interpretasi sumber-sumber primer yang telah didapatkan dibandingkan sumber-sumber lain baik sekunder ataupun tersier. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan pemaknaan. Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mengaitkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, sehingga diperoleh sebuah gambaran peristiwa secara utuh dan kronologi serta saling berkaitan. Tahap terakhir historiografi

yaitu penulisan sejarah. Penulisan sejarah disusun secara kronologis.

Kerukunan atau keharmonisan antar etnis juga dapat menggambarkan kearifan lokal yang mereka hadirkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam rangka integrasi bangsa dengan cara memberi contoh suatu kehidupan yang harmonis di suatu daerah, yaitu Kabupaten Batanghari dan akan dapat menjadi contoh bagi kehidupan penduduk di daerah lain dalam lingkup negara Indonesia.

B. HASIL DAN BAHASAN

1. Sejarah Kabupaten Batanghari

Ada beberapa versi tentang asal usul nama Batanghari. Salah satunya merujuk pada sebuah cerita rakyat di Jambi tentang masyarakat yang kehilangan rajanya. Dari hasil kesepakatan musyawarah rakyat, didatangkanlah raja dari India. Dalam perjalanannya melewati sungai yang panjang dan menempuh waktu berhari-hari. Raja menyebut batang (istilah untuk sungai) yang dilewatinya dengan hari (menempuh waktu berhari-hari). Rakyat mengikutinya hingga terkenallah sungai yang panjang dan banyak cabang ini dengan nama Batanghari.

Versi lainnya, penamaan Batanghari berasal dari filosofi matahari yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Penamaan daerah Batanghari sebagai sebuah kesatuan kota sudah ada sejak zaman kolonial.²

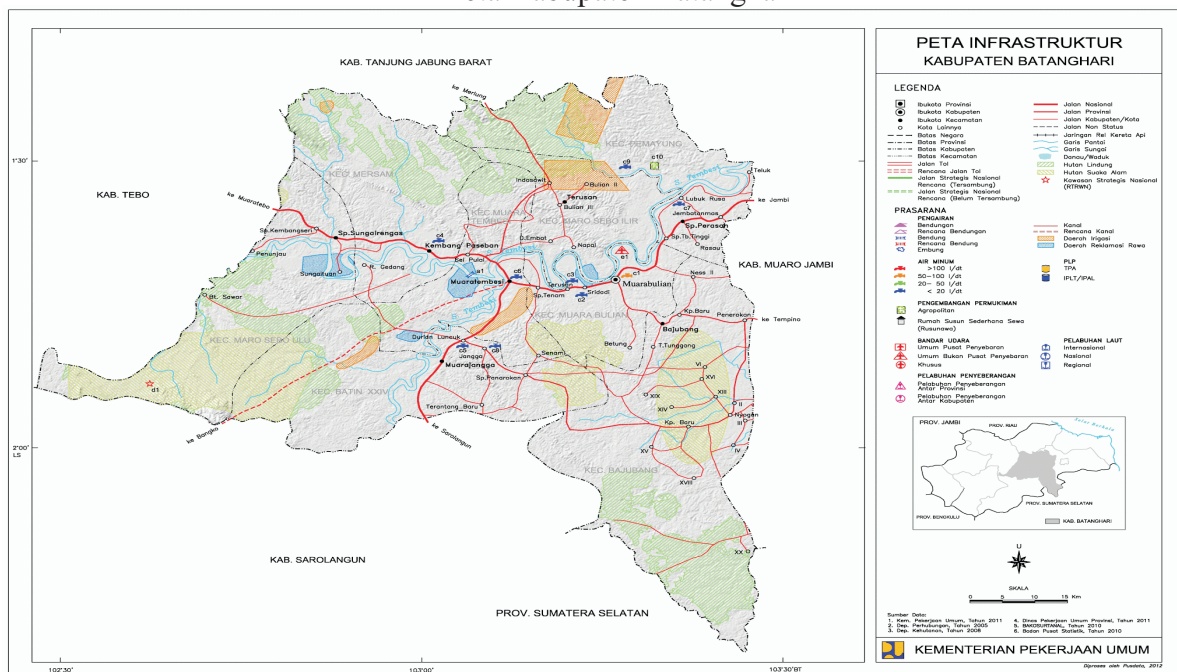
Kabupaten Batang Hari dengan mottonya “Serentak Bak Regam” adalah salah satu dari 10 kabupaten di Provinsi

Jambi, yang usianya ternyata lebih tua dari Provinsi Jambi yang bersemboyan “Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”. Batanghari salahsatu kabupaten tertua selain Kabupaten Tebo dan Kerinci.

² Informasi dari Budayawan Jambi, Junaidi T Noor. Wawancara tanggal 14 Februari 2018 di Jambi.



Kabupaten Batang Hari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5.180,35 Km². Kabupaten Batang Hari secara geografis terletak pada posisi 1°15' lintang selatan sampai dengan 2°2' lintang selatan dan di antara 102°30' bujur timur sampai dengan 104°30' bujur timur. Daerah ini beriklim tropis, dengan tingkat elevensi di Kabupaten Batanghari sebagian besar terdiri dari daerah rendah dengan ketinggian 11-100 meter di atas permukaan laut (sebesar 92,67 persen) sedangkan 7,33 persen berada pada ketinggian 101-500 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kabupaten Batanghari.:



- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo

Logo Kabupaten Batanghari yang lain adalah huruf Y. Secara faktual, sungai yang tertera pada logo tersebut adalah pertemuan antara Sungai Tembesi dan Sungai Batanghari yang lokasinya di Kecamatan Muara Tembesi. Arus sungai Batanghari baik induk maupun anak sungainya melewati hampir semua wilayah dan jadi urat nadi Kabupaten Batanghari.

Antara Sungai Batanghari dan Kabupaten Batanghari tidak terpisahkan karena nama kabupaten tersebut memang diambil dari nama sungai terpanjang di Sumatera itu. Lokasi Kabupaten Batanghari dekat dengan Kota Jambi. Sebelum pemisahan antara Batanghari dengan Kabupaten Muaro Jambi tahun 1999, Batanghari berbatasan langsung dengan Kota Jambi.

Daerah yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Batanghari pada masa kolonial Belanda masuk dalam wilayah *Onderafdeeling* Muara Tembesi. Kini Muara Tembesi menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Batanghari. Penduduk *Onderafdeeling* Muara Tembesi sebagian besar adalah mereka yang termasuk dalam Bangsa XII, terutama Muarasebo, VII dan IX Kota, Petajen, Air Hitam, Awin, Pinakawan Tengah, Penagen, dan Kebalen. Penduduk lainnya adalah Orang Kubu (Suku Anak Dalam) dan Orang Barin) (Lindayanti, et.al, 2013:34).

Onderafdeeling Muara Tembesi semula dibagi 13 distrik adat dan memiliki 64 dusun dengan jumlah penduduk 16.516 orang. Daerahnya dianggap terlalu luas sehingga tahun 1915, Muara Tembesi daerahnya menjadi enam distrik adat dengan enam kepala distrik adat, yaitu:

1. Kedemang dari Distrik Adat Kembang Seri
2. Temenggung dari Distrik Adat Mersam
3. Kranggo dari Distrik Adat Matagual
4. Pasirah dari Distrik Adat Durian Luncuk
5. Pasirah dari Distrik Adat Air Hitam.



Gambar 3. Bekas benteng Belanda di Muara Tembesi. (Foto dokumentasi penulis 2018)

Dari keenam kepala distrik adat hanya Kranggo dari Matagual dan Pasirah dari Air Hitam yang sebenarnya kepala adat, sedangkan empat orang lainnya kepala adat yang diangkat oleh Belanda. (ibid: 36). Di samping distrik adat juga terdapat administrasi pemerintahan yang disebut distrik, yang merupakan gabungan dari beberapa distrik adat. Tahun 1915, *Onderafdeeling* Muara Tembesi dibagi menjadi tiga distrik, yaitu:

1. Resor (lingkungan kerja) Batanghari yang dipimpin kepala distrik yang berkedudukan di Muara Tembesi.
2. Resor Sungai Tembesi yang dipimpin kepala distrik yang berkedudukan di Mandiingin
3. Resor Air Hitam yang dipimpin wakil kepala distrik yang berkedudukan di Pauh.

Pembagian administrasi pemerintahan Muara Tembesi paling mutakhir tahun 1937 sebagai berikut:

Di Muara Tembesi kebanyakan rumah penduduk terletak di sepanjang aliran Sungai Tembesi dan Batanghari sehingga tak satu pun perkampungan penduduk bebas dari banjir. Di antara perkampungan penduduk di Muara Tembesi, Mersam salah satu dusun yang makmur. Rumah penduduk di sana dibuat dari kayu berkualitas bagus. Di setiap dusun di daerah Muara Tembesi memiliki masjid atau minimal sebuah langgar.

Kabupaten Batanghari dibentuk 1 Desember 1948 melalui Peraturan

Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U, tanggal 30 November 1948 dengan pusat Pemerintahannya di Kota Jambi, (sekarang Kodya Jambi). Tahun 1963 kedudukan pusat administrasi Pemerintahan Daerah ini pindah ke Kenali Asam, 10 Km dari Kota Jambi. Kemudian sejak Tahun 1979 berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1979 Ibu Kota Kabupaten yang kaya akan hasil tambang ini baru pindah ke Kota Muara Bulian 64 Km dari Kota Jambi hingga sekarang.

Batanghari mengalami dua kali pemekaran, Pertama, berdasarkan UU No.7 Tahun 1965 Kabupaten Batanghari dimekarkan menjadi dua Daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Batanghari beribukota Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung beribukota Kuala Tungkal. Kedua, berdasarkan UU No.54 Tahun 1999 Kabupaten Batanghar kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari beribukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi beribukota Sengeti.



Gambar 4. Pertemuan Sungai Batanghari dan Tembesi Menjadi Ide Logo Kabupaten Batanghari. (foto dokuemntasi penulis 2018).

Bumi Serentak Bak Regam sejak tahun 1950 hingga 2019 ini telah memiliki 18 kepala daerah. Bupati Batanghari tersebut yaitu :

1. Nurdin (1950-1952)
2. M. Djamin Datuk Bagindo (1952-1953)
3. H. Abdul Manap (1953-1954)
4. Maddolangeng (1954-1956)
5. R. Sunarto (1956-1957)
6. H. Ali Sudin (1957-1958)
7. H. Bakri Sulaiman (1958-1966)
8. Drs. HZ. Muchtar DM (1966-1968)
9. R. Suhur (1968 – 1979)
10. Drs. Ec. M. Radja'i PLH 16-6-1980 s/d 22- 9-1980
11. Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam (1980-1991)
12. H. M. Saman Chatib SH (1991 – 2001)
13. H. Abdul Fattah SH dengan Wakil Bupati Ir. Syahirsah (2001-2006)
14. Ir. H. Syahirsah dengan Wakil Bupati H. Ardian Faisal, SE,M.Si (2006-2011)
15. H. Abdul Fattah-SH dengan Wakil Bupati Sinwan, SH (201-2014).
16. Sinwan, SH (14 Juli 2014-30 Januari 2016)
17. Yazirman, SE,M.Si (1 Februari

- 2016 -17 Februari 2016).
18. Ir.H. Syahirsah, Sy dengan Wakil Bupati Hj. Sofia Yoesoef, SH, MM (2016-2021)

2. Keberagaman Etnis di Batanghari

2.1 Migrasi Penduduk ke Jambi

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya masyarakat plural adalah karena adanya migrasi atau perpindahan penduduk yang keluar dari daerah asalnya menuju daerah yang didiami oleh etnis yang berbeda. Migrasi merupakan tipe mobilitas penduduk yang berbentuk mobilitas penduduk horizontal yang lebih dikenal sebagai gerak penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu. (Mantra, 1999: 1).

Jambi sesungguhnya sebuah provinsi yang dihuni oleh banyak etnis seperti Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, Banjar, dan Bugis. Daerah ini merupakan salah satu tujuan migrasi di pantai timur Sumatera. Masalah migrasi penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang lebih menjanjikan secara ekonomis tidak dapat dihalangi. Migran masuk berarti akan mengubah jumlah dan komposisi penduduk yang menghasilkan bentuk masyarakat yang heterogen. (Lindayanti, Zaiyardam, 2015:169).

Mengutip Mochtar Naim, Lindayanti menulis ada hal lain yang mendorong terjadinya migrasi penduduk, yaitu kebiasaan penduduk yang telah melembaga. Sebagai contoh Orang Minangkabau dari daerah inti (Luhak yang Tiga) bermigrasi ke pantai timur dalam gelombang-gelombang migrasi yang berlangsung bergenerasi-generasi sebelumnya. Rantau Minangkabau sebelah timur meliputi daerah hiliran-hiliran sungai besar: Rokan, Siak, Tapung, Kampar, Indragiri, dan Batanghari (Jambi) yang secara historis disebut sebagai Minangkabau Timur.

Selain orang Minangkabau dan orang Jawa, Bugis, Banjar, dan etnis banyak ditemukan di Provinsi Jambi. Migrasi penduduk akan mengubah jumlah dan komposisi penduduk dan membentuk masyarakat yang plural. Pluralitas dalam

masyarakat dapat berjalan harmonis karena peran dan fungsi masing-masing kelompok berjalan seimbang. Untuk menghindari konflik antaretnis dalam masyarakat plural diperlukan adaptasi kultural dan pembentukan identitas baru.

Barbara Watson Andaya (2016) menulis mencatat, proses integrasi antar etnis di Jambi sudah berlangsung sejak lama, sejak zaman kerajaan jauh sebelum kedatangan bangsa Barat. Dimulai dari masa Kesultanan Jambi pada abad XVI, etnis Jawa telah berada di Jambi dan memiliki pengaruh besar pada kehidupan di Istana Jambi, etnis Minangkabau dan Kerinci datang ke daerah Jambi untuk menambang emas di sepanjang Batang Limun dan Batang Asai di daerah hulu Jambi. Melalui perdagangan lada di hilir in--teraksi dengan berbagai etnis di Kepulauan Nusantara terjadi. Pada masa Hindia Belanda komposisi etnis makin beragam dengan kedatangan etnis Bugis dan etnis Banjar yang membuka kebun-kebun kelapa di pesisir pantai Jambi. Selain itu kemakmuran karet di paruh pertama abad ke-20 menjadi daya tarik bagi berbagai etnis datang ke Jambi. Hasil dari integrasi berbagai etnis itu menghasilkan identitas baru, yaitu Melayu Jambi.

2.2 Migrasi Penduduk ke Batanghari

Adanya migrasi penduduk ke Batanghari sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Adanya pembukaan perkebunan karet di Distrik Muara Tembesi yang kini wilayahnya mencakup Kabupaten Batanghari menyebabkan banyaknya pendatang dari luar Jambi datang ke daerah ini. Daya tarik lain yang menyebabkan penduduk hijrah ke Batanghari adalah pembukaan pengeboran minyak bumi. Faktor lain adanya transmigrasi penduduk dari Pulau Jawa ke Kabupaten Batanghari.

2.3 Perkebunan Karet

Secara resmi pemerintah Belanda melalui Residen Jambi pertama O.L Helfrich (1906-1908) memperkenalkan

karet di Muara Tembesi yang masuk wilayah Batanghari, Jambi. Hal yang pertama dilakukannya adalah membuat kebun percobaan di Muara Tembesi dan Bangko. Di kebun percobaan Muara Tembesi terdapat pohon karet jenis *Ficus Elastica* dan *Plaquium*, masing-masing berjumlah 296 dan 245 pohon. Setelah bibit karet siap tanam, langsung dibagikan ke penduduk secara gratis. Pedagang Cina juga ikut berperan dalam menyebarluaskan tanaman karet ini ke masyarakat. Selain dibagi secara gratis, penanaman karet juga diwajibkan. (Lindayanti, dkk., 2013: 87).

Pendatang dari luar Jambi juga mendapat kesempatan membuka kebun karet di Jambi. Hal ini disebabkan karena para demang yang ditunjuk Kolonial Belanda kebanyakan berasal dari luar Jambi. Hal ini memudahkan pendatang diberi kemudahan membuka karet. Di Muara Tembesi, banyak pendatang dari Minangkabau membuka kebun karet secara luas. Penduduk Jambi baru secara aktif terlibat dalam penanaman karet ini setelah tahun 1910. Daya tarik keikutsertaan mereka disebabkan karena mereka melihat keuntungan yang besar yang diperoleh dari tanaman karet.

Penyadap kebun karet dapat dibedakan menurut empat kelompok, yakni:

1. Penyadap pendatang dari luar Jambi, seperti orang Jawa, Minangkabau, Kerinci dan Palembang.
2. Penyadap orang Jambi yang datang dari desa-desa sekitar perkebunan karet.
3. Penyadap dari dusun setempat di lokasi kebun karet berada
4. Penyadap orang Cina. (ibid,102).

Banyaknya tenaga penyadap karet pendatang disebabkan karena lalu lintas yang lancar antara Jambi dan residensi sekitar. Pada waktu harga karet tinggi, ada sekitar 3.000 Orang Kerinci yang bekerja sebagai penyadap karet. Mereka datang saat harga karet tinggi dan kembali saat harga karet rendah. Sebelum tahun 1920,

hampir semua perdagangan karet di Jambi berada di tangan orang Cina, termasuk di Distrik Muara Tembesi. Pemilik karet sulit sekali mencari tenaga kerja penyadap karet karena jumlah penduduk Jambi dan daerah sekitarnya saat ini masih jarang. Ketersediaan tenaga kerja untuk bekerja di kebun karet tergantung harga karet. Saat harga karet tinggi, maka penduduk pendatang dari Mianngkabau, Jawa, Palembang dan Kerinci berdatangan.

2.4 Pengeboran Minyak

Potensi minyak di Jambi ditemukan *Nederlandsch Indische Aardolie Maatschappij* (NIAM), perusahaan patungan Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) dan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1922. Pengobaran sumur minyak dilakukan di Bajubang yang kini menjadi nama sebuah kecamatan di Kabupaten Batanghari. Tak hanya di Bajubang, tahun 1929 ditemukan lading minyak di Kenali Asam dan tahun 1930 ditemukan lagi sumur minyak di Tempino.

Selama masa krisis di Jambi tahun 1930-an, Jambi menjadikan satu-satunya tempat BPM meluaskan sumur-sumur minyaknya. Minyak mendatangkan setengah juta gulden periode 1923-1930-an. Pengeboran minyak juga menyediakan lapangan kerja bagi 2.400 orang. Sebagian besar pekerja bukan orang Jambi karena orang Jambi lebih suka menjadi majikan di kebun karetnya. Minyak dari tiga sumur di Jambi tidak disuling di Jambi melainkan minyak dialirkan lewat pipa sejauh 250 Km menuju ke Plaju, Keresidenan Palembang. (Scholten, 2008:327).

Kini Pertamina EP Asset I Jambi wilayah kerja mengelola ladang minyak di dua daerah penghasil, yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi sendiri baru dimekarkan dari Batanghari tahun 1999 lalu. Kantor orang Pertamina dulunya berlokasi di Bajubang, namun setelah aktivitas pengeboran minyak berkurang,

kantor dipindahkan ke Kenali Asam yang ada di Kota Jambi.

Pengaruh keberadaan pengeboran minyak di Batanghari yang setelah Indonesia merdeka dikelola PT Pertamina berdampak pada heterogennya penduduk Batanghari. Pekerja kilang minyak itu bekerja dan menetap di Batanghari. Garis keturunannya melahirkan generasi baru, penduduk kelahiran Batanghari yang kakek atau orang tuanya dulu bekerja di Pertamina.

Gustini misalnya, Kasi Sejarah di Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Batanghari orang tuanya dulu merantau ke Bajubang, Batanghari untuk bekerja di kilang minyak milik Pertamina. Ia sendiri kelahiran Batanghari, namun kedua orang tuanya berasal dari Sumatera Barat. Gustini sendiri merasa Batanghari kampung halamannya sendiri karena ia lahir, besar dan bekerja di daerah ini.³

Tak hanya Gustini, salah seorang staf Gustini, bernama Rode juga produk generasi pendatang yang orang tuanya bekerja di Pertamina Bajubang yang ada di Batanghari. Sama halnya dengan Gustini, ia juga lahir dan besar di Batanghari. Rode mengaku orang tuanya berasal dari Sianok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.⁴

Menurut Gustini, ada ratusan bahkan ribuan orang Batanghari yang orang tuanya merantau ke Batanghari untuk bekerja di Pertamina yang berlokasi di Bajubang. Bajubang yang pasca setelah kantor Pertamina tutup dan pindah ke Kenali Asam Jambi berubah menjadi daerah yang sepi. Sejak 2011, pusat perkantoran Pertamina dipindah ke Kenali Asam.

Bajubang kemudian menjadi sepi setelah kantor Pertamina pindah. Bangunan perumahan Pertamina yang jumlahnya ratusan unit dibiarkan kosong dan terbengkalai. Bahkan sudah banyak

rusak dan ambruk. Sarana olahraga seperti kolam renang, tenis dan jalan mulai tidak diperhatikan. Semak dan rumput liar tumbuh dengan leluasa di sekeliling lapangan tenis dan kawasan lainnya, dan pohon sawit tegak dengan gagah di lapangan golf serta kolam renang mengering sendiri.

Daerah Bajubang dulunya termasuk tiga lokasi pertambangan minyak terbesar di Jambi, bersama Tempino dan Kenali Asam. Khusus daerah Bajubang dulunya menjadi areal produksi tumbuh menjadi sebuah kota kecil metropolis. Di sana telah dibangun rumah sakit, bank, bioskop, pub, karaoke, hotel, *helipad*, gedung pertemuan, lapangan golf, lapangan tenis, kolam renang, sarana pendidikan dan sarana olahraga lainnya.

Lokasinya tertata apik dengan median jalan beraspal mulus benar-benar menyulap desa tersebut menjadi kota metropolis yang didambakan semua orang. Kini semua kejayaan metropolisnya Bajubang lambat laun meredup karena tidak didiami lagi oleh pekerja dan karyawan Pertamina.



Gambar 5. Kilang minyak di Bajubang sejak zaman belanda yang masih beroperasi.

2.5. Program Transmigrasi

Heterogennya penduduk Kabupaten Batanghari selain karena faktor daya tarik keberadaan perkebunan karet dan pengeboran minyak, juga karena faktor lain. Sejumlah desa di Kabupaten

³ Wawancara dengan Gustini di Muara Bulian, 22 Maret 2018

⁴ Wawancara dengan Rode di Muara Bulian, 22 Maret 2018

Batanghari merupakan desa transmigran. Penduduknya datang dari sejumlah daerah, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sejumlah desa namanya identik dengan nama Jawa karena penduduknya merupakan transmigran dari Pulau Jawa.

Transmigrasi di Provinsi Jambi telah dimulai pada masa kolonisasi. Keberhasilan kolonisasi di Lampung yang pada mulanya merupakan daerah percobaan terutama dalam penyediaan pangan, telah memotivasi Pemerintah Belanda untuk meningkatkan produksi pangan tersebut dengan mengembangkan daerah kolonisasi termasuk ke daerah Jambi. Pada masa kolonisasi, Provinsi Jambi (dulu berstatus Karesidenan Jambi) termasuk wilayah Sumatera Tengah. Pelaksanaan program kolonisasi dimulai pada tahun 1940 yang ditandai dengan pengiriman 506 kepala keluarga (KK) dengan 1.945 jiwa dari Pulau Jawa menuju daerah Bangko-Tabir, yang kini masuk Kabupaten Merangin. (Junaidi, 2012:141).

Lokasi transmigrasi di Provinsi Jambi tersebar pada hampir seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Jambi kecuali Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Berdasarkan sebarannya, penempatan terbanyak adalah di Kabupaten Muaro Jambi dengan proporsi sebesar 17,14 persen (14.268 KK) diikuti oleh Kabupaten Merangin sebesar 15,78 persen (13.134 KK), Bungo sebesar 13,74 persen (11.440 KK), Tanjung Jabung Timur sebesar 13,04 persen (10.859 KK), Tebo sebesar 11,98 persen (9.974 KK), Sarolangun sebesar 11,20 persen (9.324 KK), Tanjung Jabung Barat sebesar 8,88 persen (7.396 KK), Batang Hari sebesar 8,12 persen (6.763 KK) dan Kerinci sebesar 0,12 persen (100 KK)

Penyelenggaraan transmigrasi pada masa Orde Baru diatur melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1973 tentang

Penyelenggaraan Transmigrasi. Pada masa Orde Baru, beberapa kali penempatan transmigran di Jambi. Pada Pelita III (1979/1980 – 1983/1984) telah ditempatkan transmigran sebanyak 22.741 KK (94.485 jiwa) pada 47 lokasi (UPT). Selain pada kabupaten-kabupaten penerima transmigrasi pada Pra Pelita, Pelita I dan II, pada Pelita III ini lokasi pemukiman transmigrasi juga berada di Kabupaten Batang Hari, dan Merangin.

Pada Pelita VI (1994/1995-1998/1999) penempatan transmigran mengalami penurunan menjadi 9.710 KK (41.871 jiwa) yang ditempatkan pada 27 lokasi (UPT). Kabupaten penerima transmigran adalah Kabupaten Bungo, Sarolangun, Tebo, Batang Hari, Merangin dan Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat. Penurunan ini berlanjut di era otonomi daerah. Pada periode 2000-2004, penempatan transmigran sebanyak 4.050 KK (17.028 jiwa) pada 15 lokasi (UPT). Kabupaten penerima transmigran pada periode ini adalah Kabupaten Batang hari, Bungo, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, dan Tebo.

Pada periode 2005-2009 ditempatkan sebanyak 2.030 KK (7.790 jiwa) pada 11 lokasi (UPT). Pada periode ini kabupaten penerima transmigran adalah Kabupaten Batang hari, Bungo, Kerinci, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Pada 2008 merupakan tahun terakhir dibukanya transmigrasi di Kabupaten Batanghari. Kawasan Transmigrasi di Batanghari saat ini tersebar di Kecamatan Mersam, Maro Sebo Ilir, Bajubang, dan Kecamatan Batin XXIV.

3. Hubungan Antar Etnik dan Kebijakan Menjaga Harmonisasi

3.1 Persebaran dan Hubungan antar Etnik

Sejumlah etnis yang ada di Batanghari bisa dikelompokkan persebaran tempat tinggalnya. Etnis Jawa hampir semua ada di seluruh kecamatan, tapi mayoritas berada di Kecamatan

Bajubang. Di sejumlah desa transmigrasi yang ada di Batanghari, mayoritas berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat Jawa yang ada di Jambi banyak yang telah berintegrasi dengan etnis lain, seperti dalam hal perkawinan.⁵

Etnik Jawa yang ada di Jambi sehari-hari menggunakan Bahasa Jawa kalau berkomunikasi dengan sesama etnis Jawa. Namun, kalau berhadapan dengan etnis lain, menggunakan bahasa Melayu Jambi selain Bahasa Indonesia. Mereka juga masih menjalankan tradisi Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Upacara perkawinan, prosesi kelahiran, dan kematian masih menggunakan adat Jawa meskipun sudah puluhan tahun tinggal di Batanghari.

Orang Jawa di Batanghari menganggap diri mereka sebagai pendatang karena itu mereka berusaha keras untuk bisa dianggap sebagai warga yang sama dengan penduduk setempat. Di samping itu, sebagai orang yang meninggalkan kampung halaman, mereka juga ingin mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya di perantauan. Bukti keberhasilan itu nampak dalam kepemilikan rumah dan lahan garapan. Meski telah lama merantau, namun kerinduan pada kampung halaman selalu ada. Setiap bertemu orang Jawa di perantauan, mereka biasanya langsung akrab dan tak jarang menawarkan bantuan pada perantau yang baru datang. Perkumpulan-perkumpulan orang Jawa yang berbentuk paguyuban, biasanya bertujuan melestarikan tradisi sebagai pengobat rindu pada kampung halaman. Orang Jawa di Batanghari membentuk Ikatan Keluarga Jawa (IKJ) dan Jawa Tinggal dan Keturunan Sumatra (Jati Kesuma). Payuban didirikan untuk memperkuat persaudaraan dan bersifat

sosial seperti arisan keluarga dan bakti sosial.

Tak hanya etnis Jawa, etnis pendatang lainnya seperti Minangkabau juga membentuk paguyuban. Ada namanya Ikatan Keluarga Minang, Ikatan Keluarga Agam, Bukittinggi, Solok sampai tingkat paguyuban tingkat kampung. Sama halnya dengan etnis Jawa, mereka juga berorganisasi untuk kegiatan sosial. Meskipun tak tertutup kemungkinan dimanfaatkan para pengurusnya untuk kepentingan politik praktis, seperti pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif.

Orang Minangkabau termasuk etnis pendatang yang jumlahnya cukup ramai di Kabupaten Batanghari. Bersama etnis Cina, orang Minangkabau menguasai sektor perdagangan. Orang Minangkabau banyak tinggal di Kecamatan Muara Bulian, Muara Tembesi dan Maro Sebo Ulu. Bakhtiar Oedin, tokoh masyarakat Muara Tembesi menyebutkan, dulunya orang Minangkabau banyak tinggal di dekat Pasar Muara Tembesi. Namun, saat terjadi banjir besar tahun 1955, banyak penduduk pindah dari Muara Tembesi. Termasuk orang Minangkabau yang kemudian banyak pindah ke Pal 5 dan Muara Bulian untuk membuka usaha di sana. Bakhtiar sendiri meski lahir di Muara Tembesi, namun kedua orang tuanya berasal dari Sumatra Barat yang pindah ke Batanghari untuk bekerja.⁶

Berbeda dengan etnis Minangkabau yang sudah lama ada di Batanghari, etnis Batak belakangan datang ke Batanghari. Sejak 1980-an, banyak guru yang dari etnis Batak diterima bekerja di Batanghari. Jumlahnya semakin

⁵ Wawancara dengan Joko Ismanto, Kasi Kesenian Dikbud Kabupaten Batanghari, 10 Februari 2019. Joko yang berasal dari Jawa Tengah menikah dengan istrinya yang berasal dari Pariaman, Sumbar.

⁶ Wawancara dengan Bakhtiar Oedin di Muara Tembesi, 22 Maret 2018. Oedin mengaku kelahiran 1921. Saat ini dianggap sesepuh masyarakat Muara Tembesi. Ia mengalami masa kejayaan Muara Tembesi pada Zaman Belanda dan Jepang. Ia juga menyaksikan prosesi penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia tahun 1949. Di Muara Tembesi, ada tugu penyerahan kedaulatan.

besar setelah era reformasi. Selain etnis Minangkabau dan Jawa, guru dari etnis Batak yang jumlahnya cukup besar di Batanghari. Orang Batak di Batanghari banyak tinggal di Kecamatan Bulian dan Muara Tembesi. Di Muara Tembesi ada Gereja Huria Kristen Batak Protestan

Etnis Tionghoa banyak menampati wilayah Kecamatan Muara Mulian dan Muara Tembesi. Wajar saja di sinilah pusat perekonomian Kabupaten Batanghari. Pemilik rumah toko yang berjejer sepanjang jalan lintas Muara Tembesi menuju ke Bungo dan kabupaten/kota lainnya di Jambi di bagian hulu dimiliki warga Etnis Cina. Etnis Tionghoa telah lama tinggal di Kabupaten Batanghari. Saat Belanda membangun Muara Tembesi sebagai pusat residennya di Jambi, Orang Tionghoa dan Arab telah tinggal di Pasar Muara Tembesi. Orang Cina dan Arab yang sebagian besar merupakan pedagang perantara tinggal disekitar pasar. Sedangkan orang Pribumi setempat tinggal di beberapa wilayah baik di pesisir sungai Batanghari. (Syuhada, 2017:184).

Hubungan antar etnis di Batanghari berjalan harmonis. Secara umum di Batanghari, masyarakatnya memiliki akses yang sama dalam kewarganegaraan. Misalnya dalam administrasi

kependudukan, hak beragama, hak berpolitik, hak ekonomi dan hak budaya. Malah etnis minoritas, seperti Suku Anak Dalam (SAD) yang mengalami keterbatasan akses dibidang kewarganegaraan. (Sastro Wijono, 2012:396).

3.2 Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Sebagai Pemersatu

Kearifan Lokal Adat Melayu Jambi yang disimbolkan pinang dan sirih; pinang menyapa orang yang datang dan sirih untuk menanti orang tiba. Migran masuk dengan cepat bisa mendapatkan status sebagai warga Jambi karena persyaratan adat berbunyi yang dapat dikatakan sebagai warga Jambi apabila telah tinggal menetap seumur padi memberikan peluang yang besar bagi penduduk pendatang untuk menjadi Orang Jambi. Penduduk yang menetap di Jambi dalam waktu yang tidak terlalu yang diibaratkan lamanya seumur padi sudah bisa dipanen dan sudah dianggap jadi warga Jambi.

Adat Melayu Jambi dapat dilihat dari contoh integrasi masyarakat di hulu Jambi dan Pesisir Jambi jauh sebelum propinsi jambi terbentuk. Budaya yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antar etnis adalah budaya Melayu.



Gambar 6. Gereja HKBP di Muara Tembesi. (foto: tibranews).

Penyelesaian sengketa pun dilakukan berdasar adat Melayu, yaitu 'luko

dipampas, mati dibangun’, artinya diadakan mufakat antara kedua belah pihak melalui perantara pihak ketiga.⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 tahun 2007, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan tahun 1992, yaitu Peraturan Daerah No. 11 1992 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi diganti. Selanjutnya berdasarkan Perda tersebut Lembaga Adat Melayu Jambi dibentuk. Adat istiadat Melayu Jambi adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa.

Kabupaten Batanghari memiliki lembaga adat yang namanya berbeda dengan lembaga adat di daerah Jambi lainnya. Termasuk juga dengan Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Lembaga Adat di Batanghari bernama Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam. Hal ini sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2017 yang merupakan Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam.

Keberadaan lembaga adat ini sangat penting artinya dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan adat di Kabupaten Batanghari. Dalam Pasal 5 dijelaskan dengan tegas, lembaga adat berfungsi menyelesaikan *Silang Sengketa* di Kabupaten Batanghari sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sejumlah permasalahan berupa sengketa yang terjadi di Batanghari diselesaikan lembaga adat dan tak langsung penyelesaian hukum pidana di kepolisian. Kasus sengketa yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas,

pembunuhan, perselingkuhan yang korban dan pelaku berasal dari etnis yang berbeda. Kondisi ini rawan pergesekan di tengah masyarakat dan harus cepat diatasi. Kalau penyelesaian secara pidana saja, potensi konflik berkepanjangan semakin besar karena biasanya menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Ada yang merasa menang dan ada yang merasa rugi.

Dalam mengatasi konflik antar etnis dan agama, pemerintah sudah membentuk berbagai forum. Sebut saja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FPKPM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Forum ini diharapkan bisa mendeteksi secara dini isu-isu yang terjadi agar bisa diambil langkah kongkrit yang efektif. Anggota beberapa forum-forum ini terdiri dari berbagai etnis dan berbagai agama dan forum lain adalah pejabat dalam pemerintahan kabupaten.

C. PENUTUP

Penduduk Kabupaten Batanghari, Jambi terdiri banyak etnik, diantaranya Melayu, Minang, Jawa, Tionghoa, dan Banjar. Sejumlah faktor penyebab terjadinya migrasi awal penduduk ke Batanghari, antara lain dibukanya perkebunan karet, tambang minyak bumi, adanya program transmigrasi. Belakangan baru adanya penduduk pendatang karena membuka usaha di Batanghari atau juga karena lulus pegawai negeri sipil.

Hubungan antar etnik di Batanghari berjalan baik dan nyaris tidak pernah ada konflik antar etnik. Ada beberapa strategi dalam menciptakan harmonisasi masyarakat yang multi etnik. Yakni, memberdayakan kearifan lokal. Kearifan lokal Melayu Jambi menjadi perekat hubungan antar etnik di Batanghari.

Terjadinya sengketa antara masyarakat yang berbeda etnik biasanya diselesaikan secara adat dan bukan hanya hukum pidana melalui pengadilan. Kedudukan adat Melayu ditempatkan di atas

⁷ Wawancara dengan Suhaili, Kasi Tradisi Dikbud Batanghari di Muara Bulian di Muara Bulian.

semua adat dari etnis yang ada. Peranan adat Melayu Jambi menjadi pelindung bagi adat yang lain. Adat Melayu Jambi juga menjadi penengah dalam setiap konflik antar etnik.

Masyarakat Batanghari juga memiliki kearifan lokal. Ada konsep kehidupan yang jadi motto daerah, yakni Serentak Bak Regam. Konsep ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat seiya sekata selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah.

Keberadaan Lembaga Adat Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari juga berpengaruh besar dalam menjaga kerukunan. Di dalam lembaga adat itu tak hanya ada etnik Melayu, tapi juga bergabung etnik pendatang. Keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama juga berdampak besar. Pengurusnya juga lintas etnik.

DAFTAR SUMBER

- Andaya, Barbara Watson. 2016. *Hidup Bersaudara Sumatra Tenggara Pada Abad XVII dan XVIII*. Jogjakarta: Penerbit Ombak.
- Lindayanti, T. Noor, Junaidi, dan Ujang Hariadi. 2013. *Jambi Dalam Sejarah 1500-1942*. Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi.
- Lindayanti, Witrianto, dan Zulqayyim. 2010. *Harmoni Kehidupan di Provinsi Multi Etnis: Studi Kasus Integrasi Antara Penduduk Pendatang dan Penduduk Asli di Jambi*. Padang: Laporan Penelitian Universitas Andalas.
- Lindayanti & Zaiyardam. 2015. Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Plural: Jambi 1970-2012. *Jurnal Paramita* Vol 25, No 2.
- Mantra, Ida Bagoes. 1999. *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Ju Lan, Thung. 2010. *Klaim, Kontestasi dan Konflik Identitas: Lokalitas vis-à-vis Nasionalitas*. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia.
- Rahim, Arif. 2017. *Jambi: Daerah Rantau Minangkabau*. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*.
- Sairin, Sjafriz, 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastro Wijono, Radjimo. 2012. *Kabupaten Batanghari: Transformasi Kota Tradisional dan Ikatan Politis Kerinci dalam Kota-Kota di Sumatra, Enam Kisah Kewarganegaraan dan Demokrasi*. Jakarta: The Interseksi Foundation.
- Scholten, Elsbeth Locher. 2008. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial (Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Jakarta: Banana KITLV, 2008.
- Syuhada, Siti, dkk. 2017. *Sejarah Kota Modern Masa Kolonial Belanda: Studi Kasus Kota Tua di Muaro Tembesi Batanghari*. *Jurnal Titian*.
- Sya'roni, 2015. *Interaksi Sosial Antar Kelompok Etnis (Studi Kasus di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi*. *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 20 No.1.
- <https://jambi.antaranews.com>, 31 Oktober 2012.
- Wawancara dengan Joko Ismanto, Kasi Kesenian Dikbud Batanghari Wawancara dengan Suhaili, Kasi Tradisi Dikbud Batanghari Wawancara dengan Bakhtiar Oedin, Tokoh Masyarakat Muara Tembesi

PEWARISAN UPACARA *KUHI SEKO* MASYARAKAT KERINCI – JAMBI

INHERITANCE OF KUHI SEKO RITUAL IN KERINCI COMMUNITY

Sean Popo Hardi

Penggiat Budaya Jambi

popohardi@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research discusses the inheritance process of oral tradition of kuhi seko ritual in Kerinci community in Jambi. Kuhi Seko ritual is a ritual to cleanse the village and people's heirlooms passed by the ancestor. The data collecting method are observation, interview and library study. This research found that kuhi seko ritual's structure consists of mendingin as opening act, paropatoh iyo-iyo, tari iyo-iyo and brence' as the main ritual, and ico pake adat as closing act. For Kerinci community, kuhi seko ritual acts as teaching tool, supervising tool, legalization of traditional institution and entertainment. The inheritance process of this ritual is done directly and indirectly. Direct inheritance is based on matrilineal lineage in mendingin. Indirect inheritance is found on tari iyo-iyo and brence'.

Keywords : *Kuhi Seko, Ritual, Inheritance, Mnemonic Device, Formula*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas proses pewarisan tradisi lisan upacara *kuhi seko* pada masyarakat Kerinci di Jambi. Upacara Kuhi Seko adalah upacara yang dilakukan untuk membersihkan desa serta harta pusaka peninggalan nenek moyang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa struktur upacara *kuhi seko* terdiri dari *mendingin* sebagai pembuka, *paropatoh iyo-iyo, tari iyo-iyo* dan *brence'* sebagai isi serta *ico pake adat* sebagai penutup upacara. Bagi masyarakat Kerinci, upacara *kuhi seko* berfungsi sebagai alat pendidikan, alat pengawasan, pengesahan lembaga adat dan hiburan. Proses pewarisan upacara *kuhi seko* dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pewarisan secara langsung berdasarkan keturunan ibu (matrilineal) yang terdapat dalam *mendingin*. Pewarisan secara tidak langsung terdapat dalam *tari iyo-iyo* dan *brence'*.

Kata kunci: *Kuhi Seko, Upacara, Pewarisan, Mnemonic Device, Formula*

A. PENDAHULUAN

Upacara *kuhi seko* merupakan upacara adat terbesar masyarakat Kerinci. Tujuan dilaksanakan *kuhi seko* yaitu untuk menghormati leluhur yang telah meninggalkan warisan budaya

berupa benda pusaka serta gelar adat kepada generasi sekarang. Benda-benda pusaka tersebut dapat berupa tanduk kerbau, keramik, pedang, surat incung, rambut, dan beberapa helai kain yang disimpan dalam peti. Benda pusaka yang disimpan dalam peti, kemudian diletakkan di loteng *rumah gdea*⁸. Adapun gelar adat diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu⁹.

Asal-usul upacara *kuhi seko* belum jelas kapan pertama kali dilaksanakan. Kamaludin¹⁰ berpendapat, upacara *kuhi seko* sudah ada sejak tahun 1800-an. Selama ia menjabat sebagai *Depati Anum*, ia sudah lima kali memimpin pelaksanaan upacara *kuhi seko*. Dalam ingatannya, jauh sebelum itu *kuhi seko* sudah ada sejak masuknya Islam ke Kerinci pada abad 14-15 M. Bahkan sebelum masuknya Islam, Kerinci saat itu dipengaruhi oleh kepercayaan Animisme dan Hindu. Pada saat itu pula diperkirakan upacara *kuhi seko* sudah ada.

Awalnya, upacara *kuhi seko* digelar setiap tahun yaitu setelah panen. Dalam perkembangannya, upacara *kuhi seko* digelar setiap beberapa tahun sekali. Di desa Tanjung Pauh Mudik tempat penelitian ini dilakukan, upacara *kuhi seko* digelar setiap lima tahun sekali. Beberapa

desa di Kerinci menggelar upacara *kuhi seko* setiap tiga, empat bahkan sepuluh tahun sekali. Pelaksanaan *kuhi seko* tergantung atas kesepakatan bersama para pemuka adat. Tidak ada waktu yang pasti untuk menggelar upacara *kuhi seko*.

Tidak menentunya kapan upacara *kuhi seko* ini digelar di tiap desa membuat keberadaan upacara ini sulit ditemui. Perubahan sosial pada masyarakat Kerinci menyebabkan upacara ini semakin tergerus. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi juga mempengaruhi kepercayaan yang berbaur “mistik” ini mulai ditinggalkan dan berganti dengan kepercayaan yang dianggap lebih “rasional”. Selain itu, yang menyebabkan upacara ini mulai ditinggalkan karena perubahan sistem mata pencaharian dari masyarakat petani ke masyarakat pekerja. Hal itu menyebabkan upacara yang berhubungan dengan masyarakat agraris ini pun semakin dilupakan oleh pemiliknya.

Masyarakat Kerinci juga memiliki upacara lain selain upacara *kuhi seko*. Upacara tersebut antara lain: upacara *ngayun luci* (lahiran), upacara *minta ahi hujan* (minta hari hujan), upacara *alau kumou* (turun kesawah), upacara *nalak ulu tahun* (awal tahun), upacara *mandi balimau* (mandi jeruk), upacara *ngagah harimau* (memanggil harimau), dan upacara perkawinan. Dari sekian banyak upacara adat yang ada di Kerinci, upacara *kuhi seko* termasuk upacara terbesar yang dilakukan oleh masyarakatnya. Saat ini upacara *kuhi seko* terancam dari kepunahan.

Upacara *kuhi seko* terdiri dari: *pertama*, satu atau dua hari sebelum upacara dilaksanakan, salah satu *dayang* (dukun) bersama pemuka adat mengantarkan sesajen kepada *ninek tigo beradoik*¹¹ ke atas bukit. *Kedua*, dukun

⁸ Rumah Gdea adalah sebutan untuk rumah tempat disimpannya harta pusaka

⁹ Sistem kekerabatan masyarakat Kerinci menganut *sistem matrilineal* yaitu garis keturunan berdasarkan Ibu kepada anak betinonya. *Anak Betino* merupakan sebutan untuk anak perempuan pewaris harta pusaka. Anak betino dalam bahasa Indonesia berarti anak perempuan.

¹⁰ Kamaludin adalah pemimpin adat Desa Tanjung Pauh Mudik sejak tahun 2000. Ia bergelar Depati Anum.

¹¹ Ninek tigo beradoik adalah makhluk halus yang menyerupai Harimau serta

perempuan yang disebut *dayang* melakukan ritual *mendingin* sebelum acara dimulai. *Ketiga*, penurunan benda pusaka dari atas loteng dan disambut dengan tarian iyo-oyo sambil menyanyikan *paropatoh iyo-oyo*¹². Selanjutnya, pelantikan serta pembacaan sumpah *karang setio*¹³ oleh Depati yang baru dilantik. *Terakhir*, adalah pembacaan *ico pake adat* (pidato adat).

Dalam upacara *kuhi seko* ada dua acara yang sangat penting, yaitu penurunan benda-benda pusaka serta penobatan gelar, apakah gelar *Depati*, *Pemangku* atau *Permenti*¹⁴. Sayangnya, kedua acara penting tersebut tidak lagi terlihat dalam upacara *kuhi seko* yang diselenggarakan oleh masyarakat desa Tanjung Pauh Mudik saat penelitian ini dilakukan. Hal yang berkaitan dengan sesajian dan kepercayaan memuja benda pusaka sengaja ditanggalkan. Hal tersebut menimbulkan berbagai pertentangan dari berbagai pihak. Beberapa orang menganggap bahwa rangkaian acara itulah yang penting dilakukan sebagai bentuk rasa penghormatan kepada nenek moyang.

Upacara *kuhi seko* memiliki berbagai keunikan. Salah satu keunikan terdapat dalam *ico pake adat*, *tarian iyo-oyo*, *paropatoh* dan *brence*. *Ico pake adat* merupakan peraturan yang ditetapkan bersama kepada masyarakatnya. Salah satu fungsi *Ico Pake Adat* yaitu untuk menjaga areal persawahan agar tidak menyempit karena ancaman pemukiman yang dibangun di atas areal persawahan. Peraturan yang terdapat dalam *ico pake adat* tersebut selalu diperbaharui dalam setiap kali upacara *kuhi seko* digelar.

Apabila upacara *kuhi seko* tidak lagi digelar, maka fungsi upacara ini tidak lagi bekerja. Benda pusaka tidak lagi dipercaya masyarakat Kerinci sebagai nenek moyang mereka.

dianggap keramat sehingga terjadi jual beli benda budaya secara besar-besaran. Beberapa nilai sejarah dan huruf *incung* yang terdapat di beberapa benda pusaka tidak lagi dapat kita jumpai. Tari iyo-oyo dan *paropatoh iyo-oyo* akan kehilangan panggungnya. Kesenian tersebut hanya ada dalam upacara *kuhi seko* yang digunakan sebagai tarian dan nyanyian kesetiaan serta penghormatan kepada leluhur. Misalnya seperti yang terlihat dalam petikan *paropatoh iyo-oyo* berikut:

Iyo-oyo

Bukembang lapek bukembang tika

Bupiok gaade butungku jare

Menunggu si ranak jantan

Munantek rajo lah dari jaoh

Ituh kerjo ranak butino

Sejak dulou sampe sikara

Paropatoh ini mengandung makna kesetiaan seorang anak perempuan (*anak betino*) kepada anak laki-laki (*anak jantan*) dan raja yang pergi merantau.

Nurjai (wawancara: 24/1/2016) meyakinkan, kalau upacara *kuhi seko* tidak dilaksanakan maka desa menjadi tidak tentram, banyak terjadi huru – hara di masyarakat. Benda pusaka yang berada di rumah adat akan menunjukkan tanda-tanda bila masyarakat belum melaksanakan upacara *kuhi seko*. Tanda-tanda tersebut berdasarkan mitosnya akan mengeluarkan bunyi aneh. Masyarakat percaya bahwa kekuatan yang berasal dari benda-benda pusaka tersebut mampu menjaga desa dari gangguan roh jahat.

Penelitian ini memilih upacara *kuhi seko* di desa Tanjung Pauh Mudik sebagai bahan penelitian. Sebelum tahun 2000-an upacara *kuhi seko* masih sangat kental dengan unsur magis. Namun saat ini, upacara *kuhi seko* telah berubah bentuk yang menurut Schechner (2003: 130) sebagai perubahan dari *efficacy* (ritual) ke *entertainment* (pertunjukan). Unsur magis dan transenden saat ini berganti hanya sekadar hiburan dan hanya untuk

¹² Merupakan jenis puisi lama

¹³ Sumpah jabatan

¹⁴ Menurut Zakaria (1984: 177) dalam buku Tambo Kerinci

melaksanakan kewajiban tradisi dari nenek moyang saja. Padahal, dahulu upacara ini merupakan bagian dari hidup dan kehidupan warga desa yang terkait dengan asal-usul desa.

Sudah menjadi tradisi bahwa setiap upacara *kuhi seko* menyembelih *kerbau seekor*, dan menyiapkan *beras seratus* artinya desa harus menyediakan kerbau dan beras sebagai syarat untuk menggelar upacara tersebut. Kerbau dan beras nantinya akan dimasak dan dimakan bersama oleh seluruh warga saat upacara berlangsung. Apabila desa tidak mampu menyediakan kerbau dan beras, maka *kuhi seko* tidak bisa dilaksanakan. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat meninggalkan upacara terbesar di Kerinci karena faktor biaya.

Dari kondisi teks tradisi lisan upacara *kuhi seko* yang semakin jarang digelar dan besarnya biaya untuk menggelar upacara tersebut, bagaimana bisa desa Tanjung Pauh Mudik masih dapat menggelar upacara *kuhi seko*. Padahal, berbagai faktor penghambat keberlangsungan tradisi lisan seperti yang menimpa desa lain juga terjadi di desa Tanjung Pauh Mudik. Oleh sebab itu, penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana proses pewarisan upacara *kuhi seko*. Topik ini perlu dikaji sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan upacara *kuhi seko* di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tradisi lisan dengan pendekatan deskripsi etnografi. Etnografi menurut Sadewo (2003:181) adalah pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok, masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung (*participant observer*) dengan melibatkan diri dalam upacara *kuhi seko* yang digelar di tengah komunitas pendukungnya di desa Tanjung Pauh Mudik, Kerinci.

Selama penelitian lapangan, peneliti juga menulis catatan lapangan. Untuk memperdalam temuan, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan. Wawancara dilakukan dengan wawancara terbuka yang subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu (Patton dalam Moleong, 1998:137). Peneliti melakukan wawancara terhadap 13 orang informan secara bertahap:

No	Nama	Umur	Peran
1	Kamaludin	70	Depati
2	Nisnani	63	Warga
3	Nurjai	78	Dayang
4	Umar	60	Rio Perang
5	Indratno	44	Budayawan
6	Siska	32	Seniman
7	Edi	38	Warga
8	Sahibul Sami	68	Ketua Kuhi
9	Juwita	38	Seniman
10	Marlina	42	Warga
11	Nurwatni	45	Calon Dayang
12	Geandra	21	Warga
13	Sabila	11	Warga

Pengumpulan data dilengkapi dengan metode studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari literatur-literatur relevan yang mendukung penelitian. Informasi tersebut berguna memperdalam teori dan konsep untuk membantu menganalisis masalah penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan perekaman audio-visual untuk mendokumentasikan seluruh proses upacara *kuhi seko*. Rekaman digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis masalah penelitian sekaligus alat bantu menguji keabsahan data.

Rekaman yang diperoleh kemudian ditranskripsikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian dilakukan kategorisasi data untuk

selanjutnya dilakukan penafsiran dan analisis data.

Adapun penelitian mengenai upacara *Kuhi Seko* masyarakat Kerinci pernah dilakukan oleh Julizar M (2014). Dalam penelitiannya, ia melihat pengaruh Lembaga Adat dalam melaksanakan Kuhi Seko, yang ternyata belum berdampak banyak dalam hal membina moral generasi kehidupan beragama. Kemudian Arisa dkk (2013) dalam penelitiannya melihat fungsi *Kuhi Seko* bagi masyarakat Desa Lolo Gedang-Pasar Kerman. Ia melihat alasan kenapa *Kuhi Seko* masih dilaksanakan hingga kini, ternyata karena tidak bertentangan dengan Islam dan karena pesan dari nenek moyang. Selain itu, ia juga melihat fungsi kuhi seko sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada nenek-moyang dan mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Suswita dkk (2013) melalui studi etnobotani melihat adanya upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan sebagai sesajian yang digunakan dalam upacara Kuhi Seko yaitu karena adanya “rimbo larangan” dan “rimbo sakti. Selain itu, upaya pelestarian tumbuhan dilakukan di kebun, ladang dan sekitar pekarangan rumah warga.

Adapun penelitian lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (1995) dalam laporan penelitiannya tentang dimensi tradisi lisan dalam upacara *Kwangkay*: Puncak Upacara Kematian Suku Dayak Benuaq. Ia melihat bagaimana struktur dan teks yang dinyanyikan dalam upacara *Kwangkay* yang didendangkan oleh *penyantangih* yang di dalamnya berisi kumpulan adat kebiasaan, konvensi, peraturan, undang-undang, nilai-nilai moral dan etika masyarakatnya.

Penelitian lain yang terkait dengan upacara adat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rossler (2009: 213), upacara yang berhubungan dengan struktur politik komunitas di dataran tinggi Goa, Sulawesi Selatan. Juga penelitian yang

dilakukan oleh Birgit Rottger dan Rossler (2009) dengan judul “Pembagian Tanggung Jawab Aspek-Aspek Jender dan Kewenangan dalam Masyarakat Makassar” juga dalam upacara yang dihelat oleh masyarakat Goa. Dalam penelitian ini tentunya memiliki perumusan masalah yang berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti lain yakni melihat bagaimana proses pewarisan terjadi dalam upacara adat kuhi seko.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk pewarisan *Kuhi Seko* serta fungsinya bagi masyarakat pemiliknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian tradisi lisan khususnya yang terkait dengan pewarisan dan fungsi upacara adat. Penelitian ini dapat pula memperkaya kajian dengan objek tradisi lisan di Kerinci. Juga dapat menjadi pijakan bagi peneliti lain. Penelitian ini dapat pula memberi pertimbangan bagi pembuat kebijakan kebudayaan.

B. HASIL DAN BAHASAN

Kerinci merupakan daerah dataran tinggi satu-satunya yang ada di Provinsi Jambi. Akses menuju Kerinci dari Kota Jambi sekitar delapan hingga sepuluh jam perjalanan darat. Hal itu karena letaknya berada paling Barat di Provinsi Jambi. Perjalanan darat dari Jambi maupun Padang menuju Kerinci berkelok-kelok melewati terjalnya bukit barisan tempat hidup dan berkembangnya berbagai tradisi dan ritual.

Nama Kerinci berasal dari bahasa tamil yaitu *kurintji*, yang merupakan nama bunga yang tumbuh di daerah pegunungan India Selatan. Sedangkan Zakaria (1984: 14) berpendapat bahwa nama Kerinci diberi nama oleh pendatang di zaman dahulu. Pendatang itu memberikan nama “kerin” artinya hulu dan “ci” yang berarti sungai. Jadi, Kerinci dapat diartikan suatu tempat yang berada hulu sungai. Oleh karena itu, orang Kerinci disebut sebagai

orang-orang yang mendiami huluan sungai Batang Merangin.

Kerinci memiliki slogan yang populer yaitu “Sakti Alam Kerinci”. Hal itu karena Kerinci memiliki banyak sekali tinggal budaya khususnya yang berbau mistik. Rimbo (hutan) larangan adalah satu kepercayaan yang masih terjaga. Rimbo tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan dalam menggelar upacara adat seperti upacara *kuhi seko*. Beberapa desa tergantung dengan keberadaan rimbo tersebut sebagai penghasil tumbuh-tumbuhan yang digunakan dalam upacara tersebut.

Upacara *kuhi seko* merupakan adat yang dipimpin oleh *depati ninik mamak* yang bertujuan untuk membersihkan desa dari gangguan roh jahat. Upacara ini telah berlangsung dari generasi ke generasi. Dalam proses pelaksanaannya masih terlihat bahwa upacara ini merupakan warisan dari kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat dahulu. Sehingga upacara *kuhi seko* yang terlihat saat ini merupakan buah dari upaya menjaga proses pewarisan suatu tradisi.

juga terdapat dalam peristiwa yang langsung dan diserahkan sepenuhnya kepada kesempatan yang dimiliki oleh para pewaris (Vansina, 1961: 31). Proses pewarisan bisa berupa pakem yang baku dari nenek moyang, bisa pula berupa pengulangan variasi yang diciptakan sendiri oleh calon pewaris setelah hasil proses pembelajarannya terhadap tradisi yang ditekuninya.

Untuk mewariskan tradisi diperlukan metode dan teknik. Sebagaimana yang dijelaskan Vansina yakni dapat dilakukan dengan cara memilih kepada siapa tradisi ini kemudian dipercayakan, atau dengan cara latihan terkontrol dari setiap pertunjukan tradisi yang diikuti calon pewaris. Upacara *kuhi seko* di desa Tanjung Pauh Mudik tempat penelitian ini berlangsung memiliki metode dan cara tersendiri dalam mewarisi tradisi yaitu anak betino sebagai calon pewaris.

Proses pewarisan juga berkaitan dengan alat bantu mengingat (*mnemonic devices*). Sweeney (1987: 117-119) menjelaskan *mnemonic devices* terdiri dari bunyi, kata atau peristiwa yang digunakan



Gambar 1. Peta Kabupaten Kerinci.

Sumber: <http://members.virtualtourist.com/m/3e284/66a/>

Proses pewarisan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan tradisi lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pewarisan tradisi lisan dapat mengikuti aturan yang pasti, tetapi

untuk mengungkapkan gagasan. Sedangkan Tuloli (1990: 24) menjelaskan bahwa pola formula menjadi alat mengingat yaitu dengan cara mengingat frasa-frasa yang pencerita dengar dari pencerita lain.

Oleh karena itu, setiap pertunjukan menghasilkan ciptaan atau gubahan baru dari proses mengingat (*remembering*) bukan menghafal (*memorization*).

Penelitian ini menggunakan teori pewarisan menurut Lord yang terangkum dalam buku *The Singer of Tales* (1971: 22-26). Menurutny, ada tiga tahap pewarisan (pembelajaran) yang dilalui oleh calon guslar. *Tahap pertama*, terjadi saat calon penutur *epic* yang dinyanyikan melihat dan mendengar penyanyi terkenal di lingkungannya sehingga ia merasa tertarik dan berminat untuk mempelajarinya. Ketertarikan dan keberminatan inilah yang menjadi kunci bagi proses pewarisan selanjutnya. Pada tahap ini, calon penutur (*neophyte*) belajar lagu-lagu yang didengarnya dengan cara sering menghadiri setiap pertunjukan. Tahap ini terjadi ketika calon penutur tersebut berusia sepuluh atau dua belas tahun.

Tahap kedua adalah tahap terjadinya proses *imitasi* yaitu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti apa yang dilihat oleh calon penutur dari setiap pertunjukan. Proses *imitasi* dapat berupa peniruan dalam teknik bermain instrument maupun mempelajari *formula* dan *tema* yang dipakai oleh penutur senior. Calon penutur (pewaris) meniru dan menciptakan sendiri formula dan tema yang bisa dimanfaatkannya dalam proses penciptaan dalam pertunjukan. Tahap kedua ini berakhir ketika calon penutur sudah mampu untuk membawakan tradisi yang dipelajarinya di hadapan penonton. Namun demikian, proses belajar tetap terus dilakukan pada tahap ini.

Tahap ketiga adalah tahap akhir proses belajar seorang penyanyi epic. Tahap ini merupakan tahap puncak dalam pembelajaran yang ditandai dengan mampu mempraktekkan sekaligus mengubah komposisi lewat ingatannya. Dalam proses pewarisan semacam ini tidak melibatkan penghafalan sebuah teks, melainkan mengingat *komposisi*, *formula* dan *tema*. Meski demikian, penyanyi

(pewaris) tidak pernah berhenti dalam proses mengumpulkan (*accumulating*), mengkombinasikan (*recombining*) dan renovasi (*remodeling*) formula dan tema agar pertunjukan yang diciptakan lebih sempurna dan kaya.

Proses pewarisan juga berkaitan dengan bagaimana teori formula diserap oleh pewaris. Menurut Lord (1971: 30) formula adalah kelompok kata yang secara teratur digunakan dalam kondisi metris (irama) yang sama untuk mengekspresikan satu ide pokok. Adapun Achadiati (2008: 205) mengatakan bahwa formula adalah *piranti mnemonic* yang membantu orang untuk menemukan kembali pikiran yang tersimpan dalam ingatan, di antaranya rima, aliterasi, asonansi, paralelisme dan struktur-struktur tetap.

1. Pewarisan dalam *Mendingin*

Konsep matrilineal membuat pewarisan upacara *kuhi seko* diwarisi secara langsung yaitu berdasarkan garis keturunan ibu kepada anak atau saudara perempuannya. Dayang (dukun perempuan) akan mewarisi kemampuan *mendingin* hanya kepada keturunannya sendiri. Masyarakat di luar keturunan anak perempuan (anak betino) tidak akan bisa menjadi seorang dayang. Keturunan dari pihak perempuan bisa berarti anak, keponakan maupun sepupu perempuan dari anak perempuan.

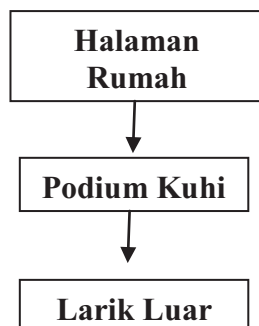
Proses pewarisan tahap pertama menurut Lord (1971) dimulai ketika calon pewaris sewaktu masa kecilnya ia memiliki ketertarikan kepada *kuhi seko* dan melihat langsung pertunjukan. Nurwatni (45th) merupakan calon pewaris yang mengikuti setiap gelaran upacara *kuhi seko* yang diadakan di desa Tanjung Pauh Mudik. Sejak kecil ia terlibat dan selalu ikut dalam proses pelaksanaan *kuhi seko* dan selalu memperhatikan proses tersebut dengan baik.

Dari proses belajar sejak kecil itulah kemudian Nutwatni dipersiapkan sebagai calon dayang untuk memimpin

upacara *kuhi seko* selanjutnya saat nenek Nurjai (78th) tidak mampu lagi memimpin upacara tersebut. Menurut nenek Nurjai (wawancara, 25/01/2016) syarat untuk menjadi dayang adalah dia harus memiliki keturunan dukun juga. Dia harus berasal dari keturunan *anak betino* atau keluarga perempuan yang lain. Jadi, tidak boleh diwarisi kepada orang di luar keturunan *anak betino*.

Ketertarikan Nurwatni pada upacara *kuhi seko* sudah sejak dulu. Menurutny, sudah sejak kecil ia merasa bahwa di dalam tubuhnya sudah dialiri darah dukun. Ia tidak takut ketika berhadapan dengan hal yang berbau mistik. Banyak orang sebaya ia waktu itu takut dan tidak mau bersinggungan dengan yang berbau mistik. Bahkan orang tersebut cenderung tidak mempercayai hal yang demikian.¹⁵ Untuk dapat mewarisi tradisi *kuhi seko*, Nurwatni belajar dengan cara mengikuti setiap langkah Nenek Nurjai saat upacara *kuhi seko*.

Jika tradisi lisan dalam bentuk naratif memiliki formula berupa sekelompok kata yang mesti diingat dan selalu di ulang dalam proses pembelajarannya, maka dalam ritual *mendingin*, Nurwatni berusaha belajar mengingat “peristiwa” yang sering dilihatnya dalam gelaran upacara *kuhi seko*. Peristiwa tersebut terdiri dari urutan ritual *mendingin* yang terlihat dalam bagan berikut.



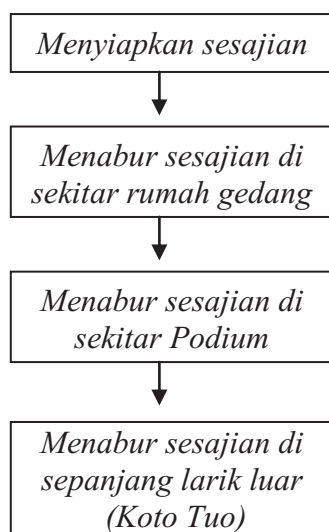
Skema 1. Tempat-tempat ritual mendingin

Skema di atas merupakan formula proses *mendingin*. Formula tersebut dimulai dari *rumah gedang* dan halaman di sekitarnya. Kemudian dilanjutkan ke podium utama tempat *Depati Ninik Mamak* serta Bupati duduk dan memberikan kata sambutan. Terakhir adalah di sepanjang *larik luar* (lorong). Urutan tersebut dari generasi ke generasi memiliki urutan yang sama dan tetap.

Mendingin diawali dengan menyiapkan sesajian pada pukul 05.30 WIB atau setelah selesai sholat Subuh. Dengan bacaan “bissmillah”, dayang bersama dengan anak betino (Nurwatni) melakukan *mendingin* dengan cara menyiram dan menghamburkan sesajian yang telah disiapkan. Siraman tersebut dimulai dari menyiramkan sesajian ke rumah gedang. Baik di kiri, di tengah maupun di kanan rumah gedang. Hal tersebut dilakukan agar rumah gedang yang dipakai sebagai panggung upacara *kuhi seko* bersih dan suci.

Mendingin kemudian dilanjutkan di sekitar podium. Tidak ada satu ruang pun yang tidak disiram menggunakan sesajian oleh *dayang* yang melakukan ritual *mendingin*. Bahkan sampai kesela-sela terkecil dari podium sekalipun. Kursi yang terletak di atas podium juga ikut merasakan siraman dengan air yang telah dicampurkan beras dan bunga-bunga itu. Terakhir, *mendingin* dilanjutkan di sepanjang larik yang digunakan sebagai panggung upacara *kuhi seko*.

¹⁵ Wawancara, 27/01/2016



Skema 2. Alat ingat berupa peristiwa

Skema di atas merupakan urutan belajar untuk mengingat “peristiwa” dalam ritual mendingin. Urutan skema tersebut telah diwarisi dari waktu ke waktu dan memiliki pakem yang tetap. Nurwatni sebagai calon pewaris saat ini sudah sangat hafal mengenai tradisi *mendingin* dalam upacara *kuhi seko*. Dalam ingatannya sudah lima kali *kuhi seko* yang diikutinya. Oleh sebab itu, Nurwatni menjadi pewaris langsung karena ia termasuk keturunan perempuan pewaris harta pusaka.

2. Pewarisan dalam Tari Iyo-iyu

Tari iyo-iyu merupakan tarian mistik yang dipakai untuk memuja dan menghormati leluhur sekaligus melegitimasi kepemimpinan raja yang memimpin rakyatnya. Tarian iyo-iyu sudah ada sejak dahulu yang dipentaskan oleh perempuan-perempuan tua. Gerakan tari iyo-iyu merupakan tiruan dari kegiatan menumbuk padi oleh masyarakat agraris seperti Kerinci. Proses penciptaan tarian tersebut terjadi karena pada zaman dahulu manusia menciptakan seni dari manifestasi keakraban manusia dengan alam mikrokosmis dan keseharian manusia (Wardhana, 1984: 24).

Seni merupakan peniruan keseharian namun dituangkan dengan teknik di luar keseharian. Lono

Simatupang (2016: 24) menyebut hal tersebut sebagai “teknik pesona”, yaitu seni mampu membangkitkan efek pesona seperti dalam tarian iyo-iyu. Teknik pesona tersebut terlihat dari pakaian penari iyo-iyu yang memakai baju adat lengkap dari bawah sampai kepala. Hanya saja tidak memakai alas kaki. Kaki dibiarkan terbuka. Kepala menggunakan penutup kepala berupa *tengkuluk* (semacam jilbab). Pakaian menggunakan setelan rok dan baju berwarna merah.

Proses pewarisan tarian ini dengan cara tidak langsung artinya siapa pun boleh belajar tarian ini. Proses pewarisannya dilakukan dengan cara belajar gerakan tari. Adapun komposisi gerakan tari iyo-iyu adalah berupa gerakan tangan, badan dan kepala. Gerakan tangan, kepala dan kaki dilakukan secara serempak saat memasuki larik yang baru. Gerakan tersebut seperti, kedua tangan berada di kanan badan, badan membungkuk, kepala dimiringkan ke kiri, kepala sambil mengangguk, kaki Kanan ke depan, badan naik turun dan kaki kiri di belakang sambil ditekuk.

Gerakan tangan ke kiri dan ke kanan menjadi *mnemonic device* (pengingat) tari iyo-iyu. Tarian ini diiringi oleh syair *paropatoh iyo-iyu* yang dinyanyikan. Gerakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Posisi tangan ke kanan menyimbolkan kebaikan, sedangkan ke kiri menyimbolkan kejahatan. Gerakan ke kiri dan ke kanan tersebut berhubungan dengan kosmologi masyarakat Kerinci. Mereka percaya bahwa apa yang diciptakan di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Misalnya, ada baik-buruk, tua-muda, *anak jantan* - *anak batino*.

Penari berjumlah sekitar 40-an orang. Komposisi tarian iyo-iyu pun dari awal-tengah-akhir selalu berubah. Hal ini karena semakin lama gerakan penari semakin cepat dan nyanyian juga semakin kencang. Belum lagi ditengah-tengah tarian, dukun menebarkan asap kemenyan menambah kesemrawutan posisi dan

komposisi tari. Asap yang mengepul dari kemenyan yang dibakar juga membuat penari semakin bersemangat, bahkan sampai ada yang kerasukan menurut bahasa setempat disebut *keselek*.

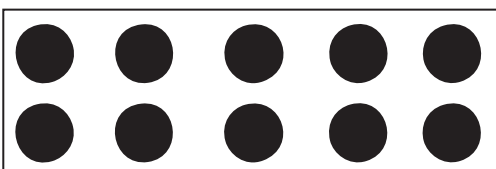


Gambar 2.

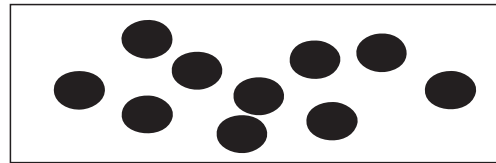
Gerakan tari merupakan formula dalam proses pewarisan dengan cara belajar.
Foto: Rinto

Menurut Juwita (wawancara, 10/05/2015), awalnya posisi penari berbaris dua baris secara teratur memanjang sepanjang halaman, namun lama kelamaan posisi penari sudah tidak menentu lagi. Apalagi kalau sudah dihidupkan kemenyan, posisi sudah tidak tentu arah lagi. Penari satu dengan penari lain akan saling melihat agar penari semakin semangat apalagi ditambah dengan hentakan musik dan nyanyian yang tinggi.

Komposisi yang sering dipakai dan sudah menjadi pakem dalam tarian iyo-oyo adalah komposisi melingkar atau berbaris dari awal menari hingga pertengahan tarian. Komposisi pun semakin lama semakin berubah menjadi acak-acakan setelah sampai ditengah tarian hingga selesai tarian. Hal tersebut dikarenakan penari sudah mencapai keadaan trance sehingga tidak sadar dengan posisinya masing-masing. Komposisi penari terlihat dalam skema berikut:

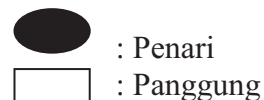


Komposisi Awal hingga Tengah Tarian: Dua Baris



Komposisi Tengah hingga Akhir Tarian: Acak-acakan

Keterangan:



Selama peneliti menyaksikan langsung, penari tidak saja berasal dari golongan orang tua, melainkan juga melibatkan remaja yang masih duduk di bangku SMP. Menurut Siska¹⁶ (pelatih tari) mereka dilibatkan agar pemuda pemudi mengetahui dan bisa menari tari iyo-oyo karena tarian ini tidak bisa disaksikan pada pertunjukan lain selain di upacara *kuhi seko*. Pelibatan pemuda ini menjadi awal dari proses pewarisan tari iyo-oyo.

3. Pewarisan dalam *Brence'*

Beladiri yang menggunakan pedang sekaligus gerakannya seperti menari ini disebut *brence'*. Tradisi ini diwarisi secara tidak langsung bukan berdasarkan keluarga tetapi dengan cara belajar. Menurut Umar¹⁷, pewarisan *Brence'* dilakukan dengan cara belajar. Menurutnya, apabila seseorang tidak belajar silat maka gerakannya akan kelihatan kaku. Di tambahkannya lagi bahwa siapa pun boleh belajar silat ini dengan guru silat mana pun. Untuk belajar *brence'* tidak harus berdasarkan keturunan langsung atau keluarga.

Silat tarian ini dibuka dengan langkah dua belas sebagai salam pembuka. Langkah tersebut dilakukan dengan cara mengambil pedang yang diletakkan di

¹⁶ Wawancara, 9 Mei 2015

¹⁷ Wawancara, 11 Mei 2015

bawah lalu memutar-mutarkan pedang tersebut layaknya orang yang sedang menari. Tangan yang tidak memegang pedang, jari-jarinya dilentikkan atau digerak-gerakan sehingga persis seperti tarian. Masyarakat menyebutnya sebagai tarian harimau (*tuan dahek*).

Gerakan untuk bertahan terhadap serangan petarung lain merupakan inti dari tarian silat ini. Hal tersebut terlihat dari posisi pedang saat dimainkan. Adapun berbagai posisi pedang sebagai cara untuk bertahan saat bertarung seperti yang terlihat pada gelaran upacara *kuhi seko 10 Mei 2015* sebagai berikut:

1. *Pedang di Depan – Tangan ke belakang.*
(Gerakan ini untuk menunggu lawan dan posisi siap menangkis serangan lawan)
2. *Pedang di Bawah (dekat dada) – Tangan ke atas kepala*
(Gerakan ini untuk bersiap menahan serangan lawan)
3. *Pedang di atas – tangan dibawah dekat dada.*
(Gerakan ini untuk menyerang lawan sementara tangan kiri siap menahan segala tangkisan dari sekitar dada hingga ke bawah).

Selain posisi pedang, ada beberapa jenis gerakan menyerang petarung lain antara lain:

1. *Gerakan Menyapu Tanah.*
Gerakan ini seperti orang menyapu tanah dari kanan ke kiri sebagai cara menyerang lawan. Lawan menghindar ke kiri sambil mengangkat kaki kanan lalu pedang diangkat. Kemudian setelah berada dibelakang lawan berarti tangan kanan lawan sudah dilukai lalu mencari bagian kaki lawan.
2. *Gerakan Menyerang dari Atas.*

Gerakan ini dilakukan dengan cara menghadapkan posisi pedang ke atas kepala seperti mau menghunus dari atas. Gerakan tersebut untuk melukai/ menandai kepala lawan.

3. *Gerakan Menebas.*

Gerakan ini dilakukan dengan posisi pedang berada dikiri bagian pinggang sedangkan posisi tangan dikiri atas dekat pusar. Lawan mundur dengan kaki kiri dan maju menyerang.

4. *Gerakan Menusuk.*

Gerakan dilakukan dengan kuda-kuda lalu menusuk dengan cara berlari dari posisi awal menemui lawan.

Pemain bisa mencapai keadaan *trance* jika mereka benar-benar serius dan fokus dalam melakukan tarian silat ini. Dari penuturan informan¹⁸ bahwa seseorang yang berada dalam keadaan *trance*, mereka bisa melakukan diluar kebiasaan mereka misalnya bisa *melenting* (salto). Hulu balang sebagai pemantau tarian silat yang disebut *Brence'* akan mengawasi setiap kejadian yang ada di arena.

Penampilan *brence'* ditutup kembali dengan langkah dua belas oleh kedua petarung. Pertunjukan *brence'* diakhiri oleh salah satu petarung yang sudah merasa cukup untuk mempertunjukan segala kemampuannya sekaligus menghibur penonton. Hiburan tersebut terlihat dari kelenturan petarung dalam mempraktekan segala jurus dan gerakan yang dikuasainya. Petarung amatir gerakannya cenderung liar, sedangkan petarung profesional lebih halus, tenang dan indah. Hal tersebut juga berkat pengalaman dan konsentrasi si petarung.

Secara sistematis, calon pewaris akan mengingat formula gerakan dalam kesenian *brence'* sebagai berikut:

¹⁸ Wawanacara pada 26 Januari 2016 di Kerinci, dengan Geandra (20). Dia pernah berlatih tarian silat (*brencek*) dengan pamannya(mamuk).

1. **Pembuka :**
Langkah Dua Belas
2. **Inti:**
Gerakan Menyerang dan
Gerakan Bertahan
3. **Penutup :**Langkah Dua Belas



Gambar 3.
Tradisi Brence'.
Foto: Rinto

Sebagian pemuda di Kerinci memperoleh kemampuan *brence'* dari belajar silat dengan kakek atau pamannya sebagian lagi dengan cara otodidak (tanpa belajar). Menurut kepercayaan masyarakat, sebelum belajar silat, calon petarung harus memberikan sesajian berupa ayam hitam. Daging ayam tersebut sebagian dipersembahkan untuk roh leluhur (*tuan dahaek*), sebagian lagi boleh dimakan. Sesajian tersebut diberikan sebelum maupun sesudah belajar kepada gurunya. Pembelajaran biasanya ditutup dengan cara bertarung dengan mata tertutup saat berhadapan dengan gurunya.

4. Fungsi Upacara Kuhi Seko

Tradisi yang masih bertahan, menandakan bahwa tradisi tersebut masih berfungsi bagi hidup dan kehidupan masyarakat pemiliknya. Apabila upacara *kuhi seko* masih digelar oleh masyarakatnya berarti upacara ini masih memiliki fungsi. Upacara *kuhi seko* memiliki fungsi sebagai alat pendidikan, alat pengawasan, pengesahan lembaga adat maupun hiburan bagi warga desa.

Menurut Sedyawati (2006: 293) fungsi dapat meliputi fungsi religius, fungsi peneguhan integritas sosial yang tersirat dari adanya tari tertentu untuk ditarikan oleh raja, fungsi edukatif dan fungsi hiburan. Sementara Bascom (dalam Danandjaja, 2002: 19) memaparkan fungsi tradisi lisan sebagai sistem proyeksi, sistem alat pengesahan, sebagai pendidikan, dan sebagai alat pengawasan. Lebih lanjut Sibarani (2012: 11) menjelaskan bahwa tradisi lisan memiliki fungsi pragmatis, estetis dan etis dalam suatu komunitas yang diturunkan secara turun temurun dengan berbagai versi. Berikut merupakan penjelasan mengenai fungsi upacara *kuhi seko*.

4.1 Alat Pendidikan

Upacara *kuhi seko* berfungsi sebagai alat pendidikan. Hal tersebut

tercermin dalam seloko-seloko adat yang dituturkan selama proses upacara *kuhi seko* berlangsung. Seloko adat tersebut mengandung banyak nilai pendidikan yang berguna bagi masyarakat Kerinci dalam menjalani kehidupannya.

Adapun *seloko* adat tertuang dalam *ico pake adat* (pidato adat) saat upacara *kuhi seko* 10 Mei 2015

"kalau membagi yang bungsu memilih, kalau bergilir yang tuo dahulu".

Berdasarkan seloko tersebut nilai pendidikannya mengajarkan kita bagaimana cara menjadi adil dan bijaksana. Bila membagi warisan, anak bungsu harus memilih dan bila warisan dipakai bergiliran, yang tua harus didahulukan.

Seloko juga mengajarkan kita pada cara membawa diri bila pergi merantau. Di perantauan, meskipun rindu akan kampung halaman, kita mesti teguh dan tegar berjuang di tempat perantauan kita. Menjunjung langit tempat kita memijakkan kaki merupakan nasihat yang umum masyarakat Kerinci ketahui seperti seloko berikut.

"dimano kaki dipijak disitu langit dijunjung"

Meskipun di negeri orang namun kita harus tetap berpijak ke bumi.

Seloko-seloko semacam itu juga dipertunjukkan dalam *ico pake adat* (kata-kata/ nasehat adat) berikut:

Bagi anak jantan anak betino denga-denga lah di kayo, idak boleh kayo mengadah umoh uhang, idak boleh kayo membaeh umoh uhang, idak bole kayo merusak umoh uhang, bini uhang diperbini, anak uhang diperanak, pancung saya sayoup, tikam luput. Perbuatan seperti ini idak boleh kayo lakukan, kalu kayo melakukan, mako kayo jatuh pado larang, kayo dihutang sepanjang adat di dendo sebanyuk "sepuluh tengah tigo" atau "duo belas setengah kayu kain" berkepalo berekor, dibayar sekali kilak sekali petauh.

Terjemahan:

Bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan, dengar dengarlah kalian semua. Kalian tidak boleh mengambil batas rumah orang, tidak boleh melempar atau merusak rumah orang, tidak boleh memperistri istri orang, tidak boleh mengganggu anak gadis orang, nanti jika dipancung kena, ditikam pun kena. Perbuatan seperti ini tidak boleh kalian lakukan. Jika kalian melakukannya kalian akan dijatuhkan hukuman. Kalian dihukum sepanjang adat dan didenda sebanyak sepuluh tengah tigo atau dua belas setengah kayu kain berkepala berekor yang dibayarkan saat itu juga.

Ico pake adat di atas mengandung ajakan dan pesan pendidikan. Narasi yang disampaikan berisi nasehat-nasehat yang akan menjadi pedoman hidup orang-orang yang hadir dan mendengarkan pidato adat tersebut. Penuturan *ico pake adat* berfungsi sebagai pendidikan budi pekerti dan dengan sendirinya terekam dalam ingatan penonton yang mendengarkan.

4.2 Alat Pengawas

Upacara kuhi seko sebagai alat pengawas masyarakat agar norma-norma yang berlaku di masyarakat akan selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya. Norma-norma tersebut sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat yang menganut “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”. Hal tersebut tercermin dalam tingginya peranan *depati nenek mamak* ditengah masyarakat.

Sistem pengawasan dilakukan oleh *depati nenek mamak* yang memimpin desa secara adat dengan cara membuat peraturan desa. Peraturan tersebut dibacakan saat *kuhi seko*. Apabila masyarakat melanggar akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Dengan begitu, aktivitas masyarakat Kerinci telah diatur dan diawasi oleh ico pake adat yang diperbaharui setiap upacara kuhi seko. Berikut contoh peraturan yang dibacakan saat upacara *kuhi seko* tanggal 10 Mei 2015.

1. *Bagi anak jantan anak batino yang mengico memakai tanah adat tempat mendirikan rumah,*

tidak boleh membuat akta tanah dengan alasan apapun (peraturan lama).

2. *Bagi para anak remaja yang ado di lima desa Tj. Pauh Mudik ini, dilarang keras berkeliaran dalam desa sampai batas desa tetangga lewat jam 11 malam, apabila terjadi huru-hara yang menghebohkan masyarakat banyak maka orang tua dari anak tersebut akan dihutang sepanjang adat yang berlaku, dan bertanggung sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok (peraturan baru).*
3. *Bagi orang luar yang masuk ke dalam wilayah adat lima desa Tj. Pauh Mudik ini terbukti melakukan huru-hara yang menghebohkan masyarakat, maka pelakunya dihutang sebanyak Rp. 2.500.000 (jumlah denda merupakan peraturan baru).*
4. *Dilarang bagi anak jantan anak betino yang terkena musibah kematian pada saat kenduri penutup 7 hari memberi ajun gulai kepada ibu-ibu pengantar sedekah (peraturan lama).*
5. *Diharapkan kepada anak jantan anak batino dapat menyelenggarakan secara sederhana acara pribadi di rumah waktu anaknya khatam Quran, tetapi mari bersama-sama kita memeriahkannya di tempat acara masal dilakukan (peraturan lama)*

Peraturan yang baru dibuat karena berbagai masalah baru muncul seperti adanya kericuhan antar desa belakangan ini. Oleh sebab itu, *depati nenek mamak* bersepakat untuk membuat peraturan baru agar kericuhan tidak terjadi lagi. Begitu juga dengan jumlah denda yang selalu disesuaikan dengan nilai mata uang saat ini. Selain itu, alat pengawasan yang lain juga terdapat dalam pidato adat seperti yang terlihat dalam petikan *ico pake adat* berikut:

Kalu ngak jugo kayo membaye, mako kayo dikaluakan dari negeri, kayo idak menjadi anak jantan anak batino depati nenek mamak dusun kito lagi, kayo lah dilepeh dengan anja saikak ningga dusun kito ineh. Idak buleh depati nenek mamak ngurus kayo gi, idak boleh pegawai syarak samo urusan kayo gi, idak dapat harto pusako, dan kayo dikucilkan di tengah masyarakat.

Terjemahan:

Kalau kalian tidak membayar denda dan larangan, maka kalian dikeluarkan dari *negeri*. Kalian tidak menjadi warga desa kita lagi. Kalian sudah dilepas pergi meninggalkan dusun ini. Tidak boleh *depati nenek mamak* mengurus kalian lagi. Tidak boleh pegawai adat maupun pegawai masjid ikut campur dengan urusan kalian lagi. Kalian tidak dapat harta pusaka dan kalian dikucilkan ditengah masyarakat¹⁹.

Kalimat *dikucilkan ditengah masyarakat* menjadi alat pengawas yang sangat efektif. Terbukti tidak ada satu orang pun yang berani melanggar peraturan adat tersebut. Dengan begitu, segala aktifitas manusia sudah diatur dalam *ico pake adat* yang juga sekaligus menjadi alat pengawas masyarakat.

Dengan adanya *ico pake adat* dan segala peraturan di dalamnya segala aktivitas masyarakat menjadi terkontrol. Keributan yang disebabkan harta warisan dapat terselesaikan dengan adanya peraturan tersebut. Belum lagi kearifan lokal yang terdapat dalam *ico pake adat* mampu menjaga kelestarian sawah lewat peraturan adat yang menjadi kebijaksanaan lokal (Sibarani, 2012: 112).

4.3 Pengesahan Lembaga Adat

Depati sebagai pemimpin adat adalah orang yang memimpin upacara kuhi seko. Depati dibantu oleh *ninik namak*, *alim ulama* dan *cerdik pandai* dalam melaksanakan upacara kuhi seko. Dengan menyelenggarakan kuhi seko berarti menandakan fungsi lembaga adat masih berjalan. Dari fungsi tersebutlah masyarakat merasa kehadiran pemimpin sangat dibutuhkan untuk menjaga norma-norma. Berikut petikan Ico Pake Adat tanggal 10 Mei 2015 yang menandakan fungsi *kuhi seko* sebagai pengesahan lembaga adat.

Dalam menjalankan adat untuk mengurus anak jantan anak betino, melepeh pagei mengurung petang dalam limo desa di Tj. Pauh Mudik, maka

Depati Anum adalah selaku Pucuk Adat dan baumoh gedang yang dibantu oleh 8 orang depati dan 6 orang nenek mamak. Apobilo Depati Anum berhalangan, maka Rio Perang lah yang menjadi wakil untuk baumoh gedang.

Terjemahan:

Dalam menjalankan adat untuk mengurus anak laki-laki dan anak perempuan, melepas pagar, mengurung siang dalam lima desa Tanjung Pauh Mudik, maka Depati Anum adalah sebagai Pemimpin Adat dan memiliki rumah gedang yang dibantu oleh delapan orang depati dan enam orang nenek mamak. Apabila Depati Anum berhalangan, maka Rio Perang lah yang menjadi wakil untuk berumah gedang (menyelesaikan permasalahan warga dirumah gedang).

Depati akan mengurus semua permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat sebelum membawa permasalahan tersebut ke hukum negara. Misalnya, permasalahan perceraian, permasalahan harta warisan, pertikaian dan lain-lain. Semua permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh lembaga adat di rumah gedang, tempat diselenggarakannya kuhi seko.

Dalam struktur sosial masyarakat Kerinci, peran lembaga adat sangat tinggi. Semua aktifitas warga selalu diketahui oleh lembaga adat. Meskipun terdapat kepala desa, namun untuk urusan sosial budaya yang berperan adalah *depati nenek mamak*. Kepala desa berperan hanya kalau ada urusan dengan birokrasi pemerintahan seperti membuat KTP dan Surat Nikah.

4.4 Hiburan

Upacara kuhi seko sebagai hiburan terlihat dengan begitu banyaknya masyarakat yang menghadiri acara tersebut. Pada saat upacara kuhi seko tidak satu pun warga Desa Tanjung Pauh yang tidak hadir. Semua masyarakat menjadi satu dalam sebuah kebersamaan, tentunya yang menghibur. Berbagai pertunjukan kesenian seperti tarian, nyanyian, pidato adat dan semua dari rangkaian upacara menarik untuk ditonton karena pada saat itu lah masyarakat berkumpul dalam waktu

¹⁹ Teks yang dibacakan saat kuhi seko berlangsung.

yang sama dan di tempat yang sama untuk melepas kepenatan dari rutinitas pekerjaan.

Adanya joged bersama di penghujung acara dan organ tunggal pada malam harinya menambah unsur hiburan dan bersenang-senang tersebut. Apalagi pemuda pemudi akan menggunakan ajang tersebut sebagai ajang muda-mudi (pacaran). Orang-orang tua juga memanfaatkan upacara kuhi seko sebagai ajang silaturahmi yang tentunya menyenangkan.

C. PENUTUP

Dinamika dan perubahan yang terjadi pada masyarakat Kerinci belakangan ini memang tidak bisa dihindari. Dinamika tersebut ditandai dengan perubahan sosial budaya yang terkait dengan faktor agama, pendidikan dan ekonomi. Upacara *kuhi seko* merupakan tradisi lisan yang berada diujung kepunahan akibat dinamika tersebut.

Hanya beberapa desa yang masih menggelar Kuhi Seko saat ini. Padahal, pada zamannya upacara terbesar masyarakat Kerinci ini selalu dan rutin digelar oleh masyarakat pemiliknya. Hal ini dilakukan sebagai tanda penghormatan dan terimakasih mereka kepada generasi pendahulu.

Proses pewarisan menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan upacara ini. Belum adanya proses pewarisan yang memadai menjadi salah satu faktor dari percepatan kepunahahn tradisi. Oleh karena itu, proses pewarisan upacara kuhi seko diteliti agar tradisi yang berasal dari leluhur masyarakat Kerinci ini tidak hilang begitu saja di tengah gencarnya industri dan teknologi.

Adapun temuan proses pewarisan upacara *kuhi seko* yakni dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Proses pewarisan secara langsung yaitu dilakukan dengan cara diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu (*anak batino*). Artinya yang

dapat melakukan upacara ini hanya dari keturunan *anak betino* yang diangkat menjadi *depati*.

Selain proses pewarisan secara langsung, terdapat pula proses pewarisan dengan cara tidak langsung yakni proses yang boleh dilakukan oleh siapa saja di luar garis keturunan ibu dengan cara belajar. Pewarisan model begini hanya dilakukan pada rangkaian tertentu yakni pada rangkaian *brencek* dan tari iyo-iyu. Sementara dalam proses pewarisan secara langsung terdapat dalam rangkaian *mendingin*.

Sejak kecil calon pewaris belajar dan sering mengikuti upacara *kuhi seko* baik pewarisan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses belajar ini, calon pewaris belajar “mengingat” peristiwa. Berdasarkan konsep pewarisan menurut Lord yaitu pada tahap pewarisan tingkat pertama, calon pewaris dengan keinginannya sendiri akan mendatangi guru (menonton langsung) untuk belajar tradisi tertentu. Pembelajaran tersebut bertujuan untuk mengingat formula-formula seperti yang dilakukan dalam pewarisan tari iyo-iyu dan *brencek*.

Para calon pewaris akan belajar selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyerap semua yang dilihat dan didengarnya. Lalu kemudian melihat apakah calon pewaris dapat mewarisi tradisi tersebut dengan baik. Penguasaan formula tertentu juga menjadi salah satu faktor utama dalam proses pewarisan tradisi lisan. Dalam upacara *kuhi seko*, penguasaan formula terlihat dalam proses pewarisan nyanyian *paropatoh iyo-iyu* dan *ico pake adat* (pidato adat).

Penguasaan formula dalam *paropatoh iyo-iyu* terdiri dari penguasaan yang baik atas rima, aliterasi dan asonansi. Hal inilah yang menjadi metode utama dalam mewarisi *paropatoh* tersebut. Apabila seorang pewaris tidak mampu menemukan formula itu, maka calon pewaris tidak dapat mewarisinya dengan

baik. Begitu pula dalam *ico pake adat* (hukum adat). Ungkapan formulaik berupa frasa dan kata-kata adat yang sering di ulang-ulang dan diperdengarkan di khalayak ramai menjadi sarana utama dalam proses pewarisan. Calon pewaris akan berusaha untuk menemukan ungkapan formulaik tersebut sebagai piranti mengingat (*mnemonic device*).

Alat ingat digunakan dalam proses pewarisan. Hal ini untuk mengingat kata dan frasa yang sering muncul saat upacara ini digelar. Kepintaran calon pewaris tradisi juga menjadi faktor utama proses pewarisan berjalan atau tidak. Hal itu karena melalui pewaris tersebut transmisi budaya dilakukan. Pewaris merupakan aktor yang berperan penting dalam proses pewarisan. Ia menjadi penanda budaya yang membedakan antara budaya satu dengan budaya yang lain. Pada akhirnya ia dapat mengangkat identitas dan kebanggaan masyarakat pemilik tradisi lisan seperti yang tercermin dalam upacara kuhi seko.

DAFTAR SUMBER

- Arisa dkk. 2013. Fungsi Kuhi Seko bagi Masyarakat Desa Lolo Gedang-Pasar Kerman Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. *E-Jurnal STKIP PGRI Sumatera Barat*.
- Bonatz, Dominik, Miksic, John, and Neidel, J. David. 2009. *From Distant Tales : Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra*. Newcastle upon Tyne, GBR: Cambridge Scholars Publishing.
- Creswell, John. W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danandjaja, James. 2002. *Folklore Indonesia: Ilu Gosip, Dongeng dan Lain-lain*. Jakarta: Grafiti.
- Danerek, Stefan. 2015. *Modul Transkripsi/ Terjemahan*. Jakarta: ATL.
- Djamaris, Edwar. 1993. *Sastra Daerah di Sumatera: Analisis Tema, Amanat, dan Nilai Budaya*. Jakarta: Depdikbud.
- Esten, dkk. 1985. *Struktur Sastra Lisan Kerinci*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Finnegan, Ruth. 1992. *Oral Tradition and the Verbal Arts*. USA: Routledge.
2012. *Oral Literature in Africa*. United Kingdom: Open Book Publishers.
- Jaeni. 2014. *Kajian Seni Pertunjukan dalam Perspektif Komunikasi Seni*. Bogor: IPB Press.
- Julizar, M. 2014. Peran Lembaga Adat dalam Membina Moral Generasi Muda dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya (Studi Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak Kec. Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi). *Tesis* untuk meraih gelar Magister pada Prodi Studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada.
- Kozok, Uli. 2006. *Kitab Undang-undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu Yang Tertua*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Lindsay, Jennifer. 2006. *Telisik Tradisi: Pusparagam Pengelolaan Seni*. Jakarta Yayasan Kelola.
- Lord, Albert B. 2000. *The Singer of Tales*. New York: Harvard University Press.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Ong, Walter J. 2013. *Kelisanan dan Keaksaraan*. Diterjemahkan dari bahasa Inggris *Orality and Literacy*. Yogyakarta: Penerbit Gading.
- Padmodarmaya, Pramana. 1988. *Tata dan Teknik Pentas*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Permas, Achsan dkk. 2003. *Manajemen Organisasi Seni Pertunjukan..* Jakarta: PPM.
- Pudentia (editor). 2008. *Metodologi Kajian Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
2015. *Pengelolaan Tradisi Lisan Sebagai Warisan*

- Budaya dalam Prosiding Seminar Internasional LISAN IX*. Jakarta: ATL.
- Rachman. 2003. *Dinamika Adat Jambi dalam Era Global*. Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi.
- Sagimun (editor). 1978. *Adat Istiadat Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Schechner, Richard. 2003. *Performance Theory*. United Kingdom: Routledge.
- Sibarani, Robert. 2012. *Kearifan Lokal Hakikat Peran dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
- Simatupang, Lono. 2013. *Pergelaran: Sebuah Mozaik Penelitian Seni - Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Suryadi dkk. 1995. *Dimensi Tradisi Lisan dalam Upacara Kwangkay: Puncak Upacara Kematian Suku Dayak Benuaq*. Laporan Penelitian Universitas Indonesia.
- Suswita dkk. 2013. *Studi Etnobotani dan Bentuk Upaya Pelestarian Tumbuhan yang digunakan dalam Upacara Adat Kuhi Seko di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Kerinci, Jambi*. Jurnal etnobiologi Vol.2 No.1.
- Taum, Yoseph Y. 2011. *Studi Sastra Lisan: Sejarah, Teori, Metode dan Pendekatan Disertai Contoh Penerapannya*. Yogyakarta: Lamalera.
- Tuloli. 1990. *Tanggomo: Salah Satu Ragam Tradisi Lisan Gorontalo*. Disertasi untuk meraih gerlar Doktor pada Universitas Indonesia.
- Vansina, Jan. 2014. *Tradisi Lisan sebagai Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 1965. *Oral Tradition: A Study in Historical Methodology*. Australia: Penguin Books.
- Zakaria, Iskandar. 1984. *Tambo Kerinci*. Jakarta: Depdikbud.

DARI SYAIR KE RANAH TEATER (Korelasi Syair Melayu dalam Pertunjukan Teater Bangsawan)

FROM POEM TO THEATRE (Correlation between Malay Poem in Bangsawan Theatre Show)

Nanda Darius

Staff di BPNB Kepulauan Riau

Jl. Pramuka No.7 29124

Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

dariusnanda@gmail.com

ABSTRACT

Research aims to describes, finds and sees the correlation between Melayu poem text within nobleman theatre show. This research used descriptive qualitative method. The researcher hopes that this research will help Melayu community and artists and performers who preserve this tradition in their studio. Using descriptive qualitative method and holistic approach, the researcher tried to find the correlation between poem text and nobleman theatre. The researcher used documentation study, which consists of direct observation and literature review. To analyze the collected data, the researcher first indentifies the data then reduces the data, triangulates the data and finally making conclusion.

According to this research, it can be concluded that poem text had deep bond with the narration in a nobleman theatre show. This is related to the concept of medium change in literature study, where poem text with its rhyme and narration element, combines with theatrical language. This means that poem text had mutually beneficial relationship with theatre both on concept and packaging.

Keywords: correlation, poem, Malay, teathre, bangsawan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan melihat korelasi antara naskah syair Melayu di dalam batang tubuh teater bangsawan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat Melayu umumnya, dan khalayak pengiat tradisi di sanggar khususnya. Dengan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan holistik, peneliti mencoba mengungkapkan keterkaitan naskah syair dengan teater bangsawan. Adapun teknik penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi, meliputi observasi langsung dan teknik kajian pustaka. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang meliputi mengidentifikasi data meliputi reduksi data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik simpulan bahwasanya antara naskah syair memiliki pertalian yang erat dengan jalan penceritaan di dalam sebuah tetaer bangsawan. Hal ini bertautan dengan konsep kajian alih wahana di mana penggabungan naskah syair, baik unsur penceritaan dan irama berbaur ke dalam bahasa teater yang padu dan utuh. Artinya, antara naskah syair dan ranah teater mempunyai hubungan yang saling menguntungkan secara konsep dan kemasan.

Kata Kunci: korelasi, syair, Melayu, teater, bangsawan

A. PENDAHULUAN

Malik (2013:108) menyatakan bahwasanya Peradaban Melayu mempunyai cakupan kawasan yang amat luas. Adapun batasan ketamadunan Melayu ini meliputi Pulau Formosa (sebelah utara), Selandia Baru Suku Mori (sebelah Selatan), Pulau Pas (sebelah timur), dan Pulau Madagaskar (sebelah barat). Maka dari itu, tidak heran apabila dikatakan muasal bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu. Hal ini tidak akan diragukan, bahkan dunia percaya ihwal kebenarannya. Sememangnya bahasa Indonesia yang sekarang digunakan sebagai bahasa nasional dan negara Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu.

Dari keagungan bahasa Melayu tersebut, maka sudah menjadi lumrah apabila sastra lisan di alam Melayu tumbuh bak jamur di musim semi. Betapa pantun, gurindam, syair, talibun, seloka, nazam, karmina, dan lain sebagainya menjadi alat komunikasi aktif orang Melayu sejak zaman berzaman. Menurut pendapat beberapa ahli, sastra lisan yang berkembang di dalam masyarakat Melayu dapat dikategorisasikan menjadi dua bentuk, yakni sastra lisan yang lisan (murni), dan sastra lisan setengah lisan. Kemudian, secara perwujudan di dunia nyata, sastra lisan yang murni ini dapat diartikan sebagai sastra yang tidak memerlukan instrumen lain untuk membantu sastra itu dimainkan (lisani). Sedangkan, sastra lisan setengah lisan bisa berbentuk dalam tulisan sebagai wadah ekspresinya (Suripan Sadi Hutomo dalam Taum, 2011: 65).

Selanjutnya, Alisjahbana (2009:6) menyatakan anggota masyarakat pada masa tersebut berhak atas segala penggunaan bahasa dalam mengucapkan pikiran dan perasaannya serupa dengan isi dan bentuk dari karya-karya tersebut. Maka dalam berabad-abad yang lalu, tumbuhlah ikatan puisi itu, dengan pilihan

katanya, dengan susunan kalimatnya, dengan jalan iramanya, dan dengan semangatnya masing-masing. Sehingga, penyair yang hendak mencurahkan pikirannya tinggal memakai saja ikatan puisi, serta kata-kata, dan cara menyusun kalimat, malahan sampai kepada isinya yang sudah turun-temurun tersedia.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, sastra lisan yang berkembang di Melayu umumnya adalah sastra lisan murni. Di mana kehadirannya merupakan seni murni yang hanya memerlukan media bahasa sebagai perantara. Seperti halnya syair yang oleh masyarakat Melayu sangat dikenal dengan bunyi-bunyian suara yang syahdu dan merdu. Sejatinya, syair yang pas sesuai dengan nilai estetikanya adalah dengan cara mendendangkannya yang dipengaruhi oleh jenis/bentuk persembahan atau fungsinya dalam kegiatan sosial, seni, dan budaya masyarakat (Piah, 2016:55).

Syair sebagai karya sastra mempunyai urutan bunyi yang menghadirkan keutuhan makna. Rangkaian bunyi menghasilkan makna dalam sebuah teks sastra (Wellek dan Warren, 1989:196). Unsur bunyi tersebut berguna Untuk melihat cacat atau tidaknya sebuah syair. Adapun aspek yang dapat dilihat, yaitu rima, jumlah suku kata, dan baris atau larik. Selanjutnya, Suwardo (2009:4) menjelaskan kedudukan *syair* sebagai puisi Indonesia sejatinya masuk ke dalam kategori puisi lama. Kemudian, jika diperhatikan secara seksama, kedudukannya di dalam kehidupan masyarakat amat bersebat dan begitu bermartabat dengan formula khusus yang membalutinya. Alisjahbana (2009:7) menegaskan bahwasanya puisi lama memiliki pola-pola kalimat dalam menyusun kalimat yang terikat aturan dan ciri tertentu oleh seorang pengubah karya sastra. Pola dan aturan terikat inilah kemudian diikuti oleh masyarakat secara

turun-temurun dan dalam waktu yang lama, seperti halnya syair.

Syair merupakan karya sastra dan sastra adalah cipta seni. Sastra memiliki nilai keindahan yang tinggi (Esten dalam Suhardi, 2011:1). Kemudian, untuk membuat syair menjadi karya sastra yang indah haruslah dengan mendendangkannya. Bagi kalangan pelakunya penguasaan terhadap beberapa irama syair adalah keniscayaan, sedangkan bagi para penikmatnya memahami tentang keragaman irama syair adalah sebuah kebutuhan (Idawati, 2016:109).

Syair sebagai perwujudan sastra lisan mampu dipelajari oleh setiap orang dengan kunci kebiasaan. Faktor kebiasaan ini sangat berpengaruh bagi menanamkan notasi irama dan cengkok Melayu ke alam bawah sadar manusia. Cengkok ini dinilai sebagai kunci keindahan sebuah irama syair (Sahril, 2016: 97). Semakin sering kita mendengarkan nada dan irama tersebut, maka semakin cepat kita menangkapnya. Seperti pepatah yang mengatakan lancar kaji karena diulang, lancar jalan karena ditempuh, dan ala bisa karena biasa.

Walaupun kemampuan tercepat dalam menangkap irama syair biasanya dimiliki oleh seorang qari maupun qariah yang sudah ahli dalam hal seni baca Alquran, namun peluang untuk belajar mendendangkan syair sejatinya bisa dilakukan dengan dasar niat yang kuat. Walaupun pada hakikatnya, untuk menjadi pendendang syair Melayu, sangat dipengaruhi oleh kualitas suara/olah vokal itu sendiri. Karena di dalam olah vokal terdapat unsur tempo, dinamik, pemanjangan, penekanan, intonasi, lafal, dan sebagainya (Tedlock dalam Idawati, 2016:88). Ditambah lagi, orang Melayu identik dengan Islam, sehingga memengaruhi kebudayaan dan adat istiadat yang mengacu kepada Alquran dan juga hadis. Selain itu, Melayu juga dikenal sebagai orang yang sangat setia. Bahkan

sumpah setia orang Melayu pantang untuk dilanggar oleh empunya badan (Fang, 2011: 603).

Syair yang mengandung nilai-nilai estetika, pengajaran, dan kebaikan serta nilai-nilai agama sejatinya mampu menyugesti setiap orang untuk selalu bertindak dan berperilaku yang baik. Bahkan, sastra berupa puisi lama seperti syair, gurindam, pantun, seloka, dan lainnya harus diajarkan pada anak sejak dini. Agar generasi penerus mampu menjaga harkat dan martabat dirinya. Hal ini mendeskripsikan betapa masyarakat yang berbudaya tinggi sudah pasti mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang merupakan ciri-ciri dari kehidupan yang bertamadun (Malik, 2013: 81).

Umumnya, karya-karya syair mempunyai pesan sebagai pedoman hidup (pemandu jalan hidup). Seperti karya-karya yang diciptakan Raja Ali Haji adalah karya-karya yang sarat akan tunjuk ajar Melayu. Dengan harapan orang Melayu atau masyarakat Melayu tahu bersikap dan tahu berucap serta beradat-istiadat. Kata *Tunjuk Ajar* merupakan kata majemuk terdiri dari dua kata, yaitu tunjuk dan ajar. Menurut KBBI edisi V, kata tunjuk berarti menunjukkan dan kata ajar berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut). Selanjutnya, Effendy (2004:7) menyatakan tunjuk ajar Melayu adalah segala petuah, amanah, suri teladan, dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah serta berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tunjuk ajar Melayu merupakan makna yang terkandung melalui apa-apa yang dikatakan berkaitan dengan segala aspek kehidupan dan berbagai ajaran Melayu. Dengan demikian, tunjuk ajar Melayu dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Kebanyakan tunjuk ajar ini tersemayam di dalam produk puisi lama, misalnya syair.

Tunjuk ajar ini mempunyai muara tidak lain tidak bukan adalah untuk memperbaiki serta mempertahankan karakter unggul setiap insani. Samani dan Hariyanto (2014:41) menyatakan bahwa karakter sebagai pola dan proses berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu dalam lingkungannya. Oleh karena itu, ciri dan penanda khas orang Melayu sejati adalah kepawaiannya dalam bertutur kata. Umumnya, orang Melayu menciptakan syair spontanitas dan dinyanyikan. Hal ini yang menambah keunikan dari sebuah syair. Senandung suara yang mendayu dan syahdu (membuai antara nada dan irama) berbaur dengan perkataan (diksi) yang bernas dan berpola. Hal ini sudah menjadi makanan sehari-hari orang Melayu, layaknya mereka menjual beli pantun.

Selanjutnya, Piah (2016:48) menyatakan bentuk syair dapat dilihat dari dua aspek, yaitu struktur dan tema. Bentuk syair bervariasi sesuai dengan pemahaman penciptanya. Akan tetapi, bentuk syair yang sempurna adalah yang mengikuti kaidah (formula) syair yang utuh. Adapun karya-karya syair telah banyak dihasilkan oleh pujangga-pujangga terdahulu. Raja Ali Haji selaku Pujangga Kerajaan Riau-Lingga telah pun banyak menuangkan gagasan-gagasannya ke dalam goresan tinta yang kemudian melahirkan berbagai macam karya yang bernafaskan syair maupun gurindam.

Dalam hal pembacaan maupun pertandingan syair, kejelasan vokal dan konsistensi suara menjadi pusat perhatian dewan juri dan khalayak pendengar. Dengan pakaian yang sopan (memakai baju kurung Melayu), vokal yang bagus, alunan yang syahdu, serta penghayatan yang bagus pasti mampu membuat dewan juri menganggukkan kepala. Melalui perpaduan bahasa susastra dan olah vokal ini, lahirlah keindahan suara yang didengar oleh pendengar dan ditampilkan dengan kesesuaian sesuai dengan etikanya (Sahril, 2014: 89). Sehingga, alternatif sederhana

untuk mahir bersyair adalah dengan memperbanyak olah vokal supaya terbiasa memekikkan nada tinggi, mengontrol nada rendah, dan mengatur vibrasi suara, serta pernapasan yang baik pula.

Idawati (2016:104) menyatakan irama syair umumnya merupakan tiruan dari seni resitasi Alquran. Seorang pendendang syair mestilah menguasai teknik tilawah dan qiraah yang ia pelajari dalam kurun waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan sulitnya regenerasi penerus syair. Fakta selanjutnya, di zaman ini adalah semua orang bisa belajar syair, tapi tidak semua orang mampu mendendangkannya syair dengan baik sesuai dengan keunikannya. Keunikannya ini meliputi kaidah isi, irama, variasi irama, dan keahlian penciptaan, serta dendangannya (teknik melantungkannya). Karena sebuah karya sastra itu layaknya sebuah orkestrasi yang selalu dan akan terus menyuarakan suara-suara baru di antara para pembacanya (Jauss dalam Pradopo, 2017: 20).

Selanjutnya, jika kita sibak dari kacamata perubahan zaman beserta ketimpangannya, haribaan syair tidaklah segemilang seperti dahulu kala. Berkaca pada budaya leluhur yang sudah ada sejak zaman berzaman tersebut, ternyata ada yang hilang dan ada yang masih terngiang. Padahal, kebudayaan itu sejatinya harus bersifat dinamis (Sibarani, 2012:3).

Budaya yang mengkristal ini hidup dan bertahan hanya di dalam lingkaran masyarakat yang masih melestarikannya. Umumnya, pegiat tradisi (budaya) ini sudah memasuki usia yang tidak muda lagi. Kebanyakannya sudah berumur 50 tahun ke atas. Seorang antropolog Edward B. Tylor (1832—1917) mengemukakan bahwa perkembangan yang progresif dari masyarakat masa kini, mempunyai tingkat derajat yang berbeda dari masyarakat masa silam yang telah sirna (Ihromi, 2013:49). Artinya, keresahan mencari generasi penerus tradisi akan menjadi keresahan

yang tidak terelakkan dan semakin merosahkan.

Keresahan ini nyatanya telah terjadi pada wajah sastra Melayu klasik, seperti syair. Khazanah syair tidak lagi menjadi perbincangan hangat anak-anak remaja dan generasi muda masa kini. Kemelut globalisasi telah mendoktrin paham modern yang jamak dan berkelanjutan. Alhasil, warisan leluhur bangsa menjadi usang dan tidak dihiraukan seperti dulu lagi. Haribaan syair dewasa ini tidak sehebat dan adiluhung seperti di zaman Raja Ali Haji dan para pujangga Melayu dahulu. Padahal, syair adalah jembatan interaksi orang Melayu. Sebuah budaya lama, kemasyhurannya tidak lagi menjadi perbincangan hangat kaum yang muda (Fauzi, 2016:119).

Kemuncak amuk globalisasi seperti sekarang ini begitu menampakkan sisi negatifnya, kendati sisi positifnya tetap dirasakan. Masyarakat tradisi semakin hari semakin meninggalkan akar tradisinya. Banyak budaya yang perlahan-lahan namun pasti berangsur punah bahkan bertransformasi ke dalam wajah barunya. Perlombaan menjadi masyarakat modern dengan balutan kekinian menjadi cita-cita luhur yang mulai ditanam. Pemahaman akan budaya mulai terkikis, bahkan dianggap kuno dan tidak layak untuk dipertahankan. Akibatnya, budaya yang hilang dan punah tersebut menjadi bukti nyata hilangnya karakter bangsa Indonesia secara tidak disadari pula. Tren-tren kekinian mulai merambah dan memberikan tempat tersendiri di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai luhur budaya bangsa mulai goyah dan kemungkinan hanya akan menjadi sejarah.

Pengaruh globalisasi dengan balutan modernisasi ini telah mengambil keberadaan syair dari ruang dan lingkup masyarakatnya. Proses transmisi budaya pun kian hari semakin meninggalkan wajah aslinya dengan wajah baru dalam konsep kekinian. Modernisasi ini telah

merubah pola pikir anak-anak zaman sekarang yang menganggap syair adalah kuno dan tidak layak untuk dipelajari. Karakter dan tingkah laku anak pun semakin merajarela dengan berbagai tindak kriminalitas yang tinggi dan tingkat sopan santun yang semakin mengkhawatirkan. Padahal, lewat tradisi dan budaya inilah karakter Pelestarian budaya secara umum dapat didefinisikan segala perilaku atau tindakan (upaya) yang bertujuan untuk mempertahankan keadaan atau keberadaan suatu peninggalan generasi masa lampau melalui proses inventarisasi, dokumentasi, dan revitalisasi (Mahyudin, 2008:70). Kebudayaan modern dan *post-modern* menimbulkan perubahan di berbagai aspek kehidupan dengan tingkat kecepatan yang mengejutkan. Perubahan itu dipicu oleh kecepatan pertukaran informasi yang disajikan setiap detik oleh *cybermedia*, televisi, radio, dan media-media lain (Bernard dalam Mahyudin, 2008: 3).

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas, dapat disimpulkan betapa pentingnya syair dan sastra lama bagi kehidupan dan jati diri orang Melayu. Mengemas syair dengan nuansa/konsep kekinian mampu mengangkat eksistensi syair dan melepas rantai sukuisme yang selama ini membelenggu syair secara sepihak. Dengan adanya konsep korelasi ini, semoga syair bisa mendunia dan dinikmati semua orang karena keberadaannya selain pada naskah juga mampu menebus ruang-ruang media (baik panggung maupun layar digital). Salah satu caranya adalah dengan mengolaborasikan notasi irama-irama dengan konsep kekinian (dengan tetap memegang identitas Melayu) ke dalam wadah seni pertunjukan. Karena banyaknya naskah-naskah syair hanya terpajang usang di lemari para cendekiawan yang justru jarang dikuak tabir penceritaannya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul dari Syair ke Ranah Teater (Korelasi Syair Melayu dalam Pertunjukan Teater Bangsawan).

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2011:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata juga bahasa. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan untuk menganalisis data-data yang diperoleh, kemudian menindaklanjuti (menguraikan) data-data tersebut sesuai dengan teori dan langkah-langkah yang peneliti gunakan. Peneliti sebagai instrumen kunci harus mampu menguraikan setiap hasil yang didapat adalah melalui proses penelitian. Artinya, kepiawaian peneliti dituntut untuk bijak dalam menganalisis data-data sampai pada penarikan simpulan. Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama (Sugiyono, 2015:222). Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa konsep korelasi pementasan dari naskah syair ke teater. Melihat dari sisi hubungan dan peluang terciptanya karya. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dengan cara melakukan pengkajian syair dan teater.

B. HASIL DAN BAHASAN

1. Pengertian Syair

Syair adalah bahasa sastra dan bahasa sastra adalah khas. Yang dimaksud dengan bahasa yang khas yakni bahasa yang telah direkayasa dan dipoles sedemikian rupa (Endraswara, 2011: 72). Sebagai salah satu budaya, syair penting bagi penggiat dan penggunaanya. Sejatinya, semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut dengan berlandas pada nilai-nilai yang berbeda (Kitvin dalam Mulyana,

2005: 10). Pada awalnya, syair digunakan sebagai alat komunikasi dan hubungan antara budaya (komunikasi bersifat timbal balik). Dan melalui pengalaman-pengalaman lintas-budaya ini, membuat kita lebih terbuka dan toleran menghadapi “keganjilan-keganjilan” budaya yang selalu kita rasakan (Mulyana, dkk. 2005: 34).

Jika kita telusuri, kata syair berasal dari bahasa Arab *syā'ara* yang artinya menembang atau bertembang, syair sendiri mengandung arti penembang, dan *sy'ar* (tembang atau syair). Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kata syair berasal dari kata *syi'r* (juga bahasa Arab) yang artinya puisi. Dalam kesusasteraan Arab, *syi'r* adalah satu bentuk puisi yang telah muncul sejak zaman pra-Islam dan berkembang menjadi suatu bentuk puisi yang populer di kalangan orang Arab sejak zaman sebelum dan sesudah kedatangan Islam (Sugianto, 2015: 47).

Puisi rakyat yang menyerupai pantun bukan saja terdapat di nusantara, juga di daerah-daerah lain bahkan boleh dikatakan di seluruh dunia. Giacomo Prampolini (1951: 25) dalam suatu karangannya telah membicarakan puisi rakyat beberapa buah negeri seperti puisi Tiongkok, Jepang, Iran, Arab, Spanyol, Jerman, dan lain-lain). Syair terdiri dari empat baris, setiap baris mengandung empat kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari sembilan sampai dua belas suku kata. Bedanya dengan pantun adalah keempat baris dalam syair merupakan satu bagian dari sebuah puisi yang lebih panjang, dan syair tidak mempunyai unsur sindiran di dalamnya melainkan unsur edukasi dan nilai-nilai kebajikan (Fang, 2011: 562).

Ikatan syair terjadi dari empat baris yang bersajak; terkadang terdapat juga syair yang bersajak dua-dua baris. Tiap-tiap baris panjangnya biasanya empat kata seperti pantun. Oleh karena syair biasanya panjang-panjang, maka payahlah ia menjadi buah kesasteraan yang sempurna

tiap-tiap baris irama, bunyi, dan arti. Sering benar sifatnya semata-mata susunan empat-empat baris yang bersajak, yang disusun dengan tiada mengingat arti dan perasaan yang halus, yang tersimpul dalam tiap-tiap perkataan. Dan lazim benar memakai perkataan yang tersurat atau yang tiada nyata artinya (Alisjahbana, 2011: 46).

Menurut L.F Brakel, syair Indonesia pada mulanya memang bersumber dari karya yang bercorak keagamaan, khususnya pengaruh kesusastraan sufi. Namun, syair Indonesia terus berkembang dan tidak hanya berisi ajaran sufi dan keagamaan, melainkan telah menyentuh berbagai aspek kehidupan. Pengaruh kesusastraan sufi dari Arab dan Parsi telah mengilhami Hamzah Fansuri mengubah puisi dalam bahasa Indonesia yang kemudian dikenal sebagai syair (Sugiarto, 2015: 49). Syair karya Hamzah Fansuri yang paling terkenal adalah syair perahu.

Syair pertama kali muncul dalam sastra Melayu pada abad kelima belas dalam *Syair Ken Tambunan*. Bukti yang dikemukakannya ialah pemakaian kata-kata kawi seperti *lalangan* (kebun), kata-kata Jawa seperti *ngambara* dan *ngulurkan*, perbendaharaan kata yang kaya mitos Hindu dan gaya yang klasik (Winstedt, 1958: 152). Tentang perbendaharaan kosakata yang kaya, A. Teeuw (2003) berkata hal ini tidak boleh dijadikan bukti. Alam Melayu tidak kurang penulis yang kaya perbendaharaan kata-katanya, misalnya Raja Ali Haji, Abdullah, dan penulis Hikayat Hang Tuah-.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa syair adalah salah satu bentuk puisi lama yang terdiri dari empat baris dalam satu bait, yang merupakan isi semua dengan persajakan a-a-a-a, dan terdiri dari sembilan sampai dua belas suku kata. Selanjutnya syair dalam konteks Islam lebih mengarah kepada nasihat tentang kebajikan dan pesan religius. Bisa juga bercerita tentang suatu sejarah dan cerita

raja-raja dahulu. Bahkan banyak syair yang bercerita secara detail susana hati yang tengah dirasakan oleh pengarangnya. Kreativitas penulis mampu menggubah puisi lama menjadi sesuatu yang indah.

Fungsi syair adalah untuk menyampaikan cerita dan pengajaran dan digunakan juga dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan (Rahmawati, 2015: 41). Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut.

1. Tiap bait terdiri atas empat baris,
2. Berirama atau bersajak aaaa, dan
3. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair.

Menurut Yock Fang (2011:562), syarat-syarat syair sebagai berikut:

1. Terdiri dari empat baris,
2. Setiap baris mengandung empat kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari sembilan sampai dua belas suku kata,
3. Keempat baris dalam syair merupakan satu bagian dari sebuah puisi yang lebih panjang,
4. Syair tidak mempunyai unsur-unsur sindiran, dan
5. Memiliki persajakan a-a-a-a.

Dari pendapat ahli tersebut, dapat diberikan bahwa syarat-syarat syair adalah:

1. Terdiri dari satu bait,
2. Satu bait terdiri dari empat baris,
3. Memiliki persajakan a-a-a-a,
4. Terdiri dari empat kata atau sembilan sampai dua belas suku kata,
5. Mengandung nilai religius dan tiada unsur sindiran di dalamnya.

2. Ragam Irama Syair

Membahas ragam irama syair berarti membahas aspek musikal yang terdapat pada lantunan syair. Dapat dijelaskan bahwa terdapat dua ranah berbeda saat syair dilantunkan, yaitu sastra dan musik. Masing-masing memiliki kekuatan

tersendiri. Sastra dengan kekuatan verbalnya dan musik dengan kekuatan non-verbalnya. Istilah irama itu sendiri jika merujuk pada beberapa terori musik, merupakan pergerakan waktu yang telah dikonsepsikan. Dengan kata lain, nilai-nilai not telah diatur sedemikian rupa sehingga menjadi desain ritme tersendiri, (Adler dalam Idawati, 1979:129).

Beberapa jenis variasi irama syair yang telah didapatkan oleh Roslan Madun dalam kembara syairnya lewat Rentas Syair Alam Melayu Nusantara, maka terdapat beberapa jenis irama syair sesuai dengan daerah dan negara. Beberapa jenis irama syair ini telah pun dibuat konser Syair Alam Melayu Nusantara di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2016. Berikut beberapa daftar irama syair yang diketahui lewat syair rentas benua.

1. Brunei Darussalam

Irama-irama syair yang biasa dialunkan atau didendangkan di Brunei Darussalam diantaranya adalah:

- a) Tambang Begawan;
- b) Tambang Beranyut;
- c) Tambang Siti Zubaidah (Versi Brunei Darussalam);
- d) Tambang Berunggai Lanjar; dan
- e) Tambang Si Meru Gunung.

2. Indonesia

Sebenarnya banyak sekali daerah di Indonesia mengenai irama syair, akan tetapi dalam kembara syair yang dilakukan oleh Roslan Madun, terdapat beberapa daerah saja yang berhasil dikumpulkannya, yaitu:

a. Pekanbaru, Riau:

- Irama Syair Selendang Delima;
- Irama Burung;
- Irama Surat Kapal;
- Irama Nandung;
- Irama Siti Zubaidah;
- Irama Perang;
- Irama Melalak.

b. Dumai, Riau:

- Irama Berghondak;
- Irama Burung;
- Irama Nandung;

c. Kepulauan Riau:

- Irama Selendang Delima;
- Irama Nandung atau Senandung;
- Irama Burung;
- Irama Kepulauan Riau.

3. Malaysia

- Irama Kedah;
- Irama Narasi;
- Irama Selendang Delima;
- Irama Rakis;
- Irama Siti Zubaidah;
- Irama Mayang;
- Irama Hiasan;
- Irama Batu Belah;
- Irama Ikan Terubuk;
- Irama Perindu;
- Irama Dandan Setia;
- Irama Pucuk Kelumpang;
- Irama Narasi campuran.

Berbagai macam irama di atas mempunyai notasi dan kebakuan irama yang berbeda-beda. Kebanyakan pendendang memadukannya dengan konsep kekinian yang lebih kompleks. Yang dimaksud dengan kekinian adalah situasi sosial, politik, dan ekonomi hari ini sebagai dampak perkembangan, perubahan, dan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang luas. Kekinian juga dapat dilihat pada instrumen pengiring. Di sini dimaksud adalah penggunaan atau penempatan instrumen modern (Amir, 2013: 26). Studi sastra lisan menjadi penting karena dalam masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di dunia, baik pada masyarakat tradisional yang hidup di kampung asalnya maupun masyarakat modern., masih hidup tradisi lisan. Tradisi lisan sebagai kegiatan lisan mencakup kegiatan yang amat luas. Dari sudut pandang folklor, folklor lisan amat

banyak, seperti cerita lisan rakyat, teka-teki, gelar tradisional, lagu permainan anak. Masyarakat pemilik folklor itu menggunakan bentuk folklor untuk mengomunikasikan pikirannya. Dengan bentuk itu, pengujar atau pendengar berada di wilayah medan makna (semantik) yang sama (ibid, 2013: 43).

Idawati (2016) menegaskan juga bahwasanya mendendangkan syair ibarat kita mengalunkan seni baca Alquran yang harus memiliki energi dari hati yang positif untuk mengarahkan dari dalam dengan bebas. Unsur keindahan yang bersifat natural sangat diperlukan sehingga enak didengar dan tidak terkesan dibuat-buat. Selain itu, seorang pendendang syair harus mampu menempatkan nada dan resonansi yang baik, baik dari segi pemahaman lirik, artikulasi, penjiwaan dan penguasaan lagu/irama, penguasaan tempo, penguasaan vokal (power dan vibrasi). Semua persyaratan dan kesempurnaan irama syair harus berpadu dan seiring sejalan.

3. Teater Bangsawan

Sebuah pertunjukan dengan nuansa kerajaan dan kebangsawanan telah menyelimuti ruang pertunjukan di bumi melayu. Teater bangsawan merupakan teater tradisi khas masyarakat Melayu tempo dulu. Di dalam pertunjukan teater ini, umumnya mengangkat isu-isu tentang istana sentris. Topik yang akan diangkat dalam lakonan umumnya akan menceritakan tentang tokoh-tokoh termasyhur di sebuah kerajaan Melayu. Selanjutnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Riau mengungkapkan bahwasanya teater bangsawan telah kehilangan ruh dan semangatnya di panggung. Seiring perkembangan zaman, teater bercorak tradisi ini mulai kehilangan eksistensinya. Teater bangsawan dianggap sangat kuno dan hanya menjadi buah bibir sebagai cerita dari generasi ke generasi.

Harymawan (1993:85) menyatakan jika merujuk dari akar bahasanya, teater merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, "theatron" yang memiliki arti tempat atau gedung pertunjukan. Istilah teater ini lama-kelamaan mengusung makna yang lebih luas sebagai aktivitas yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Di dalam khazanah teater ini terdapat berbagai kategorisasi lakon, seperti wayang, sinetron, mamanda, dagelan, sulap, akrobat, bangsawan, drama, dan lain sebagainya. Teater akan bersinggungan dengan orang-orang yang di dalamnya disebut sebagai aktor. Tidak hanya aktor, tapi di dalam teater akan melibatkan berbagai strata tugas layaknya sutradara, tim musik, dan lainnya.

Dalam hal pertunjukan teater bangsawan, adapun naskah akan disesuaikan dengan permintaan yang disesuaikan dengan tema istana sentris. Kehadiran tokoh disesuaikan dengan tokoh yang berpengaruh dan dianggap penting oleh masyarakat. Sehingga, bangsawan sendiri bermakna sebagai orang-orang yang namanya akbar di telinga masyarakat pada zamannya (Soemanto, 2001: 74). Kemudian, berbicara pada fakta dan kenyataan di lapangan, khususnya di daerah Kepulauan Riau, menurut beberapa pegiat seni (wawancara pribadi), aktivitas teater bangsawan saat ini telah menunjukkan kelemahannya dalam regenerasi. Bahkan, jarang sekali pementasan bangsawan diadakan di Kepulauan Riau. Jika demikian, cepat atau lambat, maka khazanah budaya bangsawan ini akan hilang, pudar, serta sirna dari tanahnya sendiri (Wawancara Barozi. Tanjungpinang, 11 Maret 2018).

Selain itu, menurut Arybowo, (2012:1) dalam jurnalnya membahas mengenai teater bangsawan menyebutkan prihal panggung bangsawan merupakan teater rakyat yang pada masa kejayaannya (orde lama) memiliki kekuatan ritual, akan tetapi pada masa orde baru wajah teater

bangsawan hampir punah. Hal ini menguatkan pendapat-pendapat di atas mengenai keadaan teater bangsawan yang semakin mengkhawatirkan. Ditambah lagi oleh regenerasi teater bangsawan ini sangat sulit, berbagai upaya digebrak oleh pemerintah melalui revitalisasi budaya secara berkesinambungan. Akan tetapi, proses revitalisasi ini justru tidak berkembang dan tidak membuahkan hasil. Padahal, haribaan teater bangsawan ini mempunyai simbolisme dan berperan sebagai kontribusi makna politik kebudayaan dalam kaitannya dengan identitas dan kebertubuhan bangsa Melayu yang lebih modern. Karena pada dasarnya, teater bangsawan ini menitikberatkan pada tiga aspek, yakni bahasa, adat-istiadat, dan agama Islam.

Selanjutnya, dalam hal penyutradaraan teater bangsawan, sejarah mencatat bagaimana kaitan kemunculan teater bangsawan dengan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaya. Para peneliti dan pakar sastra mengkategorisasikan teater bangsawan ke dalam drama tradisional. Kekayaan seni kemasan teater bangsawan ini mengusung spirit kebudayaan yang utuh dan komprehensif. Di dalam pertunjukan teater bangsawan sejatinya memakai unsur nyanyian dan alat musik yang dipadupadankan dengan akting para aktor (pemain). Adapun langkah-langkah di dalam pementasan lakon teater bangsawan (Nofriani, 2012: 14-21) sebagai berikut :

- a) Sinopsis cerita;
- b) Perancangan;
- c) Pemilihan pemain;
- d) Pemilihan tim produksi;
- e) Stage manager, scenografer, penata rias, dan penata cahaya;
- f) Proses latihan;
- g) Pembagian peran; dan
- h) Pementasan.

Sejatinya, di dalam ranah teater (seni pertunjukan) konsep alih wahana lebih dikenal dengan istilah 'pengemasan' dan

termaktub ke dalam ranah bidang penyutradaraan atau dengan sebutan yang lebih populisnya, yaitu pengemasan seni pertunjukan. Pengemasan seni pertunjukan ini umumnya dilakukan dengan maksud mengangkat kembali bentuk-bentuk kesenian tradisi yang dianggap memiliki potensi untuk dilestarikan, atau dengan tujuan revitalisasi dan rekonstruksi seni pertunjukan tradisi. Kendati demikian, kegiatan pengemasan senipertunjukan juga ditujukan sebagai proses kreatif melahirkan karya-karya inovatif yang kerap memadupadankan berbagai jenis kesenian, seperti seni musik diatonis dan pentatonis, tari, drama juga hal-hal yang berkaitan dengan seni rupa.

Kemudian, Ismawati (2016: 13). Tradisi bagi bangsa yang vital bukan sesuatu yang beku dan bukan merupakan kurungan yang merintangi suatu bangsa menghadapi persoalan baru, melainkan bagaikan rabuk untuk pertumbuhan selanjutnya. Teater Bangsawan sebagai produk kebudayaan seyogianya harus mampu mentransformasikan dirinya ke dalam maujud yang baru. Akan tetapi, pada hakikatnya seni tradisi sebagai ekspresi kebudayaan yang bersifat dinamis, justru kehilangan arahnya. Konsep transformasi melalui kajian alih wahana menghendaki adanya perubahan, baik secara bentuk maupun formulanya. Tradisi justru berguna sebagai jembatan sebagai media untuk mempermudah para kreator seni pertunjukan untuk memperpanjang nafas eksistensi sebuah seni tradisi dengan melahirkan karya-karya yang lebih inovatif.

Seperti yang telah peneliti singgung di atas, bahwa teater Bangsawan merupakan sebuah bentuk seni drama tradisi, dengan cerita-cerita yang bersifat istanasentris. Pada dasarnya, drama-drama tradisi (*toneel*) merupakan bentuk pertunjukan yang mengandalkan kekuatan improvisasi dari para pelakornya. Sedangkan sutradara, berlaku sebagai

programic master atau yang bergerak menyusun dan mengarahkan laku aktor dan skenografi (naskah arahan yang mencakup jalannya cerita dan teknis artistik).

Selanjutnya, syair yang hakikatnya merupakan sebuah naskah klasik yang bersifat naratif, puistis dan dramatis, merupakan kekayaan sastra yang dapat diangkat menjadi naskah pementasan teater bangsawan. Tentu saja, dalam hal ini, diperlukan proses transformasi dari naskah syair kedalam naskah teater bangsawan sesuai dengan kebutuhan aksi pementasan, hematnya dari bahasa sastrawi menjadi bahasa aksi. Teater—Bangsawan dengan sifat pertunjukan yang lebih lentur akan dapat lebih tepat menjadi wahana pertunjukan syair dalam bentuk pementasan yang lebih kompleks lagi, baik secara presentasi audio dan visualnya.

Pemikiran corak baru ini nampaknya patut diujicobakan dan direalisasikan di dalam kehidupan masyarakat Melayu. Perlunya gencatan semangat dan wadah berapresiasi bagi pegia seni dan uluran tangan pemerintah untuk memfasilitasinya. Sebuah konsep alih wahana seperti teater Bangsawan, tentunya membutuhkan tenaga dan jumlah orang yang cukup memadai. Sebuah teater tidak akan hidup kalau hanya ada para praktisi tanpa ada penontonnya. Untuk itu, kerja sama antarsemua pihak sangat dibutuhkan. Demi menghidupkan kembali roh teater bangsawan.

4. Korelasi Syair dalam Teater Bangsawan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab-akibat yang erat. Artinya, hubungan ini saling memberikan kesinambungan yang sehati (baik dari unsur intrinsik maupun ekstrinsik). Korelasi antara naskah syair dan teater bangsawan amat erat dan saling berkaitan. Pasalnya, naskah syair klasik umumnya bersifat naratif. Syair naratif ini

mempunyai bagian-bagian layaknya roman atau pun novel. Di dalam penceritaan syair dapat dipilah-pilah unsur-unsur pembangunnya, misalnya alur, tokoh, latar, majas dan gaya bahasa, rima, dan lain sebagainya. hal ini memudahkan bagi para seniman untuk memindahkan naskah syair ke bahasa teater.

Maka, untuk dapat menjembatani naskah syair ke ranah teater, Murmahyati (2017:469) mengatakan untuk dapat memahami sebuah karya sastra pembaca harus menempuh tiga jalur diantaranya (1) aspek sintaksis; (2) aspek semantik, dan (3) aspek verbal. Aspek pertama, untuk meneliti urutan peristiwa secara kronologis dan logis khusus di dalam alur; aspek kedua untuk meneliti tema, tokoh, dan latar, hal ini sudah berkaitan dengan penafsiran makna atas lambang (verbal, bahasa); aspek yang ketiga untuk meneliti sarana atau alat-alat pengungkapannya seperti sudut pandang, gaya, atau pengujaran.

Selanjutnya, Hartoko (1986:36) mengungkapkan analisis struktur naskah berkaitan dengan hubungan unsur-unsur di dalam mikroteks, keseluruhan wacana, dan hubungan intertekstual. Adapun unsur-unsur mikroteks ini berupa analisis kata-kata dalam kalimat, kalimat-kalimat dalam alinea atau konteks wacana, tetapi juga analisis fungsi dan hubungan antara unsur latar waktu, tempat, dan sosio-budaya dalam analisis latar serta analisis hubungan antarteks baik dalam satu periode maupun periode berbeda. Menurut Stanton (2012:135) bahwa pengarang fiksi otobiografis (*bildungsroman*) bebas memanipulasi fakta (tokoh yang dijadikan model dan biasanya paling tidak disamakan namanya) sehingga dapat menekankan tema yang dipandang utama dalam proses kedewasaannya. Ihwal pemberian makna itu akan terasa lengkap jika dikaitkan atau dipadupadankan dengan unsur kesejarahan itu (Teeuw, 1983: 62). Konsep kajian alih wahana menekankan

pada tingkat kreativitas, inovatif, dan amanat yang baik bagi penikmat, pembaca, maupun penonton.

Kemudian, setelah aspek penelaahan naskah atau teks syair telah sesuai prosedur, naskah berpola dan terikat aturan tersebut harus digubah ke dalam bahasa askah teater. Hal ini tentunya melibatkan kajian alih wahana sebagai konsep yang mendasarinya. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2017) menyatakan alih wahana merupakan pengalihan sastra ke media lain yang melampaui batas tekstual. Kajian dan analisis adalah dua hal yang seiring dan sejalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kajian adalah sebagai usaha penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain-lain). Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Hardaniwati. dkk, 2005: 20). Sehingga, konsep kajian di dalam alih wahana ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Ianya harus melalui fase pencarian jati diri kesejarahan asal-muasalnya.

Kajian alih wahana di dalam sastra merupakan penguraian secara terperinci atas unsur-unsurnya dan pertalian antara unsur-unsur itu. Analisis adalah langkah penting di dalam kritik kesusastraan untuk memahami maksud dan susunan karya sastra tertentu (Zaidan, 2009: 29). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kajian alih wahana adalah langkah nyata untuk menguak ihwal dari suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain-lain) untuk ditarik pangkal dari sebab-musababnya sehingga diketahui secara pasti bagaimana keterkaitan dan hubungan timbal-balik antara naskah syair yang dibahasakan ulang pada teater bangsawan. Keseluruhan hal ini akan bertalian erat dengan asas revitalisasi dan transformasi budaya dalam wadah pelestarian tradisi.

C. PENUTUP

Korelasi naskah syair menjadi sebuah keniscayaan yang patut diujicobakan dan diaplikasikan dalam pementasan teater bangsawan. Haribaan teater bangsawan yang mulai redup harus disegarkan dan dikembalikan ke pangkuan bumi Melayu. Melalui konsep gotong royong lewat seni pertunjukan tentunya mampu mengangkat khazanah klasik, baik syair maupun teater bangsawan menjadi sebuah pertunjukan segar yang disesuaikan dengan peruntukan zamannya. Jika tidak segera dilakukan gerakan pemartabatan budaya usang ini, cepat atau lambat semuanya hanya tinggal sejarah dan menjadi cerita masa lalu saja.

Sejatinya, korelasi syair ke teater bangsawan ini tidak terlepas dari konsep alih wahana yang di dalam ranah teater lebih di kenal dengan istilah pengemasan seni pertunjukan. Dalam hal ini, syair yang merupakan kekayaan sastra klasik alam Melayu merupakan gagasan literasi yang dapat dijadikan bahan dasar pementasan naskah teater bangsawan. Syair yang pada dasarnya adalah cerita naratif, puitis dan dramatis memerlukan proses transformasi untuk menjadi naskah sesuai kebutuhan pementasan teater bangsawan. Apatah lagi kekayaan makna dan pesan dalam sebuah syair mampu memberikan edukasi bagi masyarakat, misalnya bersinggungan dengan isu pendidikan karakter yang sedang marak dibicarakan.

Seyogianya sebuah pertunjukan teater bangsawan tidak hanya dilengkapi lakonan para aktor dengan berpanduan pada naskah saja, akan tetapi, teater bangsawan juga memakai unsur nyanyian dan alat musik yang dipadupadankan dengan akting para aktor (pemain). Perpaduan ke semua konsep ini menciptakan harmonisasi baik secara kemasan maupun secara pesan (tersurat dan tersirat). Jika pembugaran tradisi ini bisa dicungkil naik ke atas, maka korelasi antarkeduanya niscaya mendongkrak

frame usang pada dua substansi klasik khazanah bangsa Melayu.

DAFTAR SUMBER

- Alisjahbana, S. T. 2011. *Puisi Lama*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Amir. 2013. *Sastra Lisan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Pusat. Indonesia. Jakarta.
- Danandjaja, James. 1991. *Folklor Indonesia*. Jakarta: Grafitipers.
- Effendy, Chairil. (2014). Peranan sastra dan bahasa Melayu dalam membangun karakter bangsa. *Jurnal Jentera*, 3 (2), hlm. 126—134.
- Endraswara. 2017. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: UGM
- Fang, Liaw Yock. 2011. *Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik*. Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia.
- Fauzi Abdullah. 2016. *Pembugaran Irama Syair dalam Kalangan Guru-Guru Bahasa Melayu di Malaysia*. Kuala Lumpur: ITBM
- Hardaniwati dkk. 2003. *Kamus Pelajar*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Hartoko dan Rahmanto. 1986. *Pemandu di dunia sastra*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harymawan, R.M.A. 1988. *Dramaturgi*. Bandung: Rosda Karya.
- Idawati. 2016. *Irama Syair Melayu Riau: Sebuah Tinjauan Estetika*. Pekanbaru: ITBM
- Ihromi, T. O. 2013. *Pokok-pokok antropologi budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ismawati, Esti. 2016. "KARAKTER PEREMPUAN JAWA DALAM NOVEL INDONESIA BERWARNA LOKAL JAWA: KAJIAN PERSPEKTIF GENDER DAN TRANSFORMASI BUDAYA (The Characters of Javanese Women in Indonesian Fictions with Javanese Local Colour: A Gender Perspective and Cultural Transformation Study)." *METASASTRA: Jurnal Penelitian Sastra* 6 (1): 10.
- Kantor Bahasa Kepulauan Riau. 2015. *Karya Sastra*. Tanjungpinang: Kantor Bahasa.
- Madun, Roslan. 2016. *Syair Alam Melayu Nusantara*. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.
- Mahyudin. 2008. *Redefinisi Melayu*. Jakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Malik, Abdul. 2013. *Bahasa Melayu Kepulauan Riau Tumpah Darah Bahasa Indonesia*. LAM Kepri: Komodo Books
- Moeleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murmahyati, NFN. 2017. "CERPEN ANJING-ANJING KASMARAN KARYA BADARUDDIN AMIR: SUATU TINJAUAN STRUKTURAL TZVETAN TODOROV." *SAWERIGADING* 18 (3): 467–76.
- Nofriani, Asri. 2012. "Penyutradaraan Teater Bangsawan Dengan Naskah Melayu Peterakna Episode Peri Bunian Karya G.P. Ade Dharmawi." *RESITAL? JURNAL SENI PERTUNJUKAN* 13 (1).
- Taum, Y. Y. (2011). *Studi Sastra Lisan (Sejarah, Teori, Metode dan Pendekatan Diserta Contoh Penerapannya)* (I). Yogyakarta: LAMALERA.
- Teeuw. 1984. *Sastera dan Ilmu Sastera*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Piah, H. M. 2016. *Syair alam Melayu nusantara: gagasan dan cabaran*. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.
- Pradopo, R. D. 2017. *Pengkajian puisi*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Rahmawati, Endang. 2014. "Penerapan Metode *Numbered Head Together* (HNT) untuk Meningkatkan Minat dan Kemampuan Menulis Pantun". Tidak dipublikasikan. *Tesis*. Surakarta:

- Universitas Sebelas Maret
- Sahril. 2016. *Meneroka Irama Pendendang Syair Melayu*. Medan: ITBM
- Samani, M dan Hariyanto. 2014. *Konsep dan model pendidikan karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiarto. 2015. *Mengenal Sastra Lama*. Yogyakarta. ANDI Jogjakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Suhardi. 2017. Amanat dan nilai-nilai gurindam kedua belas dongeng *bujang sri ladang*. *Jurnal Bahasa Lingua Scientia*, 9 (1), hlm. 41-56.
- Suwardo. 2009. Beberapa aspek pengajaran puisi di sekolah menengah atas. *Jurnal WIDYA WARTA: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 1 (1), hlm. 1-13.
- Stanton, R. 2012. *Teori Fiksi* (II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wellek & Warren. 1989. *Teori kesusastraan*. Jakarta: Gramedia.
- Winstedt, R.O. 1958. *A History of classical Malay Literature*. Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society, 183, 31,3. Diakses pada tanggal 10 February 2017.



Defri Elias Simatupang

Lahir di Pematangsiantar, 13 Mei 1983, merupakan salah satu peneliti di Balai Arkeologi Sumatera Utara, bidang kepakaran Manajemen Arkeologi, sub kepakaran Arkeologi

Publik. Mendapatkan gelar Sarjana Arkeologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2005, gelar Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Darma Agung Medan pada tahun 2010, dan saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Sumatera Utara Medan sejak tahun 2016. Dalam perjalanan kariernya, telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dapat dilihat di <https://scholar.google.co.id/citations?user=8MI-AJQAAAAJ&hl=en>.

Indriani



Lahir di Muaralembu, Indragiri Hulu, Provinsi Riau 28 April 1968. Penulis memperoleh gelar S1 pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas

Padang 2 Maret 1992, menyelesaikan AKTA IV di FKIP Universitas Riau Pekanbaru 29 Januari 1994 dan menamatkan S2 pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang 28 April 2014.

Penulis pernah bekerja sebagai Tenaga Lapangan DIKMAS Kecamatan Tanah Putih, Provinsi Riau tahun 1994/1995, sebagai Tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan Bidang Kebudayaan di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 1995-1997. Diangkat sebagai PNS di Balai Kajian

Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh tahun 1998. Tanggal 29 Mei 2003 hingga sekarang menjadi staf pengajar di SMA Negeri 1 Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Dedi Arman



Lahir di Malalak (Agam), sebuah 'nagari' di kaki Gunung Singgalang, Sumatra Barat, 24 November 1979. Pendidikan SD dan SMP diselesaikan di Gadut, Tilatang Kamang.

Sementara, SMA tamat tahun 1998 di SMA 1 Bukittinggi. Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Ilmu Sejarah, Unand Padang, tamat 2003. Berkecimpung di dunia jurnalistik sebagai jurnalis sejak 2002 sampai 2014 di Kota Padang dan Batam, Provinsi Kepri. Mulai bekerja di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri sejak 2014. Kini jadi peneliti pertama bidang sejarah di BPNB Kepri. Tertarik menulis dunia maritim, pers dan biografi. Bisa dihubungi di email: deasutanmakmur79@gmail.com.

Sean Popo Hardi



Lahir di Muara Bulian tanggal 4 Juni 1991. Meraih gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Universitas Jambi tahun 2013. Kemudian meraih

gelar Magister dalam bidang Ilmu Susastra, Kajian Tradisi Lisan di Universitas Indonesia tahun 2016.

Sejak 2017 bekerja sebagai Penggiat Budaya Kemendikbud untuk wilayah kerja Provinsi Jambi. Selain itu, juga menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi dan Universitas

Terbuka di Jambi. Disela kesibukan masih aktif menulis artikel budaya yang dimuat di berbagai media cetak maupun elektronik, serta rutin mengikuti pertemuan ilmiah dalam bidang tradisi lisan.

Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Nanda Darius



Pria kelahiran Pangkal pinang, aktif dalam dunia teater sejak tahun 97 dengan menjadi anggota di Teater Gidag gidig, Solo. Di tahun 2002 masuk ke SMKI

Bandung, Jurusan Teater dengan mengambil bidang keahlian Keakoran. Melanjutkan studi kesarjanaan di STSI Bandung, spesialisasi Penyutradaraan Panggung.

Pria yang juga jebolan kelompok Teater Payung Hitam Bandung (2006) ini adalah peraih Juara III Nasional pada perlombaan Monolog di Peksiminas Jambi (2007), Meraih juara IV Nasional dalam Lomba Cipta Media Gizi Seimbang di tahun 2015, dan The Best Aktor Pria Pertama tingkat Nasional di tahun 2016.

Karirnya di dunia teater lebih dikenal sebagai speasialis Sutradara Opera sekaligus Pertunjukan Kolosal yang sering terlibat dalam berbagai event kelas nasional ataupun internasional. Salah satu karya masterpisnya yg berjudul *Manunggaling Ing Wening* (2014) merupakan karya kolosal yang melibatkan para pesilat Jawa Barat yg berjumlah 15000 orang. Karya kolosal terbarunya di tahun 2018 dengan judul *Ode Masamper*, yg melibatkan 1300 siswa siswi sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas, yg diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Kini Nanda Darius, mendedikasikan dirinya sebagai Staff di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, dan fokus meneliti Kesenian Melayu dalam Wilayah kerja BPNB Kepulauan Riau yaitu

